



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



D4

2022

LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

KATA SAMBUTAN

Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja Tahun 2022 Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bagian dari implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang didalamnya berisi potret kinerja selama tahun 2022.

Secara umum, pelaksanaan dari rencana kegiatan pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM selama tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Keberhasilan program kebijakan bidang perekonomian, khususnya terkait bidang koordinasi ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah. Keberhasilan program tersebut didorong oleh terlaksananya kegiatan koordinasi terkait bidang ekonomi digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, koperasi dan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan atas potret kinerja, dan pendorong peningkatan kinerja organisasi. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2023
Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM,

Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM

Capaian Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Tahun 2022

Koordinasi terkait pengumpulan data e-commerce	- Telah melakukan koordinasi dan monitoring dengan Divisi Pengembangan Data Digital & Big Data, Departemen Statistik, Bank Indonesia terkait nilai transaksi e-commerce; - Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia berkolaborasi menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022; - Telah dilaksanakan koordinasi terkait peraturan BPS tentang Penyampaian Data dan Informasi PMSE dengan K/L terkait dan pelaku industri untuk membahas kesepakatan pengaturan dalam draft peraturan tersebut. - Telah dilaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan survei e-commerce 2022 yang digunakan sebagai referensi data e-commerce.
Kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Pelaku Usaha/ Asosiasi	- Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Microsoft dengan Kemenko Perekonomian pada tanggal 15 Juni 2022. - Pelaksanaan koordinasi program "Skills for Jobs Indonesia" untuk memberikan literasi digital, keterampilan digital, dan persiapan kerja gratis kepada sedikitnya 1 (satu) juta masyarakat Indonesia sampai dengan tahun 2024 Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian (PIDI 4.0), dan PMO Kartu Pra Kerja - Telah diselenggarakan <i>Trainer of Trainers</i> (ToT) yang merupakan bagian dari program "Skills for Jobs Indonesia" dengan jumlah partisipan sebanyak 385 <i>trainers</i> dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Identifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait e-commerce dan digitalisasi sentra UKM/ IKM	- Telah dilaksanakan kegiatan bersama Asisten Deputy PEMK Kemenko Perekonomian, dan Asisten Deputy Pengembangan Ekosistem Bisnis KemenkopUKM, melalui pelaksanaan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha di PLUT KUMKM di Bali. - Telah dilaksanakan (i) Pelatihan "Akselerasi Penguatan Ekosistem Digital UMKM Berbasis PLUT di Kabupaten Kuningan; (ii) Pelatihan "Adopsi Digital Tools Untuk Akselerasi Pengembangan UMKM di Kota Magelang; dan (iii) Pelatihan "Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital dalam Akselerasi Pengembangan UMKM Kota Surakarta.
Koordinasi kebijakan ekosistem ekonomi digital dan transformasi digital, termasuk e-commerce di tingkat internasional	- Deputi IV c.q. Asdep Ekonomi Digital sebagai focal points ACCED (ASEAN Coordinating Committee on E-Commerce and Digital Economy) untuk Indonesia telah mengkoordinasikan persiapan PED Leaders' Statement to Develop the ASEAN DEFA - Telah disusun Concept Note (CN) PED Leaders' Statement to Develop the ASEAN DEFA dan posisi saat ini tengah disirkulasi ke ASEAN Member State (AMS) untuk ditinjau dan diberikan masukan lebih lanjut pada tingkatan SEOM (Senior Economic Officials).
Koordinasi penyusunan kebijakan ekonomi digital melalui PMO Pengembangan Ekonomi Digital	- Telah disusun Konsep Kerangka Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia (2021-2030); - Telah disusun usulan Struktur Komite Nasional dan PMO Pengembangan Ekonomi Digital; - Telah disusun konsep RPerpres pembentukan PMO Pengembangan Ekonomi Digital (koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi, serta Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi).
Identifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait ekosistem ekonomi digital (pengembangan ekosistem) dan transformasi digital (sektor publik)	- Mengawal dan melakukan koordinasi penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP); - Koordinasi isu implementasi UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, terutama rencana pengenaan TnC sebagai Objek Bea Materai, dan upaya perlindungan data pribadi dalam pemeriksaan pajak marketplace; - Koordinasi RPMK Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak yang dipungut oleh Pihak Lain Atas Penyerahan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pedagang Dalam Negeri Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

01

Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan Produk/ Komoditas Berorientasi Ekspor

02

Sinergi Program Pelatihan dan Pendampingan Usaha di PLUT-KUMKM

03

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)

04

Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024)

05

Implementasi Kebijakan Terkait Inkubasi Wirausaha

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			Program Kewirausahaan	
Telah dilaksanakan MoU: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Desa Ekspor: bersama PT Astra Internasional, Tbk. Direktur Eksekutif LPEI dan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Aneka (Dirjen IKMA) Pembentukan Tim Koordinasi Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan Produk/ Komoditas Berorientasi Ekspor Telah dilaksanakan monitoring <i>best practices</i> ekspor ke Lombok (sorgum), Situbondo (kopi), Ponorego (rempah-rempah), Bantul (kriya), dan Subang (kopi, buah-buahan tropis, dan kriya). Telah dilaksanakannya audiensi awal dengan Atase Perdagangan di Canberra dalam pembahasan rancangan program ekspor tahun 2023	Telah terlaksana kolaborasi program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Dan Manajemen Produk Halal Bagi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha antara Kemenko Perekonomian, Kemenkop UKM, BPJPH, dan 5 platform digital di 6 lokasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM Telah terfasilitasi kolaborasi Kemenkop UKM dan BPJPH dalam pelaksanaan Bimtek Sertifikasi Halal bagi 1344 konsultan pendamping PLUT KUMKM.	Identifikasi program PPKE Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, dan Kemenaker di 212 kab/kota TA 2022, serta monitoring perkembangan dan pelaporan realisasi Tahun 2022 Monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan di daerah untuk melihat pelaksanaan program pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Swasta di daerah Workshop tagging anggaran K/L oleh Pokja Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas untuk perencanaan dan monitoring Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023.	Telah terlaksana Rakor Implementasi Perpres 2/2022. Kemenkop UKM bersama Kemenko Perekonomian, Bappenas dan Setkab telah menyelenggarakan Rakor terkait progress Capaian Renaksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional Telah terlaksana <i>piloting</i> program kewirausahaan yaitu: Seminar Nasional dan <i>Workshop</i> SMK pada tanggal 4 Agustus 2022 di Magelang dengan jumlah peserta luring 30 siswa dan daring ±350 siswa, serta di Bandung dengan jumlah peserta luring 100 siswa dan daring >1.200 siswa.	Kunjungan <i>monitoring</i> dan <i>evaluasi</i> ke Beberapa Inkubator Bisnis, Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB Bogor, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2022

DATA CAPAIAN KARTU PRAKERJA 2022

Sampai 31 Desember 2022

Indikator	Data 2022
Jumlah Pendaftar terverifikasi email, KTP, KK, HP (Kumulatif tahun 2020-2022)	45.197.019
Jumlah penerima SK	5.076.928
Jumlah penerima dicabut kepesertaannya	92.138
Jumlah Penerima Efektif (Penerima Riil)	4.984.790
Jumlah penerima menyelesaikan pelatihan pertama	4.949.734
Jumlah penerima mendapatkan insentif	4.934.362
Jumlah insentif tersalurkan	Rp 10.224.597.150.000

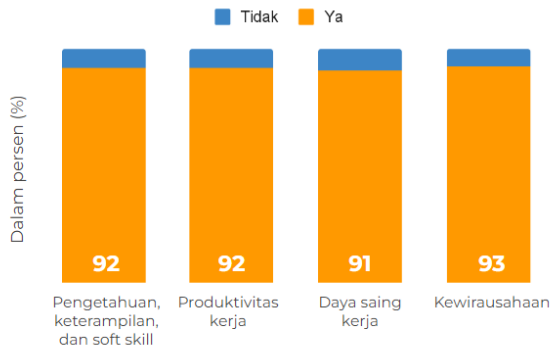
Program Kartu Prakerja menjangkau 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota

Gelombang 23-47 : 4.984.790 Orang Penerima Efektif



Pelatihan Kartu Prakerja meningkatkan Kompetensi, Produktivitas, Daya Saing, dan Kewirausahaan

Secara umum, Pelatihan Kartu Prakerja membantu meningkatkan:



83% Mengambil pelatihan sesuai **minat**

Bagi Pekerja, Pelatihan Kartu Prakerja membuat saya:

- mampu mengerjakan pekerjaan **lebih efektif**
- >93%** mampu mengerjakan pekerjaan **lebih banyak**
- mampu mengerjakan pekerjaan **lebih efisien**

Bagi Pencari Kerja, Pelatihan Kartu Prakerja:

- 86%** Menerapkan ilmu/keterampilan dari Pelatihan Kartu Prakerja untuk **mencari kerja**

Sumber: Survei Evaluasi II 2022, N = 4.132.322 Penerima

Implementasi Major Project Pengelolaan Terpadu

Lokasi dan Komoditi Tahun 2022:

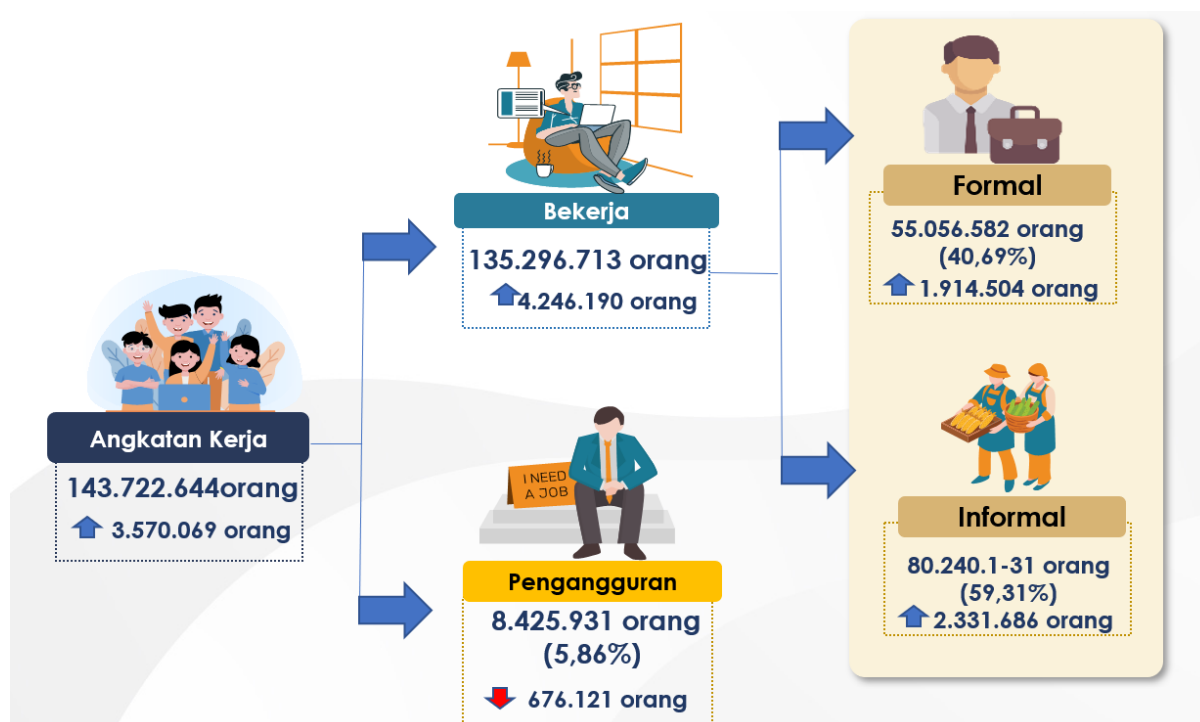
1. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Komoditi Biofarmaka
2. Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara – Komoditi Kelapa
3. Kupang, NTT – Komoditi Sapi
4. Aceh – Komoditi Nilam*
5. Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah – Komoditi Rotan*

Keterangan:

*Pembangunan *Factory Sharing* pada lokus tersebut tidak terlaksana

***Major Project* tersebut didasari oleh PP No 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perpres No 85/2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2022



Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Agt 2020-Agt 2021		Perubahan Agt 2021-Agt 2022	
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen	juta orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengangguran ¹⁾ karena COVID-19	2,56	1,82	0,24	-0,74	-28,96	-1,58	-86,88
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ²⁾ karena COVID-19	0,76	0,70	0,32	-0,06	-6,98	-0,38	-54,48
3. Sementara Tidak Bekerja ³⁾ karena COVID-19	1,77	1,39	0,11	-0,38	-21,54	-1,28	-91,76
4. Penduduk Bekerja Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19	24,03	17,41	3,48	-6,62	-27,55	-13,93	-80,03
Total PUK Terdampak COVID-19	29,12	21,32	4,15	-7,80	-26,77	-17,17	-80,53
Penduduk Usia Kerja (PUK)	203,97	206,71	209,42	2,74	1,34	2,71	1,31
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Persentase PUK Terdampak COVID-19 Terhadap PUK	14,28	10,32	1,98	-3,96		-8,34	

Keterangan:

¹⁾ Pengangguran karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020

²⁾ Bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020

³⁾ Sementara tidak bekerja karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja

PERISTIWA PENTING

2022

15 Januari 2022

Penandatanganan MoU Kemenko
Perekonomian dan Microsoft



13 Juni 2022

PLUTEC dengan tema Pelatihan
Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen
Produk Halal bagi KUMKM dan
Wirausaha.



16 Juni 2022

Media Briefing Temu Raya Program
Kartu Prakerja

17 Juni 2022

Temu Raya Program Kartu Prakerja



1 Juli 2022

Transformasi Gerakan Koperasi



1 Juli 2022

Focus Group Discussion (FGD)
Kebijakan dan Strategi
Penyelenggaraan Pelatihan Skema
Normal Program Kartu Prakerja



14 Juli 2022

Seminar Nasional "Membangun Semangat
Kewirausahaan Mahasiswa yang Inovatif
dan Berdaya Saing" di Universitas
Udayana



11-15 Juli 2022

Festival Ekonomi Keuangan Digital
Indonesia 2022



02 Agustus 2022

Kick-Off Meeting Tim Kecil Persiapan
Pembentukan PMO Pengembangan
Ekonomi Digital



13 September 2022

Penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama Pertukaran dan Pemanfaatan
Data Secara Elektronik antara
Kementerian Koordinator Bidang



27 Oktober 2022

Sosialisasi Peraturan Presiden
Nomor 113 Tahun 2022



08 November 2022

Apresiasi Penanganan Sindikat
Pemalsu Data, Kapolda Sumut Siap
Jaga dan Sukseskan Program Kartu
Prakerja



05 Desember 2022

11th TVET Roundtable



15-16 Desember 2022

Benchmarking Study Program Kartu
Prakerja dengan program Hello
Work Pemerintah Jepang



28 Desember 2022

Rapat Internal Deputi 4





**RING
KA
SAN**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM juga berkomitmen mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2022 merupakan sarana eksplorasi capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian sebagai implementasi dari tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM atau disebut juga Deputi IV

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2022 mengacu pada 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. SS yang pertama adalah Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas. SS yang kedua adalah Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat.

SS yang ketiga adalah Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif. Sedangkan SS yang keempat adalah Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik

Hasil Sasaran Strategis dan pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2022 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian IKU (%)	Capaian NSS (%)
I	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.					
1.1	Indikator 1.1 Nilai transaksi e-Commerce	Triliun Rupiah	430	476,3	110,77	110,77
1.2	Indikator 1.2 Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	3	3,04	101,3	101,3
1.3	Indikator 1.3 Kontribusi UMKM Terhadap PDB	Persentase	63	62	98,41	98,41
1.4	Indikator 1.4 Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun	Juta Orang	2,4	4,98	120	120
1.5	Indikator 1.5 Jumlah Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	Ribu Orang	2,7	4,25	120	120
II	Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat					
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	Indeks	3 dari 4	3	100	100

III	Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif					
	3.1 Indikator 3.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Indeks	3 dari 4	3	100	100
	3.2 Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Persentase	75	100	120	120
	Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik					
	4.1 Indikator 4.1 Indeks Tata Kelola Kedeputian	Indeks	3 dari 4	3	100	100

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2022	100 %
---	-------

Terkait dengan akuntabilitas keuangan dan penggunaan anggaran, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada tahun 2022 turut melakukan *Auto Adjustment* anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19. Pagu anggaran tahun 2022 sebelum *Auto Adjustment* adalah sebesar Rp. 14.500.000.000,00, kemudian pagu tersebut mengalami *Auto Adjustment* sehingga menjadi sebesar Rp. 13.229.703.000,00. Pagu anggaran pada tahun 2022 tersebut memiliki besaran yang sama dibanding dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, anggaran yang dikelola oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebesar Rp 14.500.000.000,00. Adapun sampai dengan 31 Desember 2022, dari total pagu belanja, telah terealisasi sebesar Rp 13.220.637.727,00, atau mencapai 99,92 % dari alokasi anggaran.

Capaian kinerja indikator kinerja program dan kegiatan yang didukung dengan analisis akuntabilitas keuangan tersebut di atas menunjukkan bahwa

pada tahun 2022 Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah dapat melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), serta mencapai target keluaran yang diperjanjikan, dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang tersedia.

Tercapainya kinerja Deputy IV tahun 2022 bukan berarti pekerjaan berjalan tanpa hambatan. Pandemi Covid-19 membuat Deputy IV perlu melakukan beberapa penyesuaian dalam sasaran strategis hingga metode dalam pencapaiannya. Mulai dari merubah beberapa pertemuan fisik menjadi virtual hingga perubahan Work from Home (WFH) dan Work from Office (WFO) terbatas. Selain penyesuaian terkait dampak pandemi tersebut, terdapat faktor-faktor penghambat kinerja Deputy IV. Salah satunya adalah adanya perbedaan kepentingan diantara pemangku kepentingan terkait kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang mengakibatkan proses pembahasan kebijakan memakan waktu lebih lama.

Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan pada forum rapat koordinasi Kementerian/Lembaga. Dalam menghadapi pandemi, Deputy IV juga melakukan sebagian besar pertemuan secara virtual. sebagai langkah preventif terhadap Covid-19. Untuk pertemuan yang memang harus dilakukan secara fisik, langkah yang kami lakukan adalah membatasi jumlah orang yang hadir dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

Dengan penyusunan laporan kinerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance* di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2022

PERISTIWA PENTING TAHUN 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Organisasi dan Fungsi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Sistematika Pelaporan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2020-2024
- B. Prioritas Nasional 2022 dan Renja 2022
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Capaian Kinerja 2022
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB 4 EVALUASI KINERJA

- A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja
- B. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat
- C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Deputy 4

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Deputy 4 (Permenko 9 Tahun 2020)

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Deputy 4 (Permenko 8 Tahun 2022)

Gambar 1.4 RPJMN 2020-2024

Gambar 1.5 Peta Strategis Deputy 4 Tahun 2022

Gambar 3.1 Status Capaian NKO

Gambar 3.2 Proses Penghitungan NKO

Gambar 3.3 Polarisasi Maximize

Gambar 3.4 Polarisasi Minimize

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Strategis / IKU Deputy 4 2020-2024

Tabel 2.2 Rencana Kerja Deputy 4

Tabel 2.3 Sasaran dan IKU Tahun 2022

Tabel 2.4 Rencana Aksi Deputy 4 Tahun 2022

Tabel 3.1 Indeks Capaian IKU

Tabel 3.2 Kriteria Capaian Kinerja NSS

Tabel 3.3 Pengukuran IKU Deputy IV

Tabel 3.4 Ringkasan Capaian Kinerja Deputy IV Tahun 2022

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi SAKIP Deputy IV

Tabel 3.6 Hasil PMPRB Deputy IV Tahun 2022

Tabel 3.7 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2022

Tabel 3.8 Rincian Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan

Tabel 4.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Terakhir dan
Target Jangka Menengah

Tabel 4.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 4.3 Rencana Aksi Tahun 2023

Tabel 4.4 Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2023

Tabel 4.5 Perbandingan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

BAB

01

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pada RPJMN tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan nasional yang meliputi: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, 5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, 7) Memperkuat stabilitas

polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tiga bidang yang memiliki peran fundamental untuk mewujudkan beberapa agenda prioritas nasional tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM juga berkomitmen mendukung pencapaian Sasaran

Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2022 merupakan sarana eksplorasi capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian sebagai implementasi dari tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM atau disebut juga Deputy IV



B. Organisasi dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi IV mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi.

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan



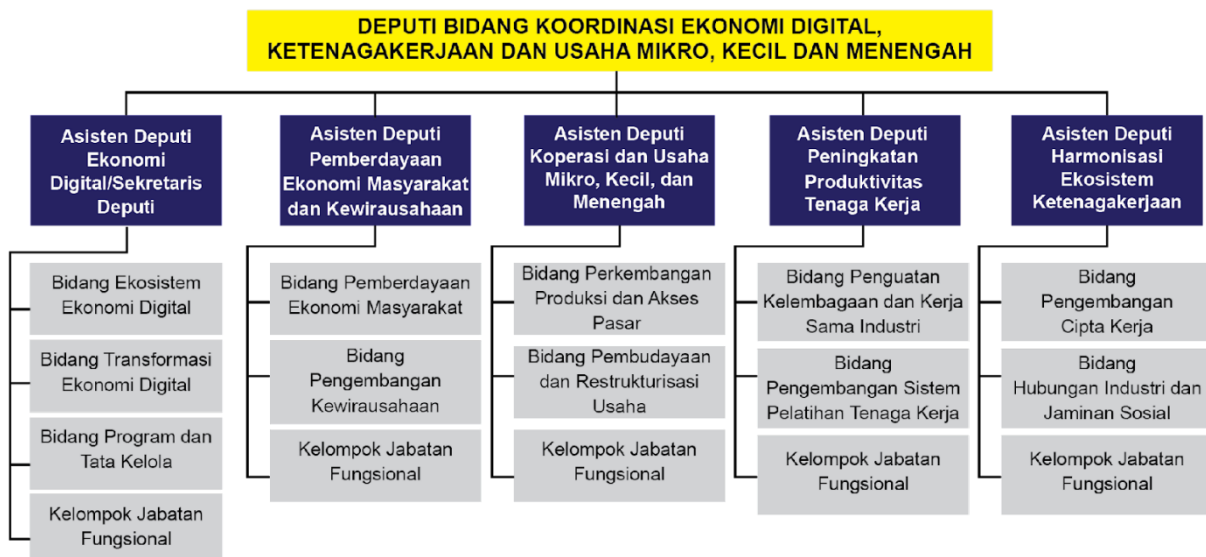
Gambar 1.1 Logo Deputi IV

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Struktur Organisasi Deputy IV terdiri atas:

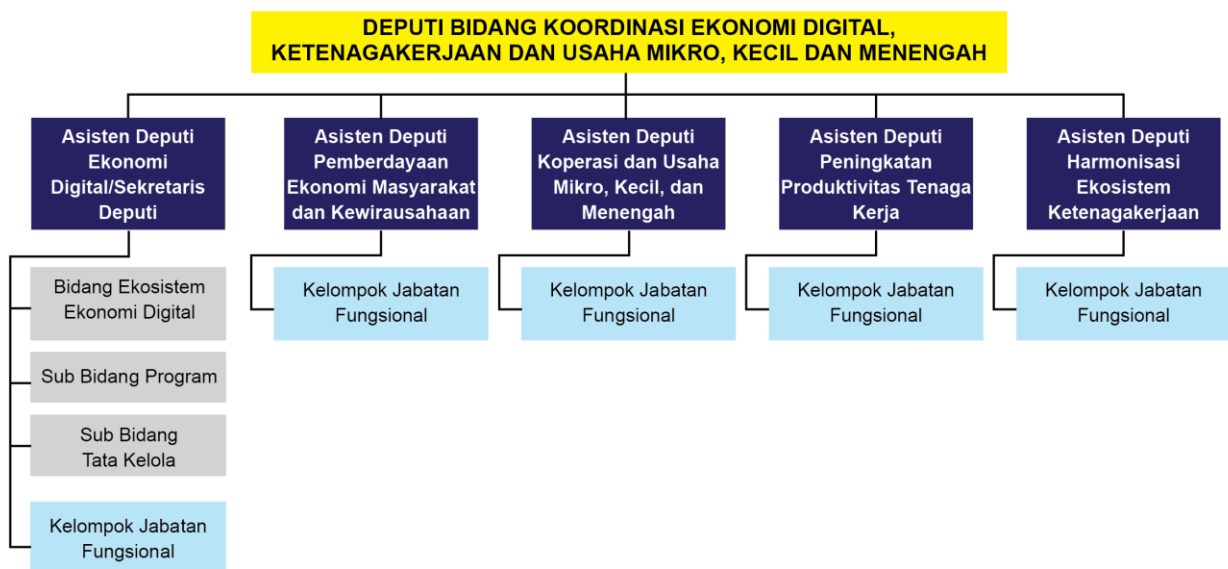
- Asisten Deputy Ekonomi Digital / Sekretaris Deputy;
- Asisten Deputy Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan;
- Asisten Deputy Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Asisten Deputy Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan.

Terkait Struktur Organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang di tandatangani pada 29 Juni 2020 maka Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Deputy IV berdasarkan Permenko No.9 Tahun 2020

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang di tandatangani pada 28 Oktober 2022 maka Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut :



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Deputy IV berdasarkan Permenko No.8 Tahun 2022

C. Peran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM



Gambar 1.4 RPJMN 2020-2024

Sasaran pembangunan jangka menengah 2022-2024 sesuai dengan RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Tiga dari tujuh agenda tersebut berkaitan dengan bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yaitu: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, 2) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 3) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran yang fundamental untuk mewujudkan beberapa agenda prioritas nasional tersebut.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024, maka sasaran program yaitu Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran strategis dalam hal koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan dan UMKM baik secara berjenjang maupun dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya, sebagai bentuk pelaksanaan peran strategis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan target pembangunan sebagaimana ditetapkan di dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024

Ekonomi Digital

- Koordinasi terkait pengumpulan data e-commerce
- Kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Pelaku Usaha/ Asosiasi
- Identifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait e-commerce dan digitalisasi sentra UKM/ IKM
- Koordinasi kebijakan ekosistem ekonomi digital dan transformasi digital, termasuk e-commerce di tingkat internasional
- Koordinasi penyusunan kebijakan ekonomi digital melalui PMO Pengembangan Ekonomi Digital
- Identifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait ekosistem ekonomi digital (pengembangan ekosistem) dan transformasi digital (sektor publik)

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan

- Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha
- Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan Produk/Komoditas Berorientasi Ekspor
- Penguatan Ekosistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kolaborasi Multistakeholder dan Kemitraan Usaha dalam Rantai Nilai Bisnis ; dan
- Implementasi Kebijakan Terkait Inkubasi Wirausaha

Koperasi dan UMKM

- Sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (*Factory Sharing/FS*) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 dengan K/L terkait
- Koordinasi, monitoring, dan evaluasi Penguatan Koperasi
- Koordinasi program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi
- Koordinasi dan monitoring implementasi PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M,
- Koordinasi dan monitoring implementasi PP No. 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (mengikuti perkembangan perubahan UU Cipta Kerja), serta
- Penguatan koordinasi dan sinergitas Program K/L Bidang UMKM (27 K/L) Tahun 2022-2023.

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

- Koordinasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Semi Bansos
- Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Semi Bansos dalam rangka peningkatan tata kelola dan akuntabilitas Program Kartu Prakerja
- Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi dalam rangka Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis *Demand Driven*
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Vokasi dan Penyusunan Strategi Nasional Vokasi

Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

- Implementasi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
- Kebijakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Kebijakan Pengupahan
- Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum kedudukan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM , peran strategis, isu strategis Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan format sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja terdiri dari: Rencana Strategis, Prioritas Nasional, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dijelaskan pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM , analisis capaian kinerja, dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut

BAB IV EVALUASI KINERJA

Pada bab ini dijelaskan perbandingan capaian kinerja antara tahun 2021 dan tahun 2022, Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Tindak lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat dan rencana aksi peningkatan kinerja

BAB V PENUTUP

yang berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja tahun 2022

LAMPIRAN

Lampiran berisi data dan dokumen pendukung Laporan Kinerja.



BAB

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis 2020-2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2022-2024 adalah “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Mengacu pada visi tersebut, visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Selaras dengan visi-visi tersebut, maka visi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai berikut:

VISI

“ Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Digital, Koperasi dan UMKM, dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. ”

Visi ini menunjukkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM , yang merupakan salah satu unsur eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pengembangan ekonomi digital, pemberdayaan

ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, koperasi dan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Koordinator Perekonomian yang telah dirumuskan tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM berperan mendukung misi, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas melalui pengembangan ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM, sehingga misi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut :

“

MISI

- ***Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan dan Inklusifitas Ekonomi.***
- ***Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Penumbuhan Wirausaha Baru yang Berkualitas serta Mendukung Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian***
- ***Mewujudkan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM***
- ***Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang berkualitas dan berdaya saing***
- ***Mewujudkan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan***

”

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang ekonomi digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan

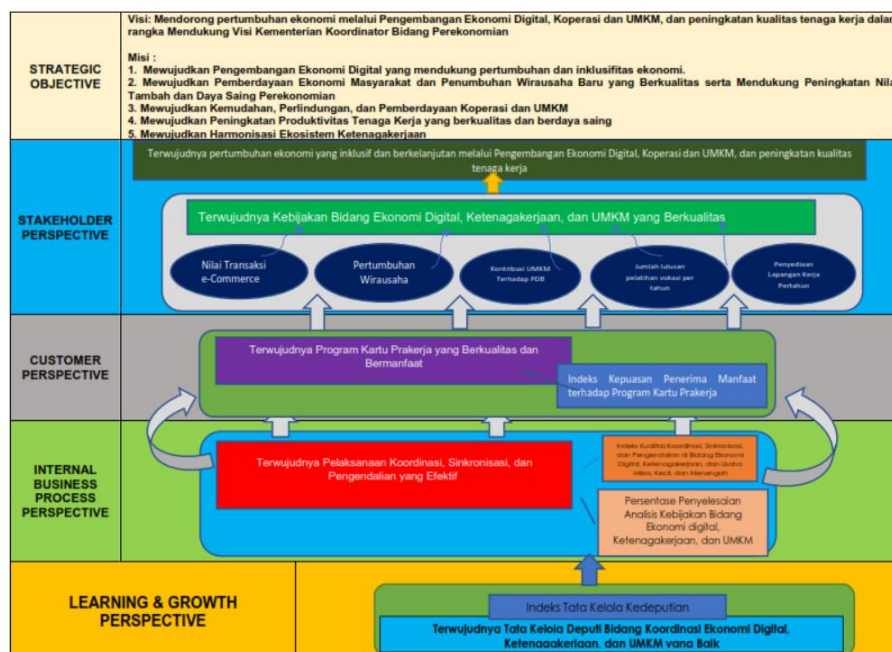


kewirausahaan, koperasi dan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan dalam kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputy Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024, Deputy Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM merumuskan 8 (delapan) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.

Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM digambarkan dalam rumusan peta strategi seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.5 Peta Strategi Deputy IV Tahun 2022



Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis akan dinilai melalui pengukuran indikator target kinerja secara berkala dan dievaluasi melalui Rapat Evaluasi Kinerja Tahunan Kedeputan yang diselenggarakan tiap akhir tahun. Target Kinerja tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra Kedeputan disusun sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis / IndikatorKinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SS.1 Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi e-Commerce, penciptaan wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.							
IKU.1	Nilai Transaksi e-Commerce	260	345	430	515	600	Triliun
IKU.2	Pertumbuhan Wirausaha	2	2,5	3	3,5	4	Persentase
IKU.3	Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap PDB	61	62	63	64	65	Persentase
IKU.4	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2	2,2	2,4	2,6	2,8	Juta Orang
IKU.5	Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	2,7	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	Juta Orang
SS.2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat							
IKU.6	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks

SS.3 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berkualitas							
IKU.7	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterima Menko Perekonomian	100	100	100	100	100	%
SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah							
IKU.8	Persentase ASN Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi	75	77	79	81	82	%
IKU.9	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	82,50	83,50	84,50	85,50	86,50	Nilai
IKU.10	Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	80	81	82	83	84	%
IKU.11	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	90	92	94	96	98	%

Berdasarkan Rapat Evaluasi Kinerja Tahunan Kedeputusan Tahun 2022, terdapat penyesuaian kalimat pada Sasaran Strategis 1 dari “Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi e-Commerce, penciptaan wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja”, berubah menjadi “Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas”. Pada Sasaran Strategis 3 dari “Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berkualitas”, berubah menjadi “Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif” dengan dua indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Pada Sasaran Strategis 4 dari “Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, berubah menjadi “Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik”, dengan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Kedeputusan. Sehingga penyesuaian Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Penyesuaian Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
SS.1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas						

IKU.1	Nilai Transaksi e-Commerce	260	345	430	515	600	Triliun
IKU.2	Pertumbuhan Wirausaha	2	2,5	3	3,5	4	Persentase
IKU.3	Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap PDB	61	62	63	64	65	Persentase
IKU.4	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2 juta	2,2 juta	2,4 juta	595 ribu	595 ribu	Orang
IKU.5	Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	2,7	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	Juta Orang
SS.2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat							
IKU.6	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
SS.3 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif							
IKU.7	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
IKU.8	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	75%	75%	75%	75%	80%	Persentase
SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik							
IKU.9	Indeks Tata Kelola Kedeputan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks

B. Prioritas Nasional 2022 dan Renja 2022

1. Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional yang diampu oleh Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

- Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan;
- Penguatan sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri;
- Penguatan kebijakan pengupahan;
- Penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

2. Rencana Kerja (Renja) 2022

Sasaran Program pada Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun Anggaran 2022 adalah “Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas”. Dimana Sasaran Program Deputy IV tersebut dibagi menjadi 6 Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:



Tabel 2.3
**Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
 Ketenagakerjaan, dan UMKM**

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output /Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2022 (Rp Ribu)
SK 1 : Tersusunya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas		
KRO : Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 rekomendasi kebijakan	1.678.580
RO : Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di bidang Ekonomi Digital	1 rekomendasi kebijakan	1.678.580
SK 2 : Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputi Serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal		
KRO: Layanan Umum	2 Layanan	5.321.420
RO : Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	1 Layanan	2.500.000
RO : Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	1 Layanan	2.821.420
SK 3 : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang Berkualitas		
KRO : Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
RO : Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
RO : Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000

SK 4 : Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas

KRO : Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
RO : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
RO : Rekomendasi Kebijakan dalam Peningkatan Kontribusi UMKM terhadap PDB	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000

SK 5: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas

KRO : Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
RO : Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.250.000
RO : Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	1 Rekomendasi Kebijakan	1.250.000

SK6 : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

KRO: Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 rekomendasi kebijakan	395.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	1 rekomendasi kebijakan	395.000
KRO: Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 rekomendasi kebijakan	1.105.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1 rekomendasi kebijakan	1.105.000

Rencana Kerja tahun 2022 sesuai dengan dokumen Renja 2022 antara lain :

1. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja melalui Koordinasi Penyusunan Kerangka Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dan *Project Management Office* (PMO) Pengembangan Ekonomi Digital, dan identifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait ekonomi digital dan transformasi digital.
2. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputy Serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal maka dilakukan rencana kerja melalui dukungan layanan administrasi terhadap semua kegiatan di lingkungan Kedeputan IV.
3. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja melalui (i) Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha; (ii) Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan Produk/Komoditas Berorientasi Ekspor; (iii) Penguatan Ekosistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kolaborasi *Multistakeholder* dan Kemitraan Usaha dalam Rantai Nilai Bisnis; dan (iv) Implementasi Kebijakan Terkait Inkubasi Wirausah





3. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja melalui (i) Sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (*Factory Sharing/FS*) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, (ii) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 dengan K/L terkait, (iii) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi Penguatan Koperasi, (iv) Koordinasi program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi, (v) Koordinasi dan monitoring implementasi PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, (vi) Koordinasi dan monitoring implementasi PP No. 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (mengikuti perkembangan perubahan UU Cipta Kerja), serta (vii) penguatan koordinasi dan sinergitas Program K/L Bidang UMKM (27 K/L) Tahun 2022-2023.

5. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja melalui **(i) pelaksanaan Program Kartu Prakerja**, yaitu koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja Skema Semi Bansos dan penyusunan kebijakan serta regulasi Program Kartu Prakerja Skema Normal, dan **(ii) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis demand driven**, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian implementasi Revitalisasi

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis *demand driven*, pembentukan Tim Koordinasi Nasional Vokasi, serta penyusunan Strategi Nasional Vokasi.

6. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan maka dilakukan rencana kerja melalui Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan beserta aturan turunannya, Koordinasi kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Koordinasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Koordinasi Kebijakan Pengupahan, Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan, serta merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya



yang dikelolanya. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Penetapan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022, secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy IV Kemenko Perekonomian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Perspective: Stakeholder			
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas	IKU 1.1 Nilai Transaksi e-Commerce	430Rupiah
		IKU 1.2. Pertumbuhan wirausaha	3%
		IKU 1.3. Kontribusi UMKM Terhadap PDB	63%
		IKU 1.4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2.4Juta (Orang)
		IKU 1.5. Jumlah Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun	2.7Juta (Orang) s.d. 3Juta (Orang)
Perspective: Customer			
2.	Terwujudnya Program Kartu Pra Kerja yang Berkualitas	IKU 2.1. Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 s.d. 4
Perspective: Internal Business Process			
3.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif	IKU 3.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3 s.d. 4
		IKU 3.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm, Ketenagakerjaan, dan UMKM	75%
Perspective: Learning & Growth			
4.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik	IKU.4.1. Indeks Tata Kelola Kedeputian	3 s.d. 4

Dalam rangka mendukung tercapainya target pada masing-masing indikator kinerja, telah disusun Rencana Aksi Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Untuk mendukung peningkatan nilai transaksi e-commerce, rencana aksi dilaksanakan dengan Koordinasi terkait Pengumpulan Data E-commerce, Pelaksanaan Kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Pelaku Usaha/ Asosiasi, Identifikasi Isu/ Permasalahan Kebijakan terkait E-commerce dan Digitalisasi Sentra UMKM/IKM dan serta Koordinasi Kebijakan E-Commerce di tingkat Internasional.
2. Untuk mendukung pertumbuhan wirausaha, rencana aksi dilaksanakan dengan: Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan mengenai inkubasi wirausaha; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Monitoring kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN); Program Kolaborasi *Multistakeholder* dan Kemitraan Usaha dalam Rantai Nilai Bisnis; serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan Produk/Komoditas Berorientasi Ekspor.
3. Untuk mendukung kontribusi UMKM terhadap PDB, rencana aksi dilaksanakan dengan Sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (*Factory Sharing/FS*) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 guna mendukung pengukuran data kontribusi UMKM terhadap PDB agar akurat, relevan, dan tepat waktu.
4. Untuk mendukung jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun, rencana aksi dilaksanakan dengan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Semi Bansos dan *pilot project* skema normal, evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja skema semi bansos dan *pilot project* skema normal, peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja, dan penyusunan kebijakan dan regulasi persiapan Program Kartu Prakerja skema normal.

5. Untuk mendukung penyediaan lapangan kerja per tahun, rencana aksi dilaksanakan melalui percepatan pembukaan penempatan pekerja Migran Indonesia, Perluasan Kesempatan Kerja,



Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan Beserta Aturan Turunannya, dan Percepatan Penyelesaian Perbaikan UU Cipta Kerja.

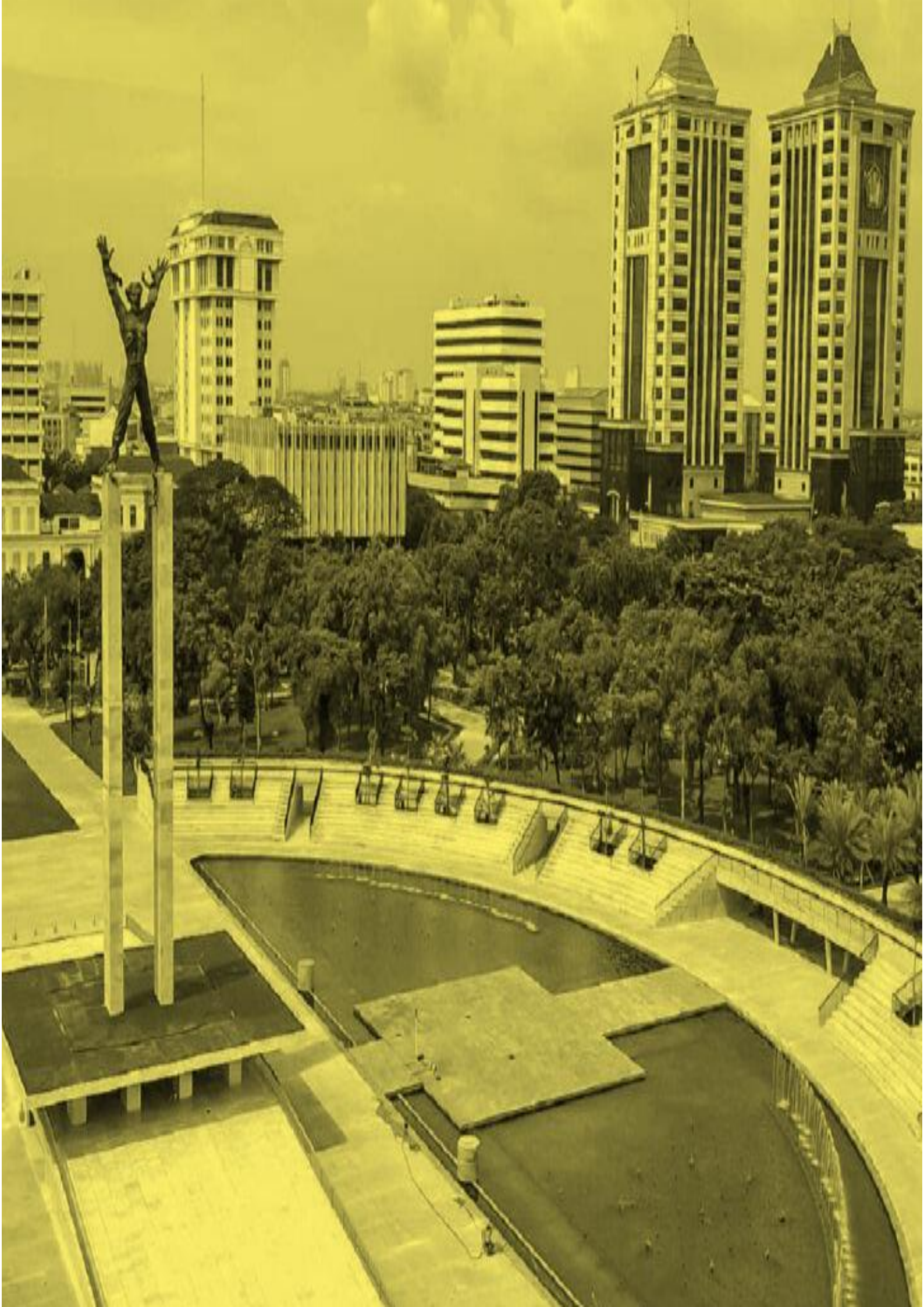
6. Untuk mendukung indeks kepuasan penerima manfaat terhadap Program Kartu Prakerja, rencana aksi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi pelaksanaan survei penerima Kartu Prakerja, pelaporan dan evaluasi hasil survei penerima Kartu Prakerja dan evaluasi hasil survei Program Kartu Prakerja oleh BPS (survei Sakernas Februari dan Agustus 2022).
7. Untuk mendukung Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, rencana aksi dilaksanakan dengan Koordinasi penyusunan kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, serta pelaksanaan survei Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
8. Untuk mendukung Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, rencana aksi dilaksanakan dengan penyusunan dan finalisasi policy brief

9. Untuk mendukung Indeks Tata Kelola Kedeputan, rencana aksi dilaksanakan dengan Monitoring Indeks Profesionalitas ASN Deputy IV, Penyusunan Perjanjian Kinerja dan IKU Tahun 2022, Capacity Building Deputy IV, Dialog Kinerja Deputy IV, Penyusunan Rencana Aksi RB Deputy IV Tahun 2022, serta Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Deputy VI Tahun 2022.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Deputy IV Tahun 2022

RENCANA AKSI PERJANJIAN KIJERJA TAHUN 2022								
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH								
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
Perspective: Stakeholder								
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas	IKU 1.1 Nilai Transaksi e-Commerce	430 Rupiah	1. Koordinasi Kebijakan atau Regulasi di bidang e-commerce	1. FGD, rapat koordinasi, terkait pengumpulan data e-commerce; 2. Identifikasi isu/permasalahan kebijakan terkait e-commerce dan digitalisasi sentra UMK/IKM (ekosistem digital dan transformasi digital); 3. FGD, rapat koordinasi, kebijakan ekosistem ekonomi digital (literasi dan inovasi) dan transformasi digital (sektor private), termasuk e-commerce di tingkat internasional.	1. FGD, rapat koordinasi, dan monitoring pengumpulan data e-commerce; 2. Rapat koordinasi perkembangan kebijakan ekosistem ekonomi digital (literasi dan inovasi) dan transformasi digital (sektor private) di tingkat regional dan internasional	1. FGD, rapat koordinasi, dan monitoring pengumpulan data e-commerce; 2. Rapat koordinasi dan monitoring perkembangan kebijakan ekosistem ekonomi digital (literasi dan inovasi) dan transformasi digital (sektor private) di tingkat regional dan internasional	1. Rapat koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pengumpulan data e-commerce; 2. Penyusunan rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan terkait ekosistem digital (literasi dan inovasi) dan transformasi digital (sektor private).
		IKU 1.2. Pertumbuhan wirausaha	3 %	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha	1. FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi 2. Identifikasi isu/permasalahan kebijakan 3. Pengumpulan data	1. FGD, rapat koordinasi dan monitoring evaluasi 2. Analisis kebijakan terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha	1. FGD, rapat koordinasi dan monitoring evaluasi 2. Analisis kebijakan terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha	1. FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi 2. Penyusunan rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
		IKU 1.3. Kontribusi UMKM Terhadap PDB	63 %	1. Koordinasi dan Sinergi Program Pengembangan UMKM melalui Pendekatan Klaster 2. Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022	1. Rapat Koordinasi Sinergi Pengembangan Program Klaster UMKM 2. Rapat Monitoring perkembangan dan Perbaikan/ Penyempurnaan Program 3. Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022	1. Implementasi program pembinaan dari K/L dan Pemda ke Klaster UMKM 2. Rapat Monitoring perkembangan dan Perbaikan/ Penyempurnaan Program 3. Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022	1. Implementasi program pembinaan dari K/L dan Pemda ke Klaster UMKM 2. Rapat Monitoring perkembangan dan Perbaikan/ Penyempurnaan Program 3. Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022	1. Evaluasi program dan tindak lanjut 2. Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022
		IKU 1.4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2.4 Juta (Orang)	Pelaksanaan program kartu prakerja skema semi bansos dan transisi program dari skema semi bansos ke skema normal	1. Pelaksanaan program kartu prakerja skema semi bansos 2. Penyiapan revisi regulasi berupa Perpres dan Permenko terkait persiapan pelaksanaan skema normal dan sesuai rekomendasi masukan BPK	1. Pelaksanaan program kartu prakerja skema semi bansos 2. Persiapan pelaksanaan program kartu prakerja skema normal 3. Pematangan proses kemitraan dengan lembaga pelatihan dan stakeholder terkait (tambahin ekosistem prakerja) fokus program prakerja dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi (skema normal) 4. Pemantapan (dicek) kesiapan Lembaga Pelatihan, Platform Digital, (ekosistem)	1. Pelaksanaan program kartu prakerja skema normal	1. Evaluasi efektivitas proses pelaksanaan program kartu prakerja skema normal
Perspective: Customer								

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
6.	Terwujudnya Program Kartu Pra Kerja yang Berkualitas	IKU 2.1. Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 s.d. 4	Evaluasi dan tindak lanjut hasil survey program kartu prakerja	1. Evaluasi dengan Manajemen Pelaksana terkait hasil survey Penerima Kartu Prakerja Tahun 2021 2. Penyusunan Daftar Pertanyaan Survey yang akan diberikan kepada Penerima Kartu Prakerja tahun 2022 3. Finalisasi Penyusunan Daftar Pertanyaan Survey 4. Pelaksanaan Survey Evaluasi oleh Manajemen Pelaksana	1. Pelaksanaan Survey Evaluasi oleh Manajemen Pelaksana 2. Evaluasi dampak program kartu prakerja berdasarkan hasil survey	1. Pelaksanaan Survey Evaluasi oleh Manajemen Pelaksana 2. Evaluasi dampak program kartu prakerja berdasarkan hasil survey	1. Pelaksanaan Survey Evaluasi oleh Manajemen Pelaksana 2. Evaluasi dampak program kartu prakerja berdasarkan hasil survey 3. Tindak lanjut hasil survey evaluasi yang telah dilaksanakan di tahun 2022
Perspective: Internal Business Process								
7.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif	IKU 3.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3 s.d. 4	1. Koordinasi penyusunan kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM 2. Monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	1. Koordinasi penyusunan kebijakan 2. Monitoring dan evaluasi kebijakan 3. Melakukan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan	1. Koordinasi penyusunan kebijakan 2. Monitoring dan evaluasi kebijakan 3. Melakukan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan	1. Koordinasi penyusunan kebijakan 2. Monitoring dan evaluasi kebijakan 3. Melakukan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan	1. Koordinasi penyusunan kebijakan 2. Monitoring dan evaluasi kebijakan 3. Melakukan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan
		IKU 3.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm, Ketenagakerjaan, dan UMKM	75 %	1. Penyusunan policy brief	1. Penyusunan policy brief	1. Penyusunan policy brief	1. Penyusunan policy brief	1. Finalisasi Penyusunan policy brief
Perspective: Learning & Growth								
9.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik	IKU 4.1. Indeks Tata Kelola Kedeputian	3 s.d. 4	1. Monitoring Indeks Profesionalitas ASN Deputi IV 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan IKU Tahun 2022 3. Capacity Building Deputi IV 4. Dialog Kinerja Deputi IV 5. Penyusunan Rencana Aksi RB Deputi IV Tahun 2022 6. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Deputi VI Tahun 2022	1. Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Deputi IV Tahun 2022 2. Diskusi kebutuhan Pelatihan Deputi IV Tahun 2022 3. Dialog Kinerja Deputi IV 4. Rapat Penyusunan LAKIP 2021 5. Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB Deputi IV Tahun 2022 6. Rapat Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Deputi IV Tahun 2022	1. Capacity Building Deputi IV 2. Rapat Evaluasi Renstra Deputi Tahun 2020-2024 3. Rapat Internal Tim RB dan Agen Perubahan Deputi IV 4. Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Deputi IV	1. Rapat Evaluasi Indeks Kualitas ASN Deputi IV 2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan RB Deputi IV Tahun 2022 3. Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Deputi IV Tahun 2022	1. Rapat Kerja Tahunan Deputi IV 2. Rapat Evaluasi pelaksanaan Pelatihan Tahun 2022 3. Rapat Internal Tim RB dan Agen Perubahan 4. Rapat Penyusunan Narasi Capaian Tahun 2022 5. Rapat Penyusunan Renja Deputi IV Tahun 2023 6. Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Deputi IV Tahun 2022



BAB

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Pengukuran Kinerja

Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi Penetapan Kinerja melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja, pengumpulan data kinerja, Pengukuran Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara periodik. Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan, dan monitoring atas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja secara terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi), di laman situs <http://2021.kinerja.ekon.go.id>.

Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan pada awal tahun, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran strategis dari unit kerja. Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh nilai capaian NKO, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Status capaian NKO

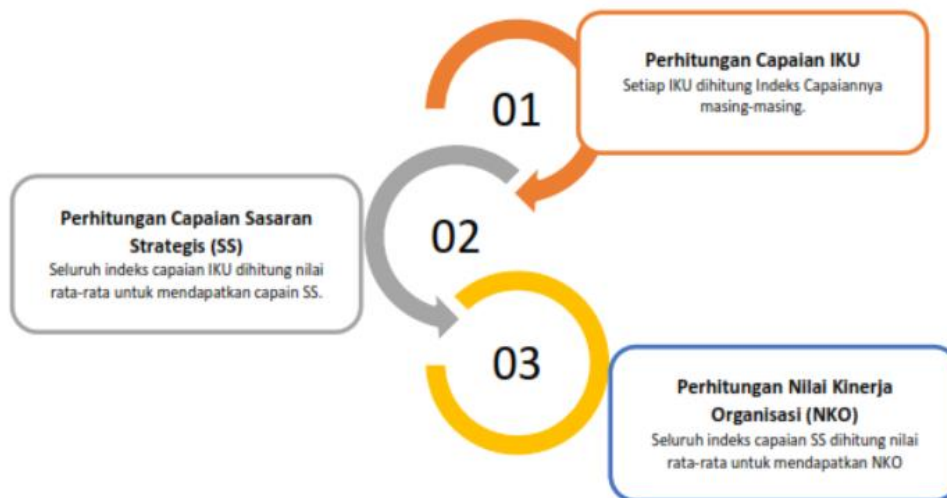


Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Perspektif, adapun Nilai Persepektif merupakan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS). Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan konsolidasi dari seluruh Capaian IKU dalam sasaran tersebut. NKO digunakan untuk menilai kinerja pada seluruh tingkatan unit kerja. Dengan kata lain, perhitungan NKO mengacu pada nilai capaian Perspektif, yang dihitung berdasarkan Capaian NSS. Capaian NSS dihitung berdasarkan Capaian IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, komponen perhitungan NKO terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Capaian IKU;
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS);
3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini.

Gambar 3.2 Proses Penghitungan NKO



Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi kinerja, sesuai rumusan pada manual IKU masing-masing. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n.a.), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, harus disertakan alasan atas kondisi tersebut. Selanjutnya, capaian IKU dilakukan indeksasi capaian IKU, yaitu dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii) Polarisasi Stabilize, yaitu kriteria nilai terbaik

pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU tersebut, maka dapat diperoleh konsolidasi dari seluruh IKU dalam ukuran Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NSS adalah dengan menghitung nilai rata-rata Capaian IKU dalam sasaran strategis yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat IKU yang tidak memiliki nilai (n/a), maka IKU tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan NSS. Perhitungan NKO dilakukan berdasarkan konsolidasi seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS) dari sebuah unit organisasi.

Formulasi Penghitungan Indeks Capaian IKU

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indeks Capaian IKU

	$IKU \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi
	$80\% \leq IKU < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
	$IKU < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu:

(1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh: Persentase Pertumbuhan Ekonomi.

Gambar 3.3 Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dan dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Apabila IKU dengan polarisasi maximize memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

(2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh: Persentase Jumlah Temuan Pemeriksaan

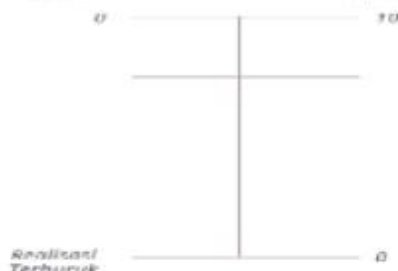
Gambar 3.4 Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan skala konversi sebagai berikut:

Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$


(3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau Semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik.

Contoh:

Persentase deviasi asumsi makro ekonomi. Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi stabilize adalah:

Jika realisasi < lower target maka digunakan rumus:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Lower Target}}$$

Jika realisasi > upper target maka digunakan rumus:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{(2 - (\text{Realisasi} \times 100\%))}{\text{Upper Target}}$$

Jika Lower Target ≤ Realisasi ≤ Upper Target maka capaiannya 100%.

Penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai hasil konsolidasi dari rata-rata seluruh IKU di dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Capaian kinerja Sasaran Strategis (NSS) ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, berdasarkan nilai capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Capaian Kinerja NSS

	Hijau	$NSS \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi
	Kuning	$80\% \leq NSS < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Merah	$NSS < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022, dari 4 (empat) Sasaran Strategis pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, seluruh atau 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) bersifat maximize. Pengukuran atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut.

Tabel 3.3 Pengukuran IKU Deputy IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sifat / Bobot
Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas	1.1. Nilai Transaksi e-Commerce	430 T	Maximize
	1.2. Pertumbuhan Wirausaha	3 %	Maximize
	1.3. Kontribusi UMKM Terhadap PDB	63%	Maximize
	1.4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2,4 Juta (orang)	Maximize
	1.5. Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	2,7 Ribu (orang)	Maximize

Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat	2.1. Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	Maximize
Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif	3.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3 dari 4	Maximize
	3.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	75	Maximize
Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik	4.1. Indeks Tata Kelola Kedeputan	3 dari 4	Maximize

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022

Penilaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di tahun 2022. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2022 adalah sebesar 100%, dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”.



Hasil Sasaran Strategis dan pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2022 dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian IKU (%)	Capaian NSS (%)
I	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.					
1.1	Indikator 1.1 Nilai transaksi e-Commerce	Triliun Rupiah	430	476,3	110,77	110,77
1.2	Indikator 1.2 Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	3	3,04	101,3	101,3
1.3	Indikator 1.3 Kontribusi UMKM Terhadap PDB	Persentase	63	62	98,41	98,41
1.4	Indikator 1.4 Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun	Juta Orang	2,4	4,98	120	120
1.5	Indikator 1.5 Jumlah Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	Ribu Orang	2,7	4,25	120	120
II	Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat					
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	Indeks	3 dari 4	3	100	100
III	Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Indeks	3 dari 4	3	100	100
3.2	Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Persentase	75	100	120	120
	Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Tata Kelola Kedeputan	Indeks	3 dari 4	3	100	100

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2022	100 %
---	-------

Analisis Capaian Kinerja

SS. 1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.

IKU 1.1 Nilai Transaksi Ecommerce

Nilai transaksi e-commerce merupakan nilai dari transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan internet atau platform e-commerce dengan target tiap tahunnya mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024. Transaksi e-commerce meliputi penjualan atau pembelian barang atau jasa, baik antara bisnis, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik atau swasta lainnya, yang dilakukan melalui jaringan internet. Dengan meningkatnya nilai transaksi e-commerce membuktikan bahwa kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital mampu memberikan dampak positif sebagai pendukung kemudahan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, serta peningkatan produk/jasa usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Data nilai transaksi e-commerce dapat menjadi dasar penyusunan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang secara tidak langsung mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang kondusif sehingga mampu mendorong peningkatan nilai transaksi e-commerce. Data mengenai e-commerce yang komprehensif dan up to date sangat diperlukan pemerintah agar perumusan kebijakan yang diambil tepat sasaran. Selanjutnya, metode pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai transaksi e-commerce yang digunakan adalah persentase data realisasi nilai transaksi e-commerce terhadap target sasaran tahunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (RPJMN). Adapun

data realisasi nilai transaksi *e-commerce* saat ini berasal dari data Triwulanan Bank Indonesia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada tahun 2022, realisasi nilai transaksi *e-commerce* adalah sebesar Rp 476,3 Triliun atau mencapai 110,77% dari target tahun 2022 yang sebesar Rp430 Triliun. Adapun secara rinci capaian realisasi tersebut sebagaimana tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1 Nilai Transaksi <i>E-commerce</i>	Triliun Rupiah	430	476,3	110,77%

Proses pengumpulan data nilai transaksi *e-commerce* tersebut dilakukan melalui fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dengan Bank Indonesia. Hingga saat ini, data atau nilai agregat *e-commerce* yang dihasilkan oleh Bank Indonesia diperoleh dari 4 (empat) pelaku pasar *e-commerce*, yaitu: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli. Database nilai transaksi *e-commerce* tersebut kemudian dilakukan proses analisis lebih lanjut sehingga diperoleh informasi atau gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.

Dalam rangka mendapatkan data dengan cakupan yang lebih luas, Kemenko Perekonomian berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait dengan penyusunan peraturan BPS tentang Penyampaian Data dan

Informasi PMSE. Peraturan tersebut merupakan amanat Pasal 21 ayat (1) poin (f) dan Pasal 21 ayat (3) dalam PP 80/2019 tentang PMSE. Adapun rekomendasi dalam peningkatan nilai transaksi e-commerce untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas adalah sebagai berikut:

- Koordinasi terkait pengumpulan data e-commerce;
- Pelaksanaan kerja sama Kemenko Perekonomian dengan pelaku usaha dan asosiasi untuk mendorong transaksi e-commerce;
- Identifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait e-commerce dan digitalisasi sentra UKM/ IKM; dan
- Koordinasi kebijakan ekosistem ekonomi digital dan transformasi digital, termasuk e-commerce di tingkat internasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi

Beberapa rapat koordinasi telah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan nilai transaksi e-commerce yang telah terlaksana hingga akhir Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1.	Koordinasi terkait pengumpulan data e-commerce	Terlaksana	• Terselenggaranya Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 kolaborasi dengan Bank Indonesia pada tanggal 11 - 15 Juli 2022; • Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perekaman Data Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada tanggal 19 September 2022; • Terselenggaranya Rapat Koordinasi dengan K/L serta Uji Publik Peraturan terkait PMSE pada tanggal 10 - 11 November 2022; • Terselenggaranya High Level Meeting Harmonisasi Rancangan Peraturan BPS

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			tentang Penyampaian Data dan Informasi oleh Pelaku Usaha PMSE pada tanggal 28 November 2022; • Terselenggaranya Evaluasi survei e-commerce 2022 pada tanggal 30 November - 1 Desember 2022.
2.	Kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Pelaku Usaha/ Asosiasi	Terlaksana	• Terselenggaranya Diskusi MoU Kemenko Perekonomian dan Microsoft pada tanggal 11 Januari 2022; • Terselenggaranya Diskusi Penyusunan MoU Kemenko Perekonomian dan Microsoft pada 10 Februari, 23 Februari 2022; • Terselenggaranya Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dan <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i> antara Kemenko Perekonomian dan Microsoft pada tanggal 15 Juni 2022; • Terselenggaranya <i>Trainer of Trainers</i> sebagai bagian dari program <i>Skills for Jobs</i> Indonesia bekerjasama dengan Microsoft dan Biji-Biji Initiative dengan jumlah partisipan sebanyak 385 trainers dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 30 November 2022; • Terselenggaranya Diskusi kerjasama Kemenko Perekonomian Microsoft Skill for Jobs yang akan berkolaborasi dengan Kemenperin, Kemenaker, dan PMO Pra Kerja pada tanggal 1 Desember 2022.
3	Identifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait e-commerce dan digitalisasi sentra UKM/ IKM	Terlaksana	• Terselenggaranya Koordinasi dengan Platform Shipper dalam rangka rencana pelatihan digitalisasi UMKM pada tanggal 2 Maret 2022; • Terselenggaranya Diskusi Optimalisasi dan Peningkatan Peran PLUT dalam mendorong akselerasi pengembangan potensi ekonomi digital dan produk UMKM/IKM di daerah pada tanggal 16 Maret 2022;

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			• Terselenggaranya Diskusi dengan AFTECH dalam rangka sosialisasi keuangan digital bagi UMKM daerah pada tanggal 18 April 2022; • Terselenggaranya Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha di PLUT KUMKM di Bali pada tanggal 30 Juni 2022; • Terselenggaranya Pelatihan “Akselerasi Penguatan Ekosistem Digital UMKM Berbasis PLUT di Kabupaten Kuningan” pada tanggal 10 Agustus 2022; • Terselenggaranya Pelatihan “Adopsi Digital Tools Untuk Akselerasi Pengembangan UMKM di Kota Magelang” pada tanggal 23 September 2022; • Terselenggaranya Diskusi dengan Snack Video dalam rangka rencana kolaborasi pelatihan digitalisasi UMKM pada 10 Oktober 2022; • Terselenggaranya Pelatihan “Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital dalam Akselerasi Pengembangan UMKM Kota Surakarta” pada tanggal 27 – 28 November 2022.
4	Koordinasi Kebijakan E-Commerce di tingkat Internasional	Terlaksana	• Terselenggaranya Rapat Persiapan Asean Coordinating Committee on E-Commerce (ACCEC) bersama K/L terkait pada tanggal 31 Januari 2022; • Terselenggaranya Rapat persiapan pertemuan 21st ACCEC pada tanggal 14 Juni 2022; • Terselenggaranya Pertemuan ACCEC ke 21 pada tanggal 28 Juni - 1 Juli 2022; • Terselenggaranya Rapat Persiapan Chairmanship Indonesia di ASEAN Tahun

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			2023 Pilar Ekonomi yang telah dilaksanakan pada 24 Agustus 2022; - Terselenggaranya Rapat Koordinasi internal Indonesia dalam penyusunan concept note atas PED di bawah koordinasi ASEAN Coordinating Committee on E-Commerce and Digital Economy (ACCED) pada tanggal 17 Oktober 2022; - Terselenggaranya Rapat Setnas ASEAN dan rapat persiapan logistik pertemuan ASEAN dengan Kemenlu sebagai focal point ASEAN di Indonesia pada tanggal 21 Desember 2022

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

Realisasi nilai transaksi e-commerce pada tahun 2022 mencapai 110,77 % dari target tahun 2022 sebesar Rp 430 Triliun. Adapun secara rinci capaian realisasi capaian tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja Utama : IKU-1 Nilai Transaksi E-Commerce				
Tahun	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2020	Triliun Rupiah	260	266	102,3 %
2021		345	401	116 %
2022		430	476,3	110,77
2024		600		79,4 %

Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

E-commerce merupakan salah satu sektor penopang utama ekonomi digital Indonesia. Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2022), nilai penjualan bruto atau gross merchandise value (GMV) lokapasar daring (e-commerce) Indonesia ditaksir mencapai US\$59 miliar atau Rp916,31 triliun pada 2022 atau 45% dari seluruh kawasan ASEAN. Nilai tersebut tumbuh 22% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar US\$48 miliar. Adapun proyeksi nilai GMV e-commerce negara ASEAN lainnya: Thailand US\$22 miliar, Malaysia US\$14 miliar, Vietnam US\$14 miliar, Filipina US\$14 miliar, dan Singapura US\$8,2 miliar.

Data transaksi e-commerce menjadi sangat penting dengan urgensi dan manfaat diperoleh. Gambaran transaksi e-commerce secara luas dan menyeluruh dapat digunakan dalam rangka pembuatan kebijakan, monitoring dan evaluasi. Melalui kebijakan yang tepat pemerintah dapat mengakselerasi sektor e-commerce terus bertumbuh sesuai dengan yang diproyeksikan laporan terkait.

Program Crosscutting dengan Kedeputan Lainnya/ atau Kementerian/Lembaga Lainnya

1. Pelatihan digital skilling

Merupakan salah satu inisiatif program implementasi MoU antara Kemenko Perekonomian dan Microsoft. Kegiatan pelatihan digital skilling berkolaborasi dengan PMO Kartu Prakerja, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian. Materi tema pelatihan yang diberikan meliputi: *Project Management*, *Analytical Skills*, dan *Business Administration*.

Melalui program pelatihan talenta digital yang disediakan, maka diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan talenta digital di dunia usaha dan dunia industri, termasuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan literasi secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

2. Digitalisasi Sentra UMK/IKM

Dalam rangka mendorong distribusi manfaat yang inklusif dari pengembangan ekosistem digital secara masif, dilakukan inisiatif percepatan digitalisasi UKM/IKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang perlu ditingkatkan daya saingnya. Deputi IV berkolaborasi dengan KemenkopUKM, Asosiasi dan platform digital melalui kegiatan untuk mendorong akselerasi percepatan transformasi UMKM ke dalam ekosistem digital dan adopsi teknologi digital secara lebih komprehensif melalui optimalisasi peran PLUT-KUMKM. Diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor ekonomi, khususnya UKM/IKM yang dapat berdampak tumbuhnya transaksi pada platform e-commerce.

3. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)

Presiden telah menetapkan Kepres 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Tujuannya mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, khususnya mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna peningkatan PAD. Keanggotaan Satgas P2DD terdiri dari Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian PANRB, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Kendala dalam penyusunan Perka BPS tentang pengumpulan data e-commerce yaitu belum adanya kesepakatan final bersama antara Kementerian/ Lembaga dengan platform khususnya terkait dengan rancangan peraturannya, periode penyampaian data, dan waktu *grace period* penetapan Rancangan Peraturan BPS.

2. Belum adanya perjanjian kerjasama antara BPS dengan pihak *marketplace* atau yang menjadi subjek pengumpulan data e-commerce, khususnya terkait dengan teknis pelaksanaannya.
3. Banyaknya pelaksanaan program/kegiatan digitalisasi UMKM/IKM yang berjalan sendiri secara parsial, belum didasari oleh adanya skema/standar dan objectives yang spesifik, sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih program/kegiatan.
4. Pengelolaan isu terkait ekonomi digital sangat dinamis, tidak jarang belum dipahami secara utuh dan cenderung mendapatkan respon yang pragmatis. Hal ini juga mendasarinya adalah karena minimnya payung kebijakan.
5. Belum adanya kelembagaan (Pokja/Komite) lintas sektor yang menjadi payung dan forum dalam pelaksanaan dukungan kebijakan serta debottlenecking terkait percepatan ekonomi digital termasuk digitalisasi UMKM/IKM.
6. Masih terdapat gap kesiapan regulasi e-commerce Indonesia dengan negara lain.
7. Terdapat kesenjangan kemampuan literasi digital antar daerah di Indonesia.
8. Maraknya isu terkait digital trade, dimana Indonesia belum memiliki regulasi terkait isu ini.
9. Ketertinggalan kapasitas maupun regulasi mengenai ekonomi digital, kerap kali menyebabkan Indonesia cenderung berposisi defensif di dalam perundingan internasional.
10. Kebutuhan akan program capacity building terkait isu-isu digital trade, perundingan internasional, dan e-commerce.

Sedangkan beberapa Analisa penyebab keberhasilan antara lain :

1. Pandemi menyebabkan terjadinya percepatan transformasi digital masyarakat akibat adanya pembatasan sosial sehingga layanan

elektronik termasuk perdagangan melalui sistem elektronik/ *e-commerce* meningkat pesat.

2. Terlaksananya kerjasama pemerintah dengan pihak swasta/ dan asosiasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan literasi digital misalnya terkait pemanfaatan layanan keuangan digital yang juga menjadi bagian dari *e-commerce*.
3. Terlaksananya koordinasi kebijakan ekonomi digital/ *e-commerce* yang baik di tingkat internasional.
4. Adanya koordinasi yang baik pemerintah antar K/L untuk mendorong UMKM/IKM agar dapat melakukan onboarding ke *e-commerce* selama pandemi.
5. Terciptanya ekosistem digital pengembangan regulasi dalam hal ini terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang dapat dipercaya sehingga mendapatkan trust dari masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program kegiatan dalam rangka mendukung pemenuhan target nilai transaksi *e-commerce* sampai dengan Desember 2022 yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi terkait pengumpulan data *e-commerce*

Sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), BPS merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengumpulan data *e-commerce*. Pengaturan kewajiban pengumpulan data dalam PP No. 80 terdapat pada dua pasal yaitu Pasal (21) dan Pasal (79). Sebagai tindak lanjut, BPS telah membentuk Tim untuk menyusun Perka BPS tentang Penyampaian Data dan Informasi oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Hingga saat ini, proses penyusunan Rancangan Perka BPS tersebut juga telah melewati jaring masukan kepada Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi dan pelaku PMSE. Cakupan pelaku usaha PMSE, yaitu E-retail, dan platform yang memfasilitasi transaksi (*marketplace*, *classified*, dan *ride hailing*). Beberapa hasil kesepakatan hingga akhir Desember 2022 yaitu:

- Aspek legal yaitu cakupan pelaku usaha PMSE yang wajib menyampaikan data dan informasi ke BPS yaitu PPMSE dalam negeri dan luar negeri. Penyampaian secara berkala (triwulan) serta BPS akan menyampaikan data secara agregat dan mekanisme berbagi-pakai data menggunakan *Letter of Agreement of Data Usage* (LADU).
- Aspek Kebutuhan Data Peraturan BPS, cakupan klasifikasi pelaku PMSE yaitu platform yang memfasilitasi transaksi (*marketplace*, *classified*, dan *ride hailing*) serta e-retail. Skema bisnis yang dicakup B2B, B2C, dan C2C. Variabel yang dicakup: identitas; tenaga kerja; pendapatan dan pengeluaran; nilai dan volume transaksi (menurut wilayah, produk, metode pembayaran); informasi visit, *buyer*, dan *seller* (menurut wilayah, produk, metode pembayaran); dan informasi lainnya.
- Infrastruktur dalam Penyampaian Data PMSE menggunakan Data Center BPS dan telah berkerjasama dengan BSSN.

BPS juga telah menerbitkan Statistik E-Commerce 2022 yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai e-commerce yang belum terakomodir dalam Rancangan Perka BPS yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Cakupan Survei E-Commerce 2022 adalah usaha yang menggunakan internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan barang dan/atau jasa selama tahun 2021. Hasil pendataan menunjukkan banyak pelaku usaha E-Commerce merupakan usaha E-Commerce non-formal yang salah satunya ditunjukkan dengan nilai pendapatan total maupun nilai pendapatan e-commerce di bawah Rp300 juta.

2. Kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Pelaku Usaha/ Asosiasi

Pada tanggal 15 Juni 2022 telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Microsoft dengan Kemenko Perekonomian. Tujuan MoU tersebut adalah untuk mendorong penguatan ekosistem dan transformasi ekonomi digital, terutama terkait inovasi teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), literasi digital, tata kelola data yang baik, akselerasi industri 4.0 di Indonesia, serta program inkubasi ekonomi digital.

Adapun tindak lanjut dari penandatanganan MoU tersebut adalah kegiatan pelatihan digital skilling melalui kolaborasi Microsoft dalam ekosistem pelatihan digital skilling yang dimiliki oleh K/L terkait. Bentuk kegiatannya meliputi: (i) Implementasi materi digital skilling di platform pembelajaran (Learning Management System/LMS) atau balai pelatihan digital pada kementerian/ lembaga; (ii) Kegiatan Training of Trainer (ToT) yang menargetkan sebanyak 500 individu yang akan diselenggarakan secara bertahap; dan (iii) Peserta ToT ini dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan digital skilling baik untuk internal kementerian/ lembaga atau masyarakat lebih luas dengan target sebanyak 1,000,000 peserta yang berasal dari atau diluar kementerian/Lembaga.

Hingga Desember 2022, Microsoft, dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, telah meluncurkan program Skills for Jobs Indonesia yakni program yang bertujuan memberikan literasi digital, keterampilan digital, dan persiapan kerja gratis kepada sedikitnya 1 (satu) juta masyarakat Indonesia sampai dengan tahun 2024 mendatang. Adapun dalam implementasinya didukung oleh Biji-Biji sebagai mitra pelaksana. Dengan meningkatnya literasi digital harapannya dapat mengakselerasi pertumbuhan perdagangan melalui sistem elektronik/ e-commerce.

3. Piloting Akselerasi Digitalisasi UMKM/IKM berbasis Sentra

Salah satu inisiatif yang berjalan adalah optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM (PLUT) untuk meningkatkan akselerasi pengembangan potensi ekonomi digital dan produk UKM/IKM di daerah. PLUT diproyeksikan dapat menjadi hub dalam proses literasi dan kapasitas

digitalisasi UKM/IKM sehingga dapat mendorong percepatan/ peningkatan usaha. Beberapa kegiatan yang telah terselenggara: (i) Terselenggaranya Pelatihan “Akselerasi Penguatan Ekosistem Digital UMKM Berbasis PLUT di Kabupaten Kuningan” pada tanggal 10 Agustus 2022; dan (ii) Terselenggaranya Pelatihan “Adopsi Digital Tools Untuk Akselerasi Pengembangan UMKM di Kota Magelang” pada tanggal 23 September 2022; dan (iii) Terselenggaranya Pelatihan “Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital dalam Akselerasi Pengembangan UMKM Kota Surakarta” pada tanggal 27 – 28 November 2022.

4. Kerja Sama Internasional terkait dengan E-commerce

Dalam upaya pengembangan e-commerce nasional, Kemenko Perekonomian juga turut serta aktif pada beberapa forum internasional. Hal ini dilandasi oleh masifnya perkembangan isu e-commerce hingga ekonomi digital pada ranah internasional. Luasnya ruang lingkup pembahasan kerja sama terkait e-commerce maupun ekonomi digital menyebabkan peran Kemenko Perekonomian menjadi sangat esensial yakni melakukan koordinasi maupun sinkronisasi dari seluruh stakeholders terkait, agar posisi Indonesia dapat sesuai dengan kepentingan nasional. Adapun berikut peran Kedeputan IV dalam berbagai forum internasional.

Persiapan keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023 telah menyepakati penyusunan PEDs Indonesia 2023 yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) *strategic thrust*, yakni 1) *Recovery-rebuilding*; 2) *Digital Economy*; dan 3) *Sustainability*. Salah satu PED pada *Strategic Thrust Digital Economy* adalah *Leaders Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework (DEFA)* yang di koordinasikan oleh *ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED)* dimana Kedeputan IV merupakan focal point untuk Indonesia.

SS. 1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.

IKU 1.2 Pertumbuhan Wirausaha

Pengembangan kebijakan kewirausahaan diarahkan kepada pengembangan dan penguatan ekosistem yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan wirausaha baru dan meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. Pertumbuhan wirausaha baru diharapkan mampu mendorong komposisi postur UMK yang seimbang, meningkatkan kontribusi pada PDB (Produk Domestik Bruto) serta mendorong penyerapan tenaga kerja. Besarnya potensi pertumbuhan wirausaha dalam perekonomian juga harus diiringi dengan peningkatan daya saing yang memadai untuk dapat bersaing secara global, terutama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Strategi mendorong pertumbuhan wirausaha baru dilaksanakan dengan mendorong sinergi pelaksanaan kebijakan terkait pemasyarakatan kewirausahaan, fasilitasi ide usaha melalui penyelenggaraan kompetisi, pelatihan, pendampingan, dan pemagangan, serta penguatan peran inkubator wirausaha dan akselerator usaha.

Pengembangan dan penguatan ekosistem kewirausahaan diarahkan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya belum didesain terintegrasi dengan pengembangan kewirausahaan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi lokal dan daerah. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak dilaksanakan baik oleh pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, maupun perguruan tinggi. Namun demikian tidak sedikit program yang dalam implementasinya kurang membawa dampak signifikan dan tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya intervensi yang tidak didesain berbasis pasar (*demand-driven*), kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang disasar, lemahnya pendampingan untuk menjamin kualitas dan kontinuitas produk,

pendekatan program yang parsial, dan belum optimalnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan *enabling environment*. Salah satu model dan pendekatan kewirausahaan yang dapat didorong untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat masyarakat adalah melalui pengembangan kewirausahaan sosial. Model kewirausahaan sosial serta implementasi ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi di daerah perlu dioptimalkan sebagai instrumen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Pertumbuhan Wirausaha merupakan tren peningkatan masyarakat yang menjalankan aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha diharapkan dapat mendorong kuantitas dan kualitas pelaku UMKM sehingga mendorong peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan Wirausaha Baru merupakan salah satu target yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Wirausaha pemula/baru merupakan wirausaha yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha mapan dan usahanya sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pengembangan wirausaha baru bertujuan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha baru agar mampu bertahan dan berkembang dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan, dengan memanfaatkan fasilitas inkubasi bisnis, pendampingan usaha, dan pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Mitra, Penyedia Layanan Teknis Pendampingan Usaha, dan Inkubator Bisnis.

Prosedur penciptaan wirausaha baru bertujuan untuk mendorong lahirnya wirausaha pemula yang berasal dari calon wirausaha yang potensial (seperti alumni pendidikan vokasi, alumni program kartu prakerja, dsb), serta meningkatkan kapasitas wirausaha pemula dengan memanfaatkan peran dari inkubasi bisnis, pendampingan usaha, dan pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Mitra, Penyedia Layanan Teknis Pendampingan Usaha, dan Inkubator Bisnis.



Hasil Kinerja

Hingga akhir Tahun 2022, IKU Pertumbuhan Wirausaha yang terealisasi berdasarkan Sakernas adalah sebesar 1,34 %, sehingga berdasarkan baseline 2019, maka tingkat pertumbuhan wirausaha hingga Desember 2022 adalah sebesar 3,04 %. Dengan target capaian tahun 2022 sebesar 3 %, maka capaian kinerja IKU Pertumbuhan Wirausaha mencapai 101,3 % dari target. Uraian di atas dijelaskan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Pertumbuhan Wirausaha	% (Persen)	3 %	3,04 *	101,3 *

Realisasi pertumbuhan wirausaha sebesar 1,34 % diperoleh dari formula capaian pertumbuhan wirausaha yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah wirausaha tahun } (n) - \text{jumlah wirausaha tahun } (n - 1)}{\text{jumlah wirausaha tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Dimana:

n = 2022
(n - 1) = 2021

Jumlah wirausaha diambil dari data jumlah tenaga kerja yang berusaha dibantu buruh tetap yang terdapat dalam Sakernas BPS - Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2022, jumlah wirausaha tahun 2022 adalah sebesar 4.108.027 orang, sedangkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 4.053.710 orang. Sehingga perhitungan untuk pertumbuhan wirausaha dapat dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$\frac{4.108.027 - 4.053.710}{4.053.710} \times 100\% = 1,34 \%$$

Berdasarkan *baseline* tahun 2019 yaitu 1,7 %, perhitungan capaian hingga Desember 2022 adalah sebagai berikut:

$$1,7 \% (\text{Baseline 2019}) + 1,34 \% (\text{capaian pertumbuhan wirausaha 2022}) = 3,04 \%$$

Berkaitan dengan capaian tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah melakukan beberapa upaya untuk pencapaian pertumbuhan wirausaha melalui rekomendasi Kebijakan Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha. Rekomendasi disampaikan dalam berbagai FGD/rapat koordinasi/monitoring evaluasi identifikasi isu/permasalahan kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan pengumpulan data terkait Capaian K/L terkait Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan Rencana Aksi Kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi

Selama Tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan secara umum bertujuan untuk monitoring implementasi pelaksanaan kebijakan dan program terkait iklim bisnis wirausaha. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi untuk mengawal implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan juga rakor untuk melaporkan capaian Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional, serta rakor-rakor lainnya. Capaian-capaian rinci hasil rakor-rakor tersebut dijelaskan dalam tabel di bawah:

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	Inisiatif Strategis: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha		

1	FGD, rapat koordinasi dan sinkronisasi, serta monitoring dan evaluasi	Terlaksana	• Rangkaian Rapat Koordinasi Evaluasi SISMONEV B-04 Tahun 2022 • Rangkaian Rapat Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional • Rangkaian Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional • Sosialisasi Perpres 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 • Pembahasan Finalisasi Dokumen Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda KwP • Rangkaian Rakor Implementasi Perpres 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 • Rakor dan Pelaporan Capaian Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan oleh Kemenkop UKM
---	---	------------	--

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
IKU-1.1 Pertumbuhan Wirausaha	% (Persen)	0,1 %	1,34 %	2,90 %

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan wirausaha pada tahun 2020. Namun, tahun 2022 menjadi momentum pemulihan ekonomi yang dapat dimanfaatkan Pemerintah salah satunya dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas wirausaha baru. Hal ini dapat terlihat dengan pertumbuhan wirausaha yang mulai bangkit yaitu sebesar 1,34 % dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 0,1 %.

Program Crosscutting dengan Kedeputan Lainnya atau Kementerian/Lembaga Lainnya

1. Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha.

Pelatihan ini merupakan kolaborasi antara Kemenko Perekonomian, Kemenkop UKM, dan BPJPH, serta 5 platform digital yang dilaksanakan di 6 lokasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM selama bulan Juni 2022. Program ini diikuti oleh $\pm$ 1000 UMK terkursi secara *offline* dan *online*.

Hasil dari pelatihan ini diantaranya telah terfasilitasi pendampingan *on boarding* dan sertifikasi halal bagi peserta. Pendampingan *on boarding* menjadi capaian bagi Kemenkop UKM, sedangkan bertambahnya UMK yang mendapat sertifikat halal menjadi capaian BPJPH.

Sebagai pasca-program, Kemenko Perekonomian memfasilitasi kolaborasi Kemenkop UKM dan BPJPH dalam melaksanakan Bimbingan Teknis Sertifikasi halal bagi 1344 konsultan pendamping PLUT KUMKM.

2. Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Telah diselenggarakan Rakor Implementasi Perpres 2/2022 yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan: Laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan nasional oleh Menteri Koperasi dan UKM kepada Presiden RI tetap mengacu pada target capaian kegiatan yang tercantum dalam Lampiran II Perpres 2/2022; Memuat rincian jumlah sasaran dan capaian target kegiatan 27 K/L yang tercantum dalam Lampiran II Perpres 2/2022, disertai kendala dalam implementasi.

Kemenkop UKM bersama Kemenko Perekonomian, Bappenas dan Setkab telah menyelenggarakan Rakor terkait progress Capaian Renaksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan capaian per tanggal 21 Desember sebanyak 392.837 wirausaha atau 80% dari target 490.313 wirausaha.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Produktivitas dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)

Telah dilakukan identifikasi program PPKE Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, dan Kemenaker di 212 kab/kota TA 2022, serta monitoring perkembangan dan pelaporan realisasi Tahun 2022. Selain itu, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan di daerah untuk melihat pelaksanaan program pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Swasta di daerah.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Percepatan Pengembangan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional (SIKNAS) dengan memanfaatkan Sistem Kewirausahaan (SIWIRA) untuk update data, sinkronisasi, mempercepat dan mempermudah akses terhadap informasi Kewirausahaan bagi semua Pemangku Kepentingan.
2. Dari 27 K/L yang masuk dalam Renaksi Perpres, yang sudah mengirimkan pelaporan capaian sebanyak 16 K/L, sedangkan 11 K/L belum mengirimkan laporan capaiannya, (Kominfo, ESDM, BKKBN, Kemenag, Kemendes, Kemenkes, Kemenkeu, Kemenpora, Kemensos, KemBUMN, dan KLHK).
3. Diperlukan penguatan dan pembagian peran K/L dan Pemda dalam implementasi program pengembangan kewirausahaan, serta kerjasama dengan industri dalam komersialisasi produk;
4. Perlunya akselerasi lembaga inkubator untuk mendaftar ke dalam Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi untuk pendataan, pengesahan, monitoring, evaluasi dan valuasi kinerja lembaga inkubator.
5. Pentingnya optimalisasi fungsi PLUT-KUMKM sebagai hub sinergi program K/L, Pemda, dan dunia usaha dalam pendampingan dan pemberdayaan koperasi, UMKM, dan wirausaha di daerah secara terpadu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun beberapa kegiatan yang mendukung Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterima Menko Perekonomian Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024)

Kemenko Perekonomian memfasilitasi rangkaian Rakor Implementasi Perpres 2 tahun 2022 dan Rakor Capaian Renaksi Pengembangan Kewirausahaan nasional bersama dengan beberapa K/L terkait. Selain itu, telah terlaksana beberapa piloting program kewirausahaan yaitu: (1) Seminar Nasional “Membangun Semangat Kewirausahaan Mahasiswa yang Inovatif dan Berdaya Saing” di Universitas Udayana; (2) Workshop “Mendorong Transformasi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan menjadi Wirausaha Baru yang Tangguh dan Berdaya Saing di Era Ekonomi Digital”.

2. Implementasi Kebijakan Terkait Inkubasi Wirausaha

Dalam rangka analisis kebijakan terkait Implementasi Kebijakan Terkait Inkubasi Wirausaha sebagai upaya optimalisasi peran lembaga inkubator secara lebih profesional dan berkualitas dalam menumbuhkan wirausaha baru, telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Kunjungan monitoring dan evaluasi ke beberapa Inkubator

3. Sinergi Program Pelatihan dan Pendampingan Usaha di PLUT-KUMKM

Terlaksana kolaborasi program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha antara Kemenko Perekonomian, Kemenkop UKM, dan BPJPH, serta dengan 5 platform digital di 6 lokasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM. Program ini diikuti oleh +1000 UMK terkursi secara offline dan online. Hasilnya telah terfasilitasi pendampingan on boarding dan sertifikasi halal bagi peserta. Selain itu, telah terfasilitasi kolaborasi Kemenkop UKM dan BPJPH dalam pelaksanaan Bimtek Sertifikasi Halal bagi 1344 konsultan pendamping PLUT KUMKM

SS. 1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.

IKU 1.3 Kontribusi UMKM Terhadap PDB

Kontribusi UMKM Terhadap PDB merupakan kontribusi nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Nasional sesuai dengan indikator atas sasaran penguatan kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi dalam RPJMN 2020-2024. Dukungan tercapainya kontribusi UMKM terhadap PDB melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan UMKM diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha dan berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB dapat diestimasi melalui perhitungan total nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi berskala UMKM dibanding terhadap total nilai Produk Domestik Bruto Nasional lalu dikalikan 100%. Sampai saat ini sumber data utama Kontribusi UMKM terhadap PDB diperoleh dari data Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan data KemenKUKM (2018), yang masih digunakan hingga tahun 2020, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta.

Kemenko Perekonomian khususnya Deputy IV memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan kebijakan guna memajukan dan meningkatkan daya saing UMKM. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Deputy IV telah melakukan kegiatan Mengkoordinasikan, mensinergikan, Monev, dan pengendalian terhadap: (i) Sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (*Factory Sharing/FS*) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem; dan (ii) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 dengan K/L terkait.

Melalui koordinasi dan sinergi tersebut akan didapatkan formulasi data dan informasi yang dapat digunakan sebagai landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan guna mendorong peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia.

Hasil Kinerja

Perhitungan kontribusi UMKM terhadap PDB dilakukan secara periodik tahunan. Hingga laporan ini disusun, perhitungan kontribusi UMKM dalam PDB nasional s.d Desember Tahun 2022 belum dirilis, sehingga realisasi dan capaian pada indikator persentase kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB dicantumkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Kemen KUKM yaitu data tahun 2019. Adapun target kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2022 sebesar 63% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 1.1. Kontribusi UMKM terhadap PDB*	Persentase	63%	62,36%*	98,98%

*) Keterangan: Data kontribusi UMKM terhadap PDB bersifat sementara, menunggu hasil perhitungan Kementerian Koperasi UKM dan BPS.

Data kontribusi UMKM terhadap PDB yang digunakan bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kami telah mengirim Surat Permohonan Data Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional tahun 2020 s.d 2022 kepada Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 9 Januari 2023. Informasi dari Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM, per 12 Januari 2023 data capaian target Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2020, 2021,

dan 2022 masih dalam proses perhitungan dan perumusan bersama dengan sejumlah *stakeholder*. Sehingga data capaian yang ditampilkan pada laporan ini masih mengacu pada data proyeksi Tahun 2021 dengan nilai persentase kontribusi 62,36% dan akan diperbarui apabila sudah ada informasi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Untuk mendorong tercapainya kontribusi UMKM terhadap PDB, pada triwulan berikutnya akan dilakukan langkah percepatan koordinasi, sinergi, *monitoring* dan evaluasi, serta pengendalian terhadap: (i) Sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (*Factory Sharing/FS*) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem; dan (ii) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 dengan K/L terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi

Realisasi output pencapaian IKU Kontribusi UMKM terhadap PDB sampai dengan Desember Tahun 2022 mencapai 100% dari target *output* IKU tahun 2022. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi *output* disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Rencana Aksi dari inisiatif strategis Koordinasi dan Sinergi Program Pengembangan UMKM melalui Pendekatan Klaster kedepannya dispesifikasi dengan nama rencana aksi "Sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (<i>Factory Sharing/FS</i>) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem"	Terlaksana dengan perubahan	- Selama tahun 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi melibatkan Bappenas, Kemenkop UKM, Pemda, dan/atau K/L terkait pada tanggal 23 Maret 2022, April 2022 (tanggal 11, 20 pagi, 20 siang, dan 21), 23 Mei 2022, dan Juni 2022 (tanggal 23 dan 28), 31 Agustus 2022, 26 Oktober 2022, dan 4 November 2022. - Telah dikompilasi hasil rapat koordinasi dan tinjauan lapangan terkait dalam matriks yang berisi inventarisasi berbagai tantangan, kebutuhan, serta pihak terkait yang dapat berperan dalam pengembangan FS. Matriks tersebut disampaikan kepada K/L dan Pemda terkait melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM No B/KWU.04/70/D.IV.M.EKON/07/200 tanggal 19 Juli 2022. - Kesimpulan dan rekomendasi dalam proses koordinasi antara lain: (i) Pada tahun 2022 telah terlaksana pembangunan FS beserta sarana prasarana pendukungnya di 3 lokus yaitu Kaltim (Biofarmaka), NTT (Sapi), dan Minahasa

			(Kelapa). Sementara lokus Sukoharjo dan Aceh mengundurkan diri; (ii) Bappenas telah mentagging Pengelolaan Terpadu UMKM 2023 di 5 Lokasi yaitu: Sumut (cabai merah), Kalsel (Karet), DIY (Susu), Bali (Kakao), Sulsel (Garam); (iii) program FS tahun 2023 mencakup penyiapan administrasi maupun kepastian lahan yang akan digunakan. Selain itu diperlukan komitmen K/L dan upaya untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dari sisi program maupun anggaran. Rakor dan komunikasi bersama K/L terkait terus dilakukan untuk mengurai berbagai kendala yang dihadapi di lokus MP.
2	Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022	Terlaksana	• Telah dilakukan Rapat koordinasi PEN Dukungan UMKM Tahun 2022 pada tanggal 8 dan 29 Juni 2022 serta 17 Oktober 2022. Selain itu, koordinasi secara rutin per-minggu, baik dengan tim KPC-PEN, Kemenkop UKM, dan Kemenkeu untuk mengetahui perkembangan stimulus PEN dukungan UMKM. • Capaian Stimulus PEN Dukungan UMKM Tahun 2022 yaitu: (i) Subsidi Bunga KUR sebesar Rp 23 Triliun atau 98,13%; (ii) Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp 1,66 Triliun atau 77,61%; dan (iii) Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) sebesar Rp 1,26 Triliun. • Telah terlaksana koordinasi pembahasan konsep program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM/Banpres Produktif) Tahun 2022 pada tanggal 24 Februari 2022 dan 1 Agustus 2022 dan telah diikuti pembahasan perkembangan penyusunan RPermenkop UKM perihal BPUM Tahun 2022 pada tanggal 8 Agustus 2022 bersama Kemenkop UKM, Kemenkeu, BPKP. Kemenkop UKM telah menyusun RPermenkop UKM yang telah diharmonisasi Kemenkumham dan disetujui Setkab, namun tetap menunggu DIPA dari Kemenkeu. Menkop UMKM telah mengirimkan surat pada tanggal 12 Oktober 2022 (Nomor B-150/M.KUKM/UM.00.01/X/2022) kepada Ketua Komite PCPEN (Bp. Menko Perekonomian).

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
IKU-1.1 1.1. Kontribusi UMKM terhadap PDB*	Persentase	62,36%*	62,36%*	65%

*) Keterangan: Data kontribusi UMKM terhadap PDB bersifat sementara, menunggu hasil perhitungan Kementerian Koperasi UKM dan BPS.

Pada tahun 2021, penggunaan data 62,36% berupa proyeksi target yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM pada laman <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-susun-6-indikator-strategis-adaptasi-dan-transformasi-kumkm> per 5 Januari 2021. Sementara pada Bulan Februari Tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM mempublikasikan Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan catatan bahwa data realisasi masih dalam proses perhitungan.

Data kontribusi UMKM terhadap PDB yang digunakan bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kemenko Perekonomian telah mengirim Surat Permohonan Data Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional tahun 2020 s.d 2022 kepada Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 9 Januari 2023. Informasi dari Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM, per 12 Januari 2023 data capaian target Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2020, 2021, dan 2022 masih dalam proses perhitungan dan perumusan bersama dengan sejumlah *stakeholder*. Sehingga data capaian yang ditampilkan pada laporan ini masih mengacu pada data proyeksi Tahun 2021 dengan nilai persentase kontribusi 62,36% dan akan diperbarui apabila sudah ada informasi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

Rata-rata Data Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2022 di berbagai negara belum dipublikasi. Merujuk pada *paper* yang berjudul *Road to Recovery: Post Pandemic Business Outlook in Southeast Asia* Tahun 2021, rata-rata kontribusi UMKM terhadap PDB pada negara-negara Asia Tenggara sebesar 40%. Bila berdasarkan data tahun 2021 juga, persentase kontribusi UMKM terhadap PDB negara lain diantaranya mencapai 34,6% di Thailand dan mencapai 27 % di India (Statista, 2022). Hal yang perlu digaris bawahi yaitu bahwa kriteria UMKM dan kondisinya di setiap negara berbeda, sehingga nilai kontribusi UMKM terhadap PDB secara langsung tidak dapat dibandingkan berdasarkan nilainya saja.

Program Crosscutting dengan Kedeputian Lainnya atau Kementerian/Lembaga Lainnya

Dalam pelaksanaan tugas, terdapat beberapa isu yang melibatkan Deputi dan/atau K/L Lain diantaranya:

1. Pengelolaan Terpadu UMKM

Pengelolaan Terpadu UMKM dilakukan untuk menindaklanjuti: (1) implementasi PP No 7/2021 terkait substansi Pengelolaan Terpadu UMKM, (2) *Major Project* (MP) Pengelolaan Terpadu UMKM dalam RPJMN Tahun 2020 s.d 2024, dan (3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang telah menetapkan 13 *Major Project* (MP) strategis, salah satunya adalah MP Pengelolaan Terpadu UMKM. MP Pengelolaan Terpadu UMKM yang telah berjalan pada tahun 2022 yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam proses pelaksanaan MP Pengelolaan Terpadu UMKM dilakukan kegiatan koordinasi serta pemantauan dan pengendalian kegiatan untuk melihat kemajuan kegiatan-kegiatan yang mendukung MP. Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah terkait. Selain itu, telah dilakukan pendalaman materi ke lokus untuk mengidentifikasi tantangan dan/atau permasalahan, kebutuhan, serta peluang kontribusi Kementerian/Lembaga dan Pemda. Identifikasi tersebut telah disampaikan melalui Surat Deputi No B/KWU.04/70/D.IV.M.EKON/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 kepada *stakeholders* terkait sebagai pegangan maupun revisi program Kementerian/Lembaga dan Pemda, baik pada tahun ini dan/atau tahun 2023.

2. Penguatan Koperasi

Koperasi merupakan pilar ekonomi sehingga penguatan koperasi dan gerakan koperasi secara massif kepada masyarakat harus terus diberdayakan, mengingat pada tahun 2020 hanya terdapat 8,41% masyarakat yang tergabung dalam koperasi. Saat ini masih terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam penguatan koperasi, seperti regulasi perkoperasian yang belum terimplementasi secara penuh, perlunya revitalisasi kelembagaan, kurangnya kapasitas SDM, sulitnya akses pembiayaan, serta lemahnya adopsi teknologi dan digitalisasi. Selain itu, masih banyak generasi milenial di era digitalisasi ini yang kurang tertarik dengan koperasi dan belum mengerti manfaatnya. Berdasarkan data pada Juni 2022, tercatat jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 128.943 unit dan jumlah anggota Koperasi aktif mencapai sekitar 26,7 juta orang yang terbagi dalam 5 jenis Koperasi, yang mana sejak pandemi sangat terdampak baik dari segi pendapatan, pemenuhan bahan baku, dan kolaps. Dalam hal ini, pemerintah melalui UU No. 11/2020 telah mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta memberikan insentif melalui program PEN dan LPDB. Kebijakan dan program yang mendukung

penguatan Koperasi juga dilakukan melalui program modernisasi koperasi, penguatan pengawasan koperasi, pembiayaan penjaminan koperasi, dan pengembangan SDM perkoperasian. Kementerian/Lembaga yang mendorong penguatan koperasi diantaranya Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Salah satu kegiatan yang dikolaborasikan bersama yaitu FGD Transformasi Gerakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 Juli 2022. Dalam FGD tersebut dapat dijangkau berbagai masukan dalam memformulasikan transformasi koperasi untuk mendorong kokohnya koperasi sebagai soko guru perekonomian.



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Selama Tahun 2022, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Komitmen K/L dan upaya untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dari sisi program maupun anggaran pada Sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (*Factory Sharing/FS*). Rakor dan komunikasi bersama K/L terkait terus dilakukan untuk mengurai berbagai kendala yang dihadapi di lokus *Major Project* Pengelolaan Terpadu.

2. Kemenkop UKM telah menyusun RPermenkop UKM terkait Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2022 yang telah diharmonisasi Kemenkumham dan disetujui Setkab, namun DIPA dari Kemenkeu tidak ada sehingga program BPUM tidak dijalankan pada tahun tersebut.
3. Masih berjalannya pendataan lengkap Koperasi dan UMKM sehingga realisasi data kontribusi UMKM terhadap PDB belum dipublikasi.
4. Kegiatan koordinasi dan monitoring belum dapat berjalan optimal karena masa pemulihan Pandemi Covid-19.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa koordinasi telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pengukuran data kontribusi UMKM terhadap PDB agar akurat, relevan dan tepat waktu telah terlaksana dengan rincian sebagai berikut

1. Telah dikompilasi hasil rapat koordinasi dan tinjauan lapangan terkait dalam matriks yang berisi inventarisasi berbagai tantangan, kebutuhan, serta pihak terkait yang dapat berperan dalam pengembangan *Factory Sharing* pengelolaan terpadu UMKM. Matriks tersebut disampaikan kepada K/L dan Pemda terkait melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM No B/KWU.04/70/D.IV.M.EKON/07/200 tanggal 19 Juli 2022.
2. Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan konsep program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM/Banpres Produktif) Tahun 2022 pada tanggal 24 Februari 2022 dan 1 Agustus 2022 dan telah diikuti pembahasan perkembangan penyusunan RPermenkop UKM perihal BPUM Tahun 2022 pada tanggal 8 Agustus 2022 bersama Kemenkop UKM, Kemenkeu, dan BPKP. Selain itu, Menteri Koperasi UKM telah mengirimkan surat pada tanggal 12 Oktober 2022 (Nomor B-150/M.KUKM/UM.00.01/X/2022) kepada Ketua Komite PCPEN (Bp. Menko Perekonomian).

Adapun beberapa kegiatan yang mendukung Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterima Menko Perekonomian adalah sebagai berikut:

- Sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (*Factory Sharing/FS*) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 dengan K/L terkait
- Koordinasi, monitoring, dan evaluasi Penguatan Koperasi
- Koordinasi program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi
- Koordinasi dan monitoring implementasi PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM,
- Koordinasi dan monitoring implementasi PP No. 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (mengikuti perkembangan perubahan UU Cipta Kerja), serta
- Penguatan koordinasi dan sinergitas Program K/L Bidang UMKM (27 K/L) Tahun 2022-2023.

SS. 1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.

IKU 1.4 Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun

Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi merupakan jumlah penerima Kartu Prakerja yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan dalam Program Kartu Prakerja. Dengan meningkatnya Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi melalui Program Kartu Prakerja, maka akan berdampak pada peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/ kewirausahaan bagi penerima Kartu Prakerja baik itu melalui *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling*. Penambahan Jumlah

lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) dihitung dari Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) tahun n dikurangi dengan Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) tahun $n-1$.

Hasil Pengukuran Kinerja



Target kinerja jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) pada tahun 2022 sebesar 2,4 juta orang, dengan realisasi capaian sebesar 4,98 juta orang atau mencapai 120%. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2022 masih bersifat semi bansos, di mana program ini masih bagian dari program Perlindungan Sosial di masa pandemi yang pelaksanaan pelatihannya masih 100% *online*.

Adapun data capaian Kartu Prakerja 2022 bersumber dari data Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut : jumlah pendaftar (terverifikasi email, KTP, KK, HP) sebanyak 45.197.019 juta orang, jumlah penerima Kartu Prakerja sebanyak 5.076.929 orang, jumlah penerima telah menyelesaikan pelatihan sebanyak 4.949.734 orang, jumlah penerima mendapatkan insentif 4.934.362. Dari jumlah penerima Kartu Prakerja sebanyak 5.076.928 tersebut, dikurangi penerima yang dicabut kepesertaannya dikarenakan peserta tersebut tidak membeli pelatihan pertamanya dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai Penerima Kartu Prakerja sebanyak 92.138 orang, maka jumlah penerima efektif atau penerima yang ditetapkan sampai dengan tahun 2022 adalah 4.984.790 orang. Jumlah insentif tersalurkan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2022 sebanyak Rp10.224.597.150.000.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU1.4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun	Juta orang	2.4 juta	4.984.790	120%

Pelaksanaan Rencana Aksi

Adapun beberapa rencana aksi tahun 2022 di antaranya:

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan Kartu Prakerja skema semi bansos pada semester I tahun 2022	Terlaksana	Sesuai arahan Menko Perekonomian dalam rapat Komite Cipta Kerja bahwa pada Semester I tahun 2022 tetap masih dilaksanakan skema semi bansos pada Program Kartu Prakerja dengan pelatihan <i>online</i> karena situasi pandemi Covid-19.
2	Pelaksanaan <i>pilot project</i> skema normal pelatihan <i>offline</i> dan <i>hybrid</i>	Terlaksana	Telah dilaksanakan <i>pilot project</i> skema normal dengan <i>offline</i> dan <i>hybrid</i> pada tanggal 10-26 Januari 2022 dengan melibatkan 6 lembaga pelatihan, dengan biaya pelatihan sebesar Rp 4,5 juta dengan insentif pasca pelatihan Rp 350.000 yang diikuti oleh 500 peserta
3	Evaluasi pelaksanaan <i>pilot project</i> skema normal pelatihan <i>offline</i> dan <i>hybrid</i>	Terlaksana	Manajemen Pelaksana telah menjalankan <i>pilot project</i> skema normal, 10-26 Januari 2022 dengan melibatkan 500 peserta. Beberapa hasil temuan pada <i>pilot project</i> skema

	sebagai dasar kebijakan skema normal semester 2 tahun 2022		normal yang dapat dijadikan evaluasi persiapan pelaksanaan skema normal: 1. <i>Drop-out Rate</i> tinggi pada pelatihan dengan komponen tatap muka; 2. Tingkat Penyelesaian Terendah pada mode Blended, lalu <i>offline</i>, dan <i>online</i>; 3. Insentif pasca pelatihan yang kecil; 4. Pelatihan online lebih efisien dari segi biaya; 5. Peserta Unggul yang berhasil menyelesaikan pelatihan; dan 6. Keikutsertaan Uji Kompetensi paling tinggi pada pelatihan offline. Berdasarkan hasil <i>Pilot Project</i> tersebut, MPPKP merekomendasikan antara lain perlunya seleksi peserta dengan kriteria unggul, mendorong Peran LP untuk mendorong penyelesaian pelatihan, dan melakukan pemantauan kehadiran peserta, tetap dibutuhkan insentif dalam skema normal untuk menutupi biaya akomodasi dan transportasi.
4	Pelaksanaan	Terlaksana	Dalam rangka menjalankan skema

	Kartu Prakerja skema normal pada semester 2 tahun 2022		normal Kartu Prakerja telah ditetapkan beberapa kebijakan dan regulasi sebagai dasar pelaksanaan skema normal di antaranya Perpres 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Permenko Nomor 17 tahun 2022 sebagai aturan pelaksanaan, dan Kepmenko 251 tahun 2022 tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Biaya Mencari Kerja, dan Insentif Pengisian Survei Evaluasi Bagi Penerima Kartu Prakerja. Selain itu, juga telah dilaksanakan Rapat Komite Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2022 yang dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Cipta Kerja Program Kartu Prakerja yang menghasilkan beberapa poin-poin keputusan terkait skema normal, di antaranya: 1. Target jumlah penerima Program Kartu Prakerja skema normal 2. Besaran manfaat skema normal 3. Metode pelatihan (<i>online, offline, dan/atau hybrid</i>), dll.
--	--	--	--

5	Pemantauan pelaksanaan skema normal pelatihan <i>offline</i> dan <i>hybrid</i>	Terlaksana	Telah dilakukan audiensi dan monitoring di beberapa Lembaga Pelatihan serta Balai Latihan Kerja sebagai persiapan pelaksanaan skema normal, khususnya terkait pelatihan <i>offline</i> dan <i>hybrid</i>. Yaitu Lembaga Pelatihan atau Balai Pelatihan di Jawa Barat, Banten Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, D.I. Yogyakarta, dan Sumatera Barat.
6	Evaluasi pelaksanaan skema normal pelatihan <i>offline</i> dan <i>hybrid</i> sebagai dasar kebijakan skema normal tahun 2023	Terlaksana	Komite Cipta Kerja memutuskan skema normal dijalankan pada tahun 2023. Sementara, di semester 2 tahun 2022 berfokus pada penyiapan pelaksanaan skema normal. Dari beberapa rapat evaluasi pelaksanaan skema normal, dibutuhkan beberapa proses penyiapan detail yang harus lebih dipersiapkan dengan matang, sebelum dimulai pada tahun 2023.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja sasaran program Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas dengan indikator kinerja utama adalah jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) telah mencapai keberhasilan 120%. Untuk tahun 2021, target

sesuai RPJMN sebesar 2,2 juta penerima dengan realisasi capaian sebesar 5.9 juta penerima. Sedangkan untuk tahun 2022, target RPJMN adalah sebanyak 2.4 juta orang dan realisasi capaian sebesar 4,9 juta penerima. Dalam RPJMN 2020-2024, total target penerima sebesar 12 juta telah tercapai dengan realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 16,4 juta penerima.

Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

Program Pelatihan Kartu Prakerja secara nasional menempati peringkat ke-4 program kerja Presiden yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setelah BLT, KIS, dan pembangunan jalan tol/ jalan trans (menurut Poltracking Indonesia). Secara Internasional, Program Kartu Prakerja telah dipresentasikan oleh UNESCO International Conference on Adult Education (CONFINTEA) VII, Alibaba Cloud Summit, APEC Workshop, Edtech Korea Forum, Global Lifelong Learning Summit, UNPOG Regional Symposium, dan diapresiasi dari beberapa tokoh dunia seperti H. M. Queen Maxima of the Netherlands, World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, dan sebagainya.

Program Kartu Prakerja dan Program Hello Work Jepang secara umum memiliki kesamaan tujuan dan bisnis proses, yang bertujuan memberikan pelayanan peningkatan *skill* dan mendorong kebhkerjaan pesertanya bagi pengangguran, yang telah bekerja dan baru lulus Pendidikan. Kedua program ini merupakan pelayanan ketenagakerjaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah;

Baik Hello Work dan Kartu Prakerja, bersama-sama mendorong ekosistem yang juga melibatkan pihak swasta, utamanya dalam penyediaan pelatihan di mana, dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh lembaga pelatihan pemerintah, sehingga lebih banyak melibatkan lembaga pelatihan swasta;

Baik Hello Work dan Kartu Prakerja merupakan bantuan peningkatan skill yang bersifat on demand yaitu para peserta wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program. Selain itu terdapat kesamaan melakukan asesmen terhadap calon peserta yang eligible untuk mendapatkan bantuan melalui proses screening dan uji psikotes;

Program Crosscutting dengan Kedeputian Lainnya/ atau Kementerian/Lembaga Lainnya

Dalam pelaksanaan tugas, terdapat beberapa isu yang melibatkan Deputi dan/atau K/L Lain di antaranya: (i) pemenuhan kebutuhan talenta digital, salah satunya melalui dukungan kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan kartu prakerja yang diarahkan untuk menyediakan SDM dengan kompetensi terkait ekonomi digital; (ii) mendukung *start-up/* program kewirausahaan, dengan penyediaan pelatihan-pelatihan berbasis kewirausahaan dalam program pendidikan vokasi dan pelatihan kartu prakerja; (iii) program Kartu Prakerja juga mendukung Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE); dan (iv) mendukung peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Sedangkan, *crosscutting* dengan kementerian/lembaga lainnya seperti koordinasi, sinkronisasi Program Kartu Prakerja antar kementerian/lembaga dalam naungan Komite Cipta Kerja, kolaborasi dengan Kemendikbudristek Dikti, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perindustrian dalam penyediaan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja, sinergi dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemanfaatan data kependudukan untuk verifikasi penerima Kartu Prakerja, integrasi data Kartu Prakerja dalam mempertajam target bantuan bansos untuk kemiskinan ekstrem dengan Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Adapun penyebab keberhasilan dari capaian kinerja yang bisa mencapai 100%, disebabkan dengan adanya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilaksanakan dengan K/L terkait atau *stakeholders* sangat intens dan bantuan Lembaga Internasional yang sangat mendukung dan fokus dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target berkaitan dengan program Kartu Prakerja di antaranya:

1. Seiring dengan masifnya kebocoran data, terdapat oknum-oknum tertentu yang melakukan upaya pemalsuan identitas pada tahap pendaftaran program Kartu Prakerja. Hal tersebut, berdampak terhadap proses pencapaian jumlah penerima program Kartu Prakerja yang tepat sasaran dan tepat guna.
2. Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, terdapat peningkatan tata kelola dalam melakukan verifikasi identitas dengan melakukan pemanfaatan *face recognition* yang diperlukan untuk melakukan penguatan verifikasi kepada calon penerima Kartu Prakerja. Namun demikian, akses kuota *face recognition* yang diberikan oleh Dukcapil Kemendagri masih sangat kecil yang tidak sebanding dengan jumlah pendaftar tiap gelombang. Sehingga berdampak pada jumlah penerima Kartu Prakerja yang ditetapkan setiap gelombang yang lebih kecil dibandingkan tahun 2021.
3. Kendala lainnya adalah, masih terdapat penerima yang belum membeli dan menyelesaikan pelatihan pertama, sejak 30 hari ditetapkan sebagai penerima. Sehingga, terdapat penerima yang dicabut kepesertaannya sebesar 92.138 orang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Dari kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya agar target dapat tercapai seperti telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan para *stakeholders*. Dari kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya atau rekomendasi untuk memperbaiki kualitas program Kartu Prakerja seperti:

1. Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum sebagai bentuk penanggulangan dan mitigasi untuk mencegah upaya pemalsuan identitas pada tahap pendaftaran program Kartu Prakerja kembali terjadi;
2. Memperkuat proses seleksi calon penerima program untuk mendorong ketepatan sasaran dan juga menjaga akuntabilitas program dari tindakan oknum atas pelanggaran hukum dalam pendaftaran program kartu prakerja;
3. Melakukan adendum PKS dengan Dukcapil, Kemendagri, guna meningkatkan kuota akses pemanfaatan fasilitas *face recognition*;
4. Mendorong pelaksanaan program kartu prakerja skema normal di tahun 2023 dengan penguatan tata kelola program yang telah dituangkan dalam penyempurnaan regulasi yaitu Perpres 113/2022, Permenko 17/2022 sebagai aturan pelaksanaannya, dan Kepmenko 251 tahun 2022.

SS. 1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.

IKU 1.5 Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun

Penciptaan lapangan kerja merupakan penambahan bidang kegiatan dari suatu usaha/perusahaan/instansi yang membutuhkan tenaga kerja dalam kompetensi dan jumlah tertentu. Penciptaan lapangan kerja dapat dicapai salah satunya melalui perbaikan regulasi/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan. Dengan meningkatnya Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada PDB Nasional melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

Hasil Kinerja

Hingga Desember Tahun 2022, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional periode Agustus 2022, penyediaan lapangan kerja telah tercapai sebesar 4,25 juta. Jumlah tersebut didapatkan dari penambahan jumlah orang bekerja pada periode Agustus 2021 dibandingkan dengan periode Agustus 2022, dimana pada periode Agustus 2021, jumlah orang bekerja adalah 131,05 juta dan pada periode Agustus 2022 sebesar 135,29 juta. Jumlah penyediaan lapangan kerja pada Agustus 2022 telah mencapai 140,24% dari target per tahun, yaitu 2,7-3 juta tenaga kerja. Adapun ringkasan penyediaan lapangan kerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun	Juta Orang	2,7 – 3	4,25*	140,24%

Keterangan: *) data Sakernas Agustus 2022

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

Data Sakernas Agustus 2022 menunjukkan capaian realisasi penyediaan lapangan kerja per tahun sebesar 4,25 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan gelombang PHK sebagai akibat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin menurun.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, penyediaan lapangan kerja tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Pada tahun 2022, penyediaan lapangan kerja adalah 4,25 juta orang. Sedangkan pada tahun 2021, penyediaan lapangan kerja adalah 2,59 juta. Tren penyediaan lapangan kerja 5 tahun terakhir digambarkan pada grafik dibawah ini.

Realisasi penyediaan lapangan kerja sebesar 4,25 juta orang pada tahun 2022 melebihi target RPJMN 2020-2024 (2,7 – 3 juta orang per tahun). Capaian ini merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 yang belum selesai



sepenuhnya serta ancaman stagflasi akibat ketidakpastian ekonomi global.

Rencana Aksi

No.	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta aturan turunannya	Terlaksana	1. Monev terkait Penetapan UMK 2022 di Disnaker Kulon Progo, Sidoarjo, dan Surabaya 2. Monev terkait Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Disnaker Kota Batam 3. Rapat Pembahasan Rencana Technical Assistance Asian

			Development Bank untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan 4. Rapat Pembahasan Upah Minimum 2023 5. Rapat koordinasi Evaluasi Prosedur Pemberian Visa Tinggal Terbatas 6. Rapat Evaluasi terkait Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) 7. Monev terkait Implementasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau 8. Diskusi Laporan Hasil Kegiatan Pemantauan UU Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan 9. Rapat Insentif bagi Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor 10. Pembahasan Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
2	Koordinasi dan Monitoring perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK	Terlaksana	1. Rapat koordinasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja 2. Pembahasan Rancangan Naskah Akademik Revisi UU Cipta Kerja 3. Rapat pembahasan Substansi Ketenagakerjaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja 4. Workshop Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

			5. <i>Focus Group Discussion</i> Revisi UU Cipta Kerja dan Respons terhadap Ancaman Perekonomian Global
3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan pembukaan kembali Penempatan Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara penempatan	Terlaksana	1. Rapat koordinasi terkait Biaya Penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia 2. Rapat Interkem Penjajakan Kerja Sama Bilateral Indonesia - Belanda 3. Rapat Interkem mengenai Rencana Kerja Sama Bilateral Indonesia-Malaysia 4. Penjajakan Pembahasan MoU Ketenagakerjaan Indonesia-Qatar
4	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Terlaksana	1. Monev terkait Kondisi Tenaga Kerja khususnya Pekerja Migran Indonesia di Disnaker Provinsi Jawa Barat 2. Rapat Pembahasan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia 3. Rapat Koordinasi Kebijakan Pelindungan dan Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia 4. Monev terkait Purna Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 5. Kegiatan Kumpul Bareng Pekerja Migran Indonesia - Optimalisasi

			Layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia
--	--	--	--

Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

Realisasi penyediaan lapangan kerja pada agustus 2022 adalah 4,26 juta atau naik sebesar 3,24% dari tahun 2021. Capaian tersebut menunjukkan capaian yang baik apabila dibandingkan dengan beberapa negara. Berdasarkan laporan World Employment and Social Outlook Trend 2022 yang dikeluarkan oleh ILO, proyeksi penambahan jumlah tenaga kerja dunia dari tahun 2021 ke 2022 adalah 2,09%. Sedangkan untuk proyeksi wilayah Asia dan Pacific adalah 1,65% dan Asia Tenggara sebesar 1,54%. Adapun ringkasan perbandingan berdasarkan wilayah digambarkan pada tabel dibawah ini.

Wilayah	Jumlah Tenaga Kerja 2021 (Dalam Juta)	Jumlah Tenaga Kerja 2022 (Dalam Juta)	% Kenaikan
Dunia	3.257	3.325	2,09%
Asia Pacific	1.878	1.909	1,65%
Lower-Middle Income Countries	1.189	1.228	3,28%
Asia Tenggara	324	329	1,54%

Sementara itu, perbandingan dengan negara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Malaysia

Berdasarkan publikasi Department of Statistics Malaysia, pada November 2022, jumlah tenaga kerja di Malaysia terus meningkat sejak Agustus 2021. Jumlah tenaga kerja November 2022 adalah 16,11 juta dengan

pengangguran sebanyak 600,9 juta orang. Berdasarkan data tersebut, jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan 3,2% (year on year).

2. Australia

Berdasarkan publikasi Australian Bureau of Statistics, jumlah tenaga kerja di Australia per Desember 2022 mencapai 13,7 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 3,5% dibandingkan tenaga kerja tahun sebelumnya (Desember 2021).

3. Thailand

Berdasarkan data Bank of Thailand, jumlah pekerja hingga Oktober 2022 mencapai 39,1 juta orang. Jumlah tersebut menurun sekitar 400 ribu pekerja dibandingkan bulan sebelumnya. Tetapi, apabila dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah tersebut meningkat 1,4 juta pekerja (3,58%).

Program *Cross-cutting* dengan Kedeputan Lainnya atau Kementerian/Lembaga Lainnya

Sebagai inisiator dalam harmonisasi ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memegang peranan kunci sebagai pelaksana fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam perlindungan PMI, termasuk mereka yang tergolong sebagai Purna PMI. Program ini merupakan penguatan fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk menjadi kolaborator dalam ragam program pemerintah yang kini ada agar dapat didayagunakan dalam memfokuskan tujuannya melindungi Purna PMI dari jurang kemiskinan.

Dukungan program kementerian/lembaga yang ada dalam program ini dilakukan dengan pendekatan sinergitas kepada 21 (dua puluh satu) kementerian/lembaga, di antaranya yakni Kementerian Koordinator Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah, BPJS

Ketenagakerjaan, serta masyarakat sekitar di daerah kantong PMI, Purna PMI dan keluarganya. Kolaborasi dan koordinasi ini semakin diperkuat dengan ditetapkannya Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UKM, Kemenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Tim Koordinasi Kebijakan Pelindungan Purna Pekerja Migran Indonesia untuk Optimalisasi Program Terpadu Pemerintah Pelindungan Purna Pekerja Migran Indonesia melalui PMI Jutaan Keluarga Sejahtera (PMI JUARA).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian realisasi penyediaan lapangan kerja sebesar 4,25 juta orang tidak lepas dari dukungan dan upaya dari seluruh pihak salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk kembali meningkatkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi guna menyerap tenaga kerja serta menahan laju PHK akibat ketidakpastian ekonomi global.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM juga terus berkoordinasi untuk mendorong Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya proaktif untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan melalui pengembangan ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis dengan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.

Meskipun realisasi penyediaan lapangan kerja tahun 2022 menunjukkan kinerja positif, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian penyediaan lapangan kerja antara lain:

1. Terdapat beberapa daerah yang belum melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja secara penuh, salah satunya terkait dengan kebijakan pengupahan dan DKPTKA.
2. Selain Pandemi Covid-19, terdapat tren PHK yang dilakukan oleh perusahaan di sektor padat karya sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran.
3. Isu global seperti krisis rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina menyebabkan dampak kenaikan harga bahan baku yang berpotensi adanya pengurangan produksi atau kenaikan harga dan berefek pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
4. Revisi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendapat penolakan dari berbagai kalangan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Dalam rangka pencapaian realisasi sebesar 4,25 juta pada tahun 2022 serta dalam rangka perbaikan perekonomian nasional melalui penyediaan lapangan pekerjaan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah melakukan beberapa program dan kegiatan, antara lain terkait koordinasi UU Cipta Kerja Klaster

Ketenagakerjaan; Penempatan, Pelindungan, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Narasi capaian hasil koordinasi antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan beserta aturan turunannya serta Monitoring Perbaikan UU Cipta Kerja

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022. Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja dilakukan karena kebutuhan mendesak untuk mempercepat melakukan antisipasi dalam menghadapi kondisi global, resesi, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut terlibat dalam rapat koordinasi dan kegiatan tindak lanjut putusan MK terkait pengujian formil UU Cipta Kerja. Koordinasi dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet untuk menindaklanjuti putusan MK, mulai dari penerbitan UU 13/2022 tentang perubahan UU 12/2011, perbaikan redaksional, kajian akademis, hingga serap aspirasi dan sosialisasi.

Dampak yang diakibatkan dari pengimplementasian di lapangan juga perlu dipantau secara berkala. Cakupan substansi yang dipantau harus meliputi seluruh aspek ketenagakerjaan mulai dari hubungan kerja, pengupahan, tenaga kerja asing, hingga jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan monitoring dan implementasi terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, khususnya terhadap substansi-substansi berikut.

- a) Pembahasan Upah Minimum 2023



Kebijakan pengupahan disusun dengan mempertimbangkan aspek perlindungan bagi pekerja/buruh, kemampuan perusahaan, kondisi perekonomian nasional, serta dinamika kondisi ketenagakerjaan saat ini. Oleh karena itu, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mengadakan beberapa kali rapat pembahasan untuk mengevaluasi penetapan Upah Minimum 2022 dan mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti akademisi, asosiasi pengusaha, dan Pemerintah terkait kebijakan penetapan upah minimum 2023.

b) Monev Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Monev dilakukan di beberapa lokasi, seperti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Batam, dengan tujuan mengetahui perkembangan implementasi program JKP dan mengetahui efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan tingkat klaim manfaat program JKP.

Dari berbagai monev tersebut, diketahui bahwa penyebab rendahnya penggunaan manfaat pelatihan pada program JKP, antara lain (i) kurangnya pengetahuan manfaat pelatihan; (ii) nominal manfaat tunai dianggap kecil; (iii) pelatihan yang tersedia kurang

sesuai; dan (iv) peserta memilih tidak mengikuti. Untuk mengatasi kendala yang ada pada pelaksanaan program JKP, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan pada manfaat pelatihan JKP, antara lain: (i) pemberian tunjangan pelatihan; (ii) peningkatan plafon biaya; dan (iii) peningkatan sosialisasi program JKP yang lebih masif sehingga informasi manfaat pelatihan dapat lebih tersampaikan ke semua lapisan masyarakat.

c) Evaluasi Implementasi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)

Dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA, diamanatkan penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan TKA (RPTKA) perlu segera dilakukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memungut RPTKA di daerah, juga sebagai bentuk penyesuaian substansi pengaturan agar sesuai dengan ketentuan dalam PP 34/2021. Selain itu, urgensi lainnya yang tak kalah penting adalah untuk menjaga kesinambungan pendapatan daerah dan mendongkrak ekosistem investasi nasional.

Meskipun demikian, belum semua daerah melakukan penyesuaian Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM melakukan rapat evaluasi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait. Seluruh peserta rapat sepakat untuk tetap mendorong pelaksanaan penyesuaian Peraturan Daerah terkait RPTKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Koordinasi Penempatan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan perekonomian negara melalui remitansi. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pembatasan penempatan PMI di beberapa negara. Setelah sempat mengalami penurunan penempatan PMI sejumlah 40.549 orang di tahun 2021, jumlah penempatan PMI di tahun 2022 meningkat sebanyak 128.137 orang. Peningkatan jumlah penempatan ini sejalan dengan membaiknya kondisi Pandemi Covid-19, didorong dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Hingga Desember 2022, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah melakukan beberapa koordinasi yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia antara lain sebagai berikut:

a) Program PMI Jutawan Keluarga Sejahtera (PMI JUARA)

Program terpadu Pelindungan Purna PMI melalui PMI Juara merupakan upaya untuk melindungi kepentingan Purna-PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan setelah bekerja, salah satunya dalam aspek ekonomi dengan mengedepankan 4 (empat) fasilitas, yakni: (i) peningkatan skill Purna-PMI; (ii) bantuan permodalan dan sarana; (iii) fasilitasi perizinan berusaha; dan (iv) pemasaran produk.

Upaya pelindungan ini dilakukan dengan mengandalkan koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi secara sinkron antara kementerian/lembaga dengan instansi terkait sebagai suatu alat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kendala terkait pelindungan Purna PMI di daerah yang akurat dari Pemerintah Pusat.

Adapun hasil dari Proyek Perubahan ini adalah terciptanya mekanisme pengumpulan, pengolahan dan berbagi pangkalan data antar pemangku kepentingan terkait untuk menopang koordinasi penguatan program perlindungan Purna-PMI.



b) Jaminan Sosial bagi PMI Malaysia

Rapat ini dilakukan untuk membahas mengenai perlindungan jaminan sosial bagi PMI Malaysia sebagai tindak lanjut MoU Indonesia-Malaysia tentang penempatan dan perlindungan (PMI) sektor domestik di Malaysia. Masih banyaknya PMI nonprosedural menyebabkan banyaknya permasalahan terkait jaminan sosial karena selama ini PMI prosedural pasti memiliki jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan (sesuai dengan amanat Permenaker 18/2018), sementara PMI nonprosedural belum ada regulasi yang mengatur terkait jaminan sosialnya.



Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antar K/L terkait untuk dapat meminimalisir permasalahan yang ada mengenai sistem jaminan sosial PMI tersebut. Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk tim kecil terkait pembahasan jaminan sosial bagi PMI Malaysia.

3. Koordinasi Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsotek) Pekerja Informal

Masih rendahnya cakupan kepesertaan jamsotek pada pekerja informal perlu mendapat perhatian mengingat pekerja informal lebih rentan dibanding pekerja formal sehingga membutuhkan perlindungan sosial. Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah berupaya meningkatkan kepesertaan pekerja informal melalui berbagai *stakeholder* terkait.

Untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya kepesertaan jamsostek pekerja informal di daerah dan mendapat rekomendasi guna meningkatkan kepesertaan jamsostek pekerja informal, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah menyelenggarakan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan Jamsostek Pekerja Informal pada 13 Oktober 2022 di Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah dengan tingkat kepesertaan pekerja informal tertinggi kedua secara nasional
- b. Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan Jamsostek Pekerja Informal pada 23 November 2022 di Provinsi Lampung sebagai daerah dengan tingkat kepesertaan pekerja informal terendah secara nasional
- c. *Focus Group Discussion* Peran Pemerintah Daerah Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kepesertaan Jamsostek Pekerja Informal" pada 1 Desember 2022 dengan mengundang beberapa pemerintah daerah dengan tingkat kepesertaan pekerja informal yang tertinggi dan terendah.

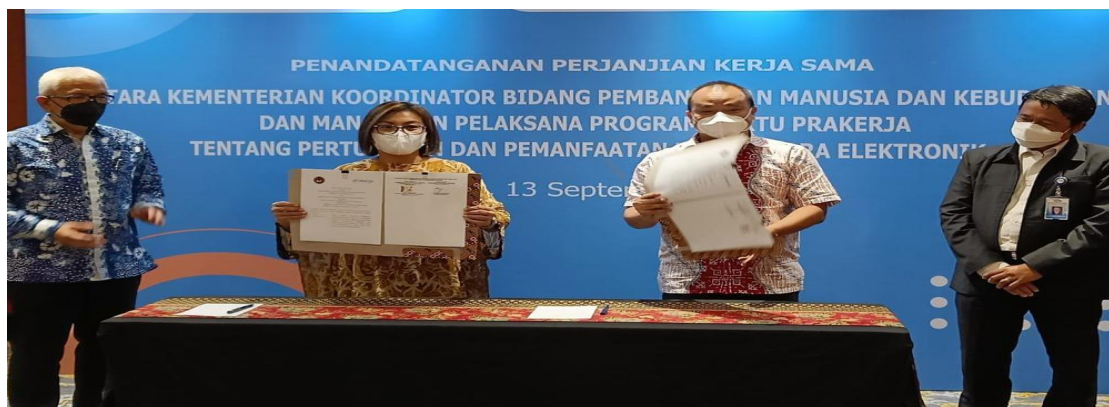
SS. 2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat

IKU 2.1 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja

Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Kartu Prakerja terhadap Program Kartu Prakerja merupakan tingkat kepuasan penerima Kartu Prakerja terhadap Program Kartu Prakerja. Indeks kepuasan diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana kepada Penerima Kartu Prakerja yang dilakukan secara bertahap (sebanyak 3 kali) untuk setiap Penerima Kartu Prakerja.

Survei dilakukan untuk mengetahui ketepatan sasaran program, inklusif program, tepat guna dan tepat substansi program, kualitas program, dan ketepatan manfaat insentif program. Survei dilaksanakan secara online berdurasi selama 30 menit yang disebarakan melalui *dashboard* penerima Kartu Prakerja. Sasaran responden adalah populasi penerima Kartu Prakerja tahun 2022 yang telah menyelesaikan pelatihan pertama dan menerima insentif pasca-pelatihan pertama. Survei evaluasi 1 dan 2 dikirimkan masing-masing 30 hari dan 90 hari setelah penerima mendapatkan insentif pertama, kemudian survei evaluasi 3 dikirimkan pada periode waktu tertentu. Selama tahun 2022 survei evaluasi prakerja dilaksanakan sebanyak 3 kali kepada peserta Program Kartu Prakerja dengan rincian survei sebagai berikut:

1. Survei Evaluasi I tahun 2022 pada periode 15 April - 10 Desember 2022, N = 4.469.954 orang Penerima Kartu Prakerja;
2. Survei Evaluasi II tahun 2022 pada periode 14 Juni - 10 Desember 2022, N = 4.132.322 orang Penerima Kartu Prakerja; dan
3. Survei Evaluasi III tahun 2022 pada periode 1 November - 10 Desember 2022, N = 3.420.320 orang Penerima Kartu Prakerja.



Hasil Kinerja

Tingkat kepuasan Penerima Manfaat Kartu Prakerja diukur dengan melakukan survei kepada Penerima Kartu Prakerja yang nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuisisioner yang telah diisi oleh koresponden dengan 4

kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak puas, rentang nilai presentase <65; (2) Tidak puas, rentang nilai presentase 65 - 74; (3) Puas, rentang nilai presentase 75 - 84; dan (4) Sangat Puas, rentang nilai presentase 85 - 100. Target kinerja berupa nilai indeks kepuasan penerima manfaat Program Kartu Prakerja pada tahun 2022 adalah 3 dari 4 atau mencapai 100 % dari target tahun 2022.

Indeks kepuasan penerima manfaat Program Kartu Prakerja akan diukur secara tahunan (keseluruhan) dengan melihat keseluruhan rata-rata hasil survei yang diisi oleh penerima Program Kartu Prakerja lalu dikonversikan ke dalam bentuk indeks penilaian. Namun sejauh ini hasil Survei Evaluasi I, II, dan III telah menunjukkan bahwa Kartu Prakerja memberikan dampak positif kepada penerimanya dan bersifat inklusif. Berikut rincian mengenai hasil Survei Evaluasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. **Penerima Program Kartu Prakerja tepat sasaran**, 72% menganggur saat mendaftar, 84% pekerja dengan gaji di bawah UMP, 88% pekerja informal, 87% Penerima Kartu Prakerja belum pernah mengambil pelatihan, dan 2% tinggal di kabupaten tertinggal.
2. **Kartu Prakerja inklusif terhadap Kaum Marginal**, 31% penerima berpendidikan rendah, 2% tinggal di kabupaten tertinggal, 3% penyandang disabilitas, dan 4% purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).
3. **Pelatihan Kartu Prakerja meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan**, 92% pelatihan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan *softskill*, 92% meningkatkan produktivitas kerja, 91% meningkatkan daya saing kerja, dan 93% meningkatkan kewirausahaan.
4. **Insentif Kartu Prakerja tepat sasaran**, 79% digunakan untuk membeli bahan pangan dan 64% modal usaha, besaran insentif Kartu Prakerja setara dengan 65% dari rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan untuk makanan.

5. **Pelatihan Kartu Prakerja memberikan materi belajar yang relevan,** pelatihan Prakerja dapat meningkatkan *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling*, terdapat 63% penerima yang akan melampirkan sertifikat pelatihan Kartu Prakerja ketika mendaftar pekerjaan.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja sasaran program terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat dengan kinerja utama adalah indeks Kepuasan Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja telah mencapai keberhasilan 100% dengan capaian pada tahun 2021 sesuai dengan target telah mencapai indeks kepuasan 3 dari 4 begitu juga dengan tahun 2022 telah mencapai indeks kepuasan 3 dari 4 dan untuk tahun selanjutnya telah ditetapkan target indeks kepuasan 3 dari 4.

Pelaksanaan Rencana Aksi

Adapun beberapa rencana Aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu:

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi pelaksanaan survei Penerima Kartu Prakerja tahun 2022	Terlaksana	Manajemen Pelaksana melibatkan Kemenko Perekonomian dan Tim Ahli dalam penyusunan pertanyaan survei
2	Pelaksanaan Survey Evaluasi Tahap I, II, dan III	Terlaksana	1. Survei Evaluasi I dilaksanakan pada periode 15 April - 10 Desember 2022. 2. Survei Evaluasi II dilaksanakan pada pada periode 14 Juni - 10 Desember 2022.

			3. Survei Evaluasi III dilaksanakan pada periode 1 November - 10 Desember 2022.
3	Evaluasi dan pelaporan hasil survei Program Kartu Prakerja	Terlaksana	Dari Survei Evaluasi yang dilakukan, disimpulkan Kartu Prakerja tepat sasaran, inklusif, mendorong kebhkerjaan dan kewirausahaan, dan tepat guna.
4	Evaluasi Program Kartu Prakerja oleh BPS (survei Sakernas Februari dan Agustus 2022)	Terlaksana	Survei Sakernas oleh BPS telah dilaksanakan yang juga menjawab beberapa pertanyaan terkait Program Kartu Prakerja berupa (i) besaran presentase penduduk usia 18 - 64 tahun penerima Program Kartu Prakerja yang menyelesaikan pelatihan, dan (ii) evaluasi penggunaan uang saku/insentif Program Kartu Prakerja. Dari hasil survei Sakernas bulan Februari 2022, 84,18% peserta menyelesaikan pelatihan dan menganggap bahwa program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja, di mana insentif sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar 86,75% dan 33,84% untuk modal

			usaha. Dari hasil survei Sakernas bulan Agustus 2022, 84,83% peserta menyelesaikan pelatihan dan menganggap bahwa program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja, di mana insentif sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar 86,51% dan 36,17% untuk modal usaha.
--	--	--	--

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Capaian keberhasilan indeks kepuasan penerima manfaat terhadap Program Kartu Prakerja sebesar 3 dari 4 dapat terealisasi sesuai target karena tata kelola Program juga terus ditingkatkan baik dari sisi kebijakan hingga implementasi di level operasional sehingga akuntabilitas program dapat terjaga dengan baik yang berdampak positif kepada penerima Kartu Prakerja. Capaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang intens oleh Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, dan Manajemen Pelaksana.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola program, telah dilakukan upaya dan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan tim pemantauan Manajemen Pelaksana dan BPS dalam upaya meningkatkan indikator dan pertanyaan dalam

survei sehingga dapat lebih memotret capaian indeks kepuasan penerima manfaat program yang lebih kompleks dan komprehensif.

2. Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana terus berupaya melakukan sosialisasi baik melalui *dashboard* peserta, maupun lewat media sosial seperti instagram dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi penerima Kartu Prakerja dalam mengisi survei yang telah disiapkan demi perbaikan program lebih baik lagi ke depannya.

SS. 3 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif

IKU 3.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait puas dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan.

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan di bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- Sangat Baik, rentang nilai 85 – 100 (4)
- Baik, rentang nilai 75 – 84 (3)
- Cukup, rentang nilai 65 – 74 (2)
- Kurang, rentang nilai <65 (1)

Adapun nilai dari indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm diperoleh melalui penilaian dari 2 (dua) sub indikator :

Sub indikator pertama, merupakan Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm yang ditindaklanjuti. Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh unit kerja sebagai hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, dan penyelesaian permasalahan antar Kementerian, pelaksanaan pengendalian kebijakan, pengawalan program prioritas, dan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L terkait kebijakan tersebut.

Adapun Instrumen kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L antara lain

1. Peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kantor Kemenko Perekonomian (PP, Perpres, Permenko, dll)
2. Regulasi yang dihasilkan oleh Presiden dan K/L lain sebagai dampak/tindak lanjut dari hasil proses dan koordinasi yang dikeluarkan kantor Kemenko Ekon
3. Surat dari K/L terkait
4. Kesepakatan kerjasama ekonomi internasional
5. Notula Rapat yang diselenggarakan oleh Presiden melalui Ratas atau K/L terkait sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian

Adapun Instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh menko perekonomian antara lain :

1. Rumusan kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas Surat Keluar)
2. Siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor Kemenko Perekonomian; dan/atau
3. Draft Kesepakatan kerja sama ekonomi hasil pertemuan internasional yang dipimpin/inisiasi oleh Kemenko Perekonomian
4. Risalah/notulensi/Berita Acara Kegiatan rapat koordinasi level Menteri/Deputi/Asisten Deputi

Sub indikator pertama memiliki nilai maksimal 80 dengan perhitungan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang dihasilkan dikali dengan 80.

Sub indikator kedua, merupakan indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Pada sub indikator kedua ini, variabel indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Untuk sub indikator kedua. Indeks kepuasan layanan koordinasi dapat dibuktikan dengan penghargaan atau apresiasi dari pihak luar yang kredibel. Apabila unit kerja telah mendapatkan penghargaan atau apresiasi tersebut, maka unit kerja tidak perlu melakukan survey kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian; dan langsung memperoleh nilai bobot pengukuran secara penuh yaitu 20 poin

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada Tahun 2022 adalah 3 dari 4. Hingga Desember Tahun 2022, Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Ditindaklanjuti yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 100 % dari target Tahun 2022 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi digital,	indeks	3 dari 4	3	100 %

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja sasaran program Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif dengan indikator kinerja utama adalah Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mencapai keberhasilan 100% dengan capaian pada tahun 2022 sesuai dengan target. Karena IKU *perspektif internal business process* tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021, maka capaian belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun untuk tahun selanjutnya sampai 2024 telah ditetapkan target 3 dari 4 sesuai dengan yang tertuang pada Renstra Kedeputan.



Pelaksanaan Rencana Aksi s.d Desember 2022

Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kinerja, Deputi IV sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi penyusunan kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Terlaksana	-Telah melakukan koordinasi penyusunan kebijakan ekonomi digital melalui PMO Pengembangan Ekonomi Digital - Telah disusun Strategi Nasional Vokasi sebagai acuan bersama arah pengembangan vokasi bagi seluruh pemangku kepentingan di level pusat dan daerah. -Telah dilaksanakan pendampingan proses pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi kepada 8 lembaga vokasi yang ditunjuk menjadi mitra pengembang konten edukasi berbasis VR. - Telah terlaksana (i) FGD Transformasi Gerakan Koperasi pada tanggal 1 Juli 2022; (ii) rapat koordinasi terkait percepatan penguatan Koperasi (Modernisasi - Korporasi, Pengawasan, dan Regulasi) pada tanggal 12 Juli

			2022 dan; (IV) rapat koordinasi terkait Strategi Pencapaian Target Modernisasi dan Pengawasan Koperasi pada tanggal 24 Agustus 2022; (iv) pembahasan tentang Strategi Percepatan Implementasi PP No. 7/2021, Bidang Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi UMK pada tanggal 3 Agustus 2022; ;(v) Rapat Koordinasi Mengurai Tantangan Implementasi PP No. 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil pada tanggal 5 Juli 2022; (vi) Rakor identifikasi Program Pemberdayaan UMKM T.A 2022/2023 bersama K/L terkait, guna memperkuat Koordinasi dan Sinergitas pada tanggal 7, 8, 12, 13, 14 September 2022. Selain itu, telah dikirim surat kepada K/L terkait perihal permohonan penyampaian program - Telah dilaksanakannya Rapat dan FGD terkait dengan persiapan program Kartu Prakerja Skema Normal, kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan teknis program
--	--	--	---

			Kartu Prakerja Skema Normal - Koordinasi telah dilakukan melalui identifikasi kasus penggunaan TKA di masa pandemi berdasarkan laporan IRESS dan ASPEK Indonesia - Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan akademisi, Kemnaker, Kemendagri, dan K/L terkait membahas persiapan penetapan UMP 2023 Secara umum, Tidak ada kendala dalam melaksanakan koordinasi-koordinasi diatas
2	Monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Terlaksana	- Mengawal dan melakukan koordinasi penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) - Pembahasan dalam Rapat Tim Pelaksana evaluasi program Kartu Prakerja semester 1 tahun 2022 - Telah dilaksanakan (i) pembahasan tentang progress perkembangan penyusunan basis data tunggal telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022; (ii) Kompilasi Data UMK-M potensial di K/L yang akan ditindaklanjuti oleh BKPM untuk dimasukkan ke dalam sistem mitra investasi yang sedang di bangun; (IV)

			Monitoring Percepatan Implementasi OSS yang Solutif pada tanggal 13 Juli 2022 dan penyampaian Surat No B/KWU.04/66/D.IV.M.EKON/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal rekomendasi kebijakan penyelesaian kendala OSS ke Dirjen BKPM. -Telah dilakukan Monitoring Program Koordinasi dan Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Produk dan Komoditas Unggulan Wilayah Berorientasi Ekspor - Telah dilaksanakan Evaluasi Kolaborasi Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi UMKM dan Wirausaha Tahun 2022 - Monitoring pelaksanaan JKP telah dilaksanakan di Jawa Timur dan Batam dengan beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurangnya sosialisasi dan manfaat pelatihan belum maksimal. Selanjutnya akan dilaksanakan technical assistance dengan ADB untuk perbaikan program JKP. Secara umum, tidak ada kendala dalam melaksanakan monitoring dan
--	--	--	---

			evaluasi diatas
3	Melakukan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan	Terlaksana	Survey kepuasan layanan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan kepada K/L terkait (Kemenkop UKM, Kemenaker, BPS, dll) telah dilakukan dengan menghasilkan Indeks Baik. Survei menjadi bahan evaluasi dalam melakukan fungsi Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan kedepan. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan survei tersebut.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pada Tahun 2022, tidak terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dalam mencapai target tersebut:

1. Komunikasi yang baik antara unit satu dengan unit lainnya di Kedeputian IV maupun dukungan data dari Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring maupun evaluasi kebijakan bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM sehingga rekomendasi kebijakan dapat ditindaklanjuti dengan baik.
2. Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan. Kementerian Lembaga secara partisipatif melakukan pengisian survei yang telah disebar tersebut.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Walaupun tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut, namun tetap dilakukan beberapa upaya atau rekomendasi untuk mempertahankan keberhasilan pencapaian target sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dilakukan dengan perencanaan yang tepat sehingga rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dapat berjalan dengan baik.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dilakukan dengan perencanaan yang tepat sehingga rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dapat berjalan dengan baik.
3. Evaluasi kegiatan pelaksanaan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan terus dilakukan sehingga memberikan hasil survei yang optimal.

SS. 3 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif

IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang fasikal diperlukan analisa kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) dan karya tulis ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah). IKU Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM merupakan indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian atas analisa kebijakan yang

ditargetkan. Pada tahun 2022, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM menargetkan menyusun 5 analisa kebijakan.

Dengan terpenuhinya Indikator kinerja ini, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di lingkungan Deputy Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm namun juga diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan Kompetensi ASN yang merupakan "*ultimate indicator*" pada sasaran strategis di level Kementerian

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada Tahun 2022 adalah 75 %. Hingga Desember Tahun 2022, Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terealisasi sebesar 100 % dari target Tahun 2022 sebesar dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	%	75	100	120

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja sasaran program Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif dengan indikator kinerja utama adalah Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mencapai keberhasilan 120% dengan capaian pada tahun 2022 sesuai dengan target. Dikarenakan IKU *perspektif internal business process* tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021, maka capaian belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun untuk tahun selanjutnya sampai 2024 telah ditetapkan target 75-80 % sesuai dengan yang tertuang pada Renstra Kedeputan

Pelaksanaan Rencana Aksi

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Finalisasi Penyusunan Policy Brief	Terlaksana	- Telah terbit jurnal atas nama Dr. Danang Sri Wibowo dalam Jurnal Lemhannas RI dengan judul "Mengungkit Daya Saing UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Guna Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional". -Telah terbit jurnal internasional atas nama: Dr. Danang Sri Wibowo R, dengan judul :Leveraging the Competitiveness of Women MSMEs in

			the G-20 Presidency. -Policy Brief tentang “Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pendekatan Keperantaraan Pasar untuk Mendorong Ekspor Usaha Mikro Kecil dan Pengentasan Kemiskinan” -Policy Brief tentang Sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dengan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem -Telaahan staf tentang Pelaksanaan Workshop Kewirausahaan Siswa SMK -Telaahan staf tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke Lembaga Inkubator Wirausaha -Telah dihasilkan Policy Brief terkait Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, antara lain: (i) Dokumen Policy Brief Penguatan dan Sinergitas Peran TKPKD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Ekstrem melalui Program Kartu Prakerja, (ii) Dokumen Analisis usulan Revisi PMK 128/2019 tentang insentif Super Tax Deduction kegiatan Vokasi, (iii) Dokumen Analisis Usulan Revitalisasi Pendidikan
--	--	--	---

			Vokasi dan Pelatihan Vokasi termasuk Stranas dan Tim Koordinasi Nasional Vokasi. Telah dihasilkan Policy Paper terkait Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, antara lain: (i) Dokumen Policy Paper Harmonisasi Program Kartu Prakerja dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Memperkuat Jaminan Sosial dan Pengembangan Skill Tenaga Kerja di Masa Pandemi COVID-19, (ii) Dokumen Policy Paper Lesson Learn Benchmarking Study : Program Kartu Prakerja dan Program Hello Work Pemerintah Jepang, (iii) Dokumen Policy Paper Peranan Program Kartu Prakerja Memberdayakan Masyarakat Miskin Ekstrem dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem pada 212 Kab/Kota di Indonesia. Selain itu, juga telah disusun beberapa analisis kebijakan lainnya, seperti: (i) Dokumen Analisis Kebijakan Naskah Urgensi Perpres 113/2022 (Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Bisnis Proses dan Tata Kelola Program Kartu Prakerja), (ii) Dokumen Analisis Kebijakan Naskah
--	--	--	--

			Urgensi Permenko 17/2022 (Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Bisnis Proses dan Tata Kelola Program Kartu Prakerja), (iii) Dokumen Laporan Advokasi Kebijakan Program Kartu Prakerja kepada Pemerintah Daerah, (iv) Dokumen Analisis Kebijakan Telaahan Staf Rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Terkait Seleksi Direktur Teknologi pada MPPKP (v) Dokumen Telaahan Staf Rekomendasi Kebijakan Akuntabilitas Pemanfaatan Face Recognition Berbayar dalam Penguatan Seleksi Calon Penerima Program Kartu Prakerja. Dalam proses finalisasi policy Paper, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam proses finalisasi.
--	--	--	---

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022, tidak terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang mendorong keberhasilan dalam mencapai target tersebut adalah meningkatnya upaya unit/pegawai dalam menghasilkan analisis kebijakan baik berupa karya tulis kedinasan ataupun karya tulis ilmiah seperti policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Meskipun tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut, namun tetap dilakukan upaya atau rekomendasi untuk mempertahankan keberhasilan pencapaian target antara lain kegiatan evaluasi dalam proses penyusunan maupun tindak lanjut analisis kebijakan yang dihasilkan sehingga analisis kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

SS. 4 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang Baik

IKU 4.1 Indeks Tata Kelola Kedeputian

Indeks tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM merupakan turunan dari indikator tata kelola kementerian yakni indeks tata kelola kementerian yang menggambarkan

Indeks tata kelo Deputi dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

- a. Sangat Baik, rentang nilai 85 – 100 (Indeks 4 dari 4)
- b. Baik, rentang nilai 75 – 84 (Indeks 3 dari 4)
- c. Buruk, rentang nilai 65 – 74 (Indeks 2 dari 4)
- d. Sangat Buruk, rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)

Adapun indeks tata kola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) sub indikator :

Sub indikator pertama, merupakan persentase ASN di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun

2017, pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran. Adapun pemenuhan 20 Jam pelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya, dan benchmarking. Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang memenuhi jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya, dan benchmarking merupakan alat untuk mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dalam memenuhi jam pelajaran sebanyak 20 jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam FGD/seminar/workshop mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sub indikator kedua, merupakan Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Nilai evaluasi SAKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%

Sub indikator ketiga, merupakan Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Nilai PMPRB adalah nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka mencapai good governance. Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB pada komponen Pengungkit baik Pemenuhan maupun Reform berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sub indikator keempat, merupakan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 3 dari 4. Realisasi Indeks tata kelola ke deputian adalah sebesar 4. Adapun ringkasan kinerja Indeks tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut:.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks tata kelola ke deputian	Indeks	3 dari 4	4	120%

Sebagai sub indikator pertama, persentase ASN di Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN adalah telah terealisasi sebesar 65 % dari target Tahun 2022 sebesar 65 persen. Artinya, capaian kinerja sub indikator mencapai 100 %.

Sebagai sub indikator kedua, nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang telah terealisasi sebesar

85,32 dari target Tahun 2022 sebesar 84,5. Artinya, capaian kinerja sub indikator tersebut mencapai 100,97%.

Hasil Evaluasi SAKIP Deputy IV 2021

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	40%	36.48
2	Pengukuran Kinerja	40%	32.49
3	Pelaporan Kinerja	20%	16.36
Total Nilai			85.32

Tabel 3.5 Hasil SAKIP Deputy IV

Sebagai sub indikator ketiga, Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang telah teralisasi sebesar 94,45 dari target Tahun 2022 sebesar 82. Artinya, capaian kinerja sub indikator tersebut mencapai 115 %.

KOMPONEN/SUB KOMPONEN		BOBOT	INDEKS RB	
			2021	2022
A.	PENGUNGKIT	36.30	31.92	34.28
I.	PEMENUHAN	14.60	13.46	14.07
	1 Manajemen Perubahan	2.00	2.00	2.00
	2 Deregulasi Kebijakan	1.00	1.00	1.00
	3 Penataan dan Penguatan Organisasi	2.00	2.00	2.00
	4 Penataan Tatalaksana	1.00	0.88	1.00
	5 Penataan Sistem Manajemen SDM	1.40	1.40	1.40
	6 Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.31	2.31
	7 Penguatan Pengawasan	2.20	2.02	2.18
	8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	1.85	2.17
II.	REFORM	21.70	18.46	20.22
	1 Manajemen Perubahan	3.00	2.63	3.00
	2 Deregulasi Kebijakan	2.00	2.00	2.00
	3 Penataan dan Penguatan Organisasi	1.50	1.50	1.50
	4 Penataan Tatalaksana	3.75	2.63	2.94
	5 Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00	1.00	1.50
	6 Penguatan Akuntabilitas	3.75	3.00	3.58
	7 Penguatan Pengawasan	1.95	1.95	1.95
	8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.75	3.75
TOTAL PENGUNGKIT		36.30	31.92	34.28
Persentase Pemenuhan Nilai PMPRB =(Indeks RB/Bobot)*100%			87.93%	94.45%

Tabel 3.6 Nilai PMPRB Deputy IV

Sebagai sub indikator keempat, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang telah teralisasi sebesar 99,95 % dari target Tahun 2022 sebesar 94. Artinya, capaian kinerja sub indikator tersebut mencapai 106,33 %.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang baik dengan indikator kinerja utama adalah Indeks Tata Kelola Kedeputian telah mencapai keberhasilan 100% dengan capaian pada tahun 2022 sesuai dengan target. Karena IKU Learning and Growth tahun 2022 ini berbeda dengan tahun 2021, maka capaian belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun untuk tahun selanjutnya sampai 2024 telah ditetapkan target 3 dari 4 sesuai dengan yang tertuang pada Renstra Kedeputian.

Pelaksanaan Rencana Aksi

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Rapat Kerja Tahunan Deputi IV	Terlaksana	Pelaksanaan rapat ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap program kerja selama periode tahun 2022 masing-masing unit Eselon 2 di kedeputian 4, sekaligus mendiskusikan sasaran program untuk kegiatan di tahun 2023. Tidak ada kendala yang dihadapi

2	Rapat Evaluasi pelaksanaan Pelatihan Tahun 2022	Terlaksana	Beberapa unit kerja di Kedeputan IV melakukan rapat dalam menyusun Matriks Peran Hasil bagi pegawai. MPH tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan dialog kinerja dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Tidak ada kendala yang dihadapi
3	Rapat Internal Tim RB dan Agen Perubahan	Terlaksana	Rapat Internal dilaksanakan melalui Evaluasi Pelaksanaan RB bersama inspektorat telah dilaksanakan bersamaan dengan Peralihan tugas Agen Perubahan Deputi IV juga telah dilaksanakan. Tidak ada kendala yang dihadapi
4	Rapat Penyusunan Narasi Capaian Tahun 2022	Terlaksana	Rapat bertujuan untuk memfinalisasi narasi kinerja periode 2022 yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan LAKIP 2022
5	Rapat Penyusunan Renja Deputi IV Tahun 2023	Terlaksana dengan Perubahan	Penyusunan Renja dikoordinasikan langsung melalui Protakel dengan Unit Keasdepan di Deputi IV untuk membahas struktur renja 2023 maupun forward estimating terkait Renja 2024

6	Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Deputi IV Tahun 2022	Terlaksana	Pelaksanaan rapat ini bertujuan melakukan evaluasi kerja untuk periode yang lalu sehingga dapat disusun perencanaan untuk kegiatan selanjutnya berdasarkan kondisi realisasi anggaran yang ada. Tidak ada kendala yang dihadapi
---	--	------------	---

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022, tidak terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi yang baik antar unit di lingkup Kedeputian IV baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan kebutuhan data.
2. Meningkatnya partisipasi pegawai dalam acara workshop/fgd/pelatihan.
3. Perencanaan Kegiatan / Rencana Aksi yang tepat sasaran dan mendukung pencapaian target.
4. Pandemi yang semakin terkendali mendorong pemulihan ekonomi sehingga beberapa kegiatan/rencana aksi dilaksanakan dengan skema normal.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Meskipun tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut, namun tetap dilakukan upaya atau rekomendasi untuk mempertahankan keberhasilan pencapaian target yaitu melalui kegiatan evaluasi dalam penyusunan laporan kinerja kedeputian, evaluasi

keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/fgd, evaluasi pemanfaatan anggaran, dan evaluasi perencanaan reformasi birokrasi ke deputian.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi ke deputian dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target. Capaian kinerja Deputi IV sebesar 100% telah berhasil mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 99,93%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022, Deputi IV berhasil mencapai kinerja secara optimal dan mencapai realisasi anggaran yang cukup tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Deputi IV dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.

Beberapa efisiensi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Beberapa kegiatan rapat ataupun pendidikan/pelatihan masih tetap dilaksanakan secara daring (Zoom) walaupun pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Contoh Kedeputian IV dalam persiapan pelaksanaan FEKDI 2022 lalu melakukan berbagai rapat koordinasi bersama Bank Indonesia melalui daring (zoom). Apabila berbagai rapat persiapan tersebut dilaksanakan secara luring dan berlokasi di Kantor Bank Indonesia, maka diperlukan biaya transportasi dalam kota menuju ke tempat pelaksanaan rapat sebesar 900 ribu rupiah (150.000x 6 orang, asumsi peserta rapat sebanyak 6 orang). Oleh karena itu, pelaksanaan rapat melalui daring mendorong terjadinya efisiensi biaya karena pada pelaksanaannya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam kota.
2. Penggunaan fasilitas internal Deputi IV/ Kemenko Perekonomian untuk pengadaan kegiatan rapat dan konsinyering untuk efisiensi biaya paket meeting dalam/luar kota. Contohnya pelaksanaan rapat internal

Kedeputian IV terkait Evaluasi Kinerja Tahun 2022 pada tanggal 28 Desember 2022 lalu yang dilaksanakan di Ruang Graha Sawala Kemenko Perekonomian. Apabila rapat tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Jakarta dengan 50 peserta rapat, maka biaya paket meeting dalam kota yang akan dikeluarkan dapat mencapai 30 juta rupiah (50x600.000). Oleh karena itu, pemanfaatan ruang Graha Sawala tersebut merupakan salah satu efisiensi yang dilaksanakan oleh Kedeputian IV karena tidak mengeluarkan biaya paket meeting didalamnya.

3. Penggunaan e-office dalam hal persuratan memudahkan proses disposisi menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pekerjaan keseharian. Selain itu, penyimpanan dokumen dengan menggunakan *Cloud* seperti Dropbox maupun Google Drive membuat penyimpanan arsip dokumen menjadi lebih efisien dan efektif. Baik penggunaan e-office maupun penggunaan *Cloud* mendorong penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa. Dengan adanya penggunaan e-Office dan Cloud, akan mengurangi dokumen persuratan/dinas yang perlu dicetak karena dokumen tersebut sudah berada di sistem. Sebagaimana diketahui, pencetakan dokumen memerlukan pengadaan barang ATK berupa kertas. Berdasarkan Daftar Standar Harga, kertas fotocopy berada pada kisaran harga 51 ribu sampai dengan 64 ribu rupiah per rim nya. Oleh karena itu, penggunaan e-Office dan Cloud Drive di kedeputian IV merupakan salah satu upaya efisiensi karena mendorong penghematan dalam pengadaan barang/jasa.



C. Akuntabilitas Keuangan

1. Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada tahun 2021 turut melakukan *Automatic Adjustment* terkait penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan ND SES No. PR.4.1/95/SES.M.EKON/05/2022 tanggal 25 Mei 2022. Pagu anggaran tahun 2022 sebelum *Automatic Adjustment* adalah sebesar Rp. 14.500.000.000, kemudian pagu tersebut mengalami *Automatic Adjustment* sehingga menjadi sebesar Rp. 13.229.703.000,00. Pagu anggaran pada tahun 2022 tersebut memiliki besaran yang sama dibanding dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, anggaran yang dikelola oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebesar Rp 14.500.000.000,00 (sebelum refocusing). Perkembangan pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dari tahun 2017 s.d 2022 sebagaimana tampilan grafik berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2022

Realisasi Belanja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp 13.220.637.727,00 atau mencapai 99,93 % dari Pagu DIPA sebesar Rp 13.229.703.000,00. Tingkat penyerapan anggaran tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah Rp. 13.092.505.000,00 dari total pagu Rp. 13.159.132.000,00 atau mencapai 99,49 % di tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja atau sasaran program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Rincian Anggaran berdasarkan sasaran Kegiatan

KODE	Kegiatan	Pagu	Realisasi per 31 Des	Persentase Penyerapan sd 31 Des
2491.ABA	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	1.528.348.000	1.524.213.145	99,73%
2491.EAC	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.872.869.000	4.870.816.525	99,96%
2505	Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing UMKM	1.365.750.000	1.365.746.506	100,00%
4545	Koordinasi Kebijakan Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	1.365.486.000	1.364.696.905	99,94%
5227	Koordinasi Kebijakan Bidang PEM dan Kewirausahaan	1.821.000.000	1.819.411.092	99,91%
5229	Koordinasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2.276.250.000	2.275.753.554	99,98%
TOTAL DEPUTI IV		13.229.703.000	13.220.637.727	99,93%

Pada tahun 2022, dilakukan juga pengukuran persentase kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari unsur penyerapan anggaran dan unsur pencapaian kinerja keluaran (output) dengan ketentuan masing-masing diberikan bobot 50% (lima puluh persen).

Adapun hasil pengukuran terhadap Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang telah terealisasi hingga pada Tahun 2022 adalah 99.97%

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu kegiatan dikatakan efisien, apabila dengan input yang sama dihasilkan output yang lebih besar, atau output yang dihasilkan adalah sama (sesuai target) dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana, hasil kerjanya juga diperiksa. Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien.

Tolok ukur capaian kinerja juga dapat dilihat melalui pengukuran capaian keluaran (output), kegiatan, yang dilakukan dengan membandingkan Target Volume Keluaran/Output (TVK) yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL/DIPA), dibandingkan dengan Realisasi Volume Kegiatan (RVK), serta membandingkan antara Target Indikator Keluaran Kegiatan (TIKK) dengan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (RIKK). Pengukuran Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kegiatan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagai berikut.

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{RVK_{ke i}}{TVK_{ke i}} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{Realisasi\ Indikator_i}{Target\ Indikator_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Keterangan:

- CKK : Capaian Keluaran (output) Kegiatan
- RVK : Realisasi Volume Keluaran (output) Kegiatan
- TVK : Target Volume Keluaran (output) Kegiatan
- M : Jumlah Keluaran (output) Kegiatan
- n : Jumlah Indikator Keluaran (output) Kegiatan

Pada Tahun 2022, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah menghasilkan 13 volume keluaran/output (RVK), dan 6 indikator kinerja kegiatan (RIKK), melalui 5 Kegiatan. Pencapaian kedua komponen tersebut berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

No	Kegiatan	TVK	RVK	TIKK	RIKK	CKK
1	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	3	3	2	2	100%
2	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan Ekonomi	3	3	1	1	100%
3	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2	2	1	1	100%
4	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	3	3	1	1	100%
5	Koordinasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	2	2	1	1	100%
	Total	13	13	6	6	100%

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran (CKK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

Efisiensi : Capaian Keluaran (output) Kegiatan

PAKi : Realisasi Volume Keluaran (output) Kegiatan

RAKi : Target Volume Keluaran (output) Kegiatan

Cki : Jumlah Keluaran (output) Kegiatan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kegiatan pada bagian sebelumnya, dapat dihitung tingkat efisiensi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dalam pencapaian kinerja di tahun 2022 sebagai berikut:

No	Output	Capaian Keluaran Kegiatan (CKK)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	100 %	6.401.217.000	6.395.029.670
2.	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	100 %	1.821.000.000	1.819.411.092
3.	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100 %	1.365.750.000	1.365.746.506
4.	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	2.276.250.000	2.275.753.554
5.	Koordinasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi	100 %	1.365.486.000	1.364.696.905

	Ekosistem Ketenagakerjaan			
--	------------------------------	--	--	--

Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung bahwa capaian efisiensi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2021 adalah sebesar 0,51 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2021, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berhasil melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA). Namun demikian, memperhatikan capaian efisiensi pemanfaatan sumber daya masih di bawah 50%, perlu didorong peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya

BAB

04

EVALUASI KINERJA



A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputy Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2021-2024, Deputy Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM merumuskan 8 (delapan) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Salah satu bentuk perencanaan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM periode tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kebijakan bidang koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas serta penata kelolaan deputy bidang koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang baik. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis akan dinilai melalui pengukuran indikator target kinerja secara berkala dan dievaluasi tiap akhir tahun. Berikut ini adalah tabel perbandingan perencanaan dan realisasi/capaian dari Restra Penyesuaian 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2021 dan 2022:

Tabel 4.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Terakhir Dan Target Jangka Menengah,

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Nama	Target	Realisasi	Capaian IKU	Status
SS.1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas						
IKU.1	Nilai Transaksi e-Commerce	Renstra 2022	430			
		PK 2022	430 triliun	476,3 triliun	110,77 %	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2021	345 triliun	401 triliun	116,31 %	Memenuhi Ekspektasi
IKU.2	Pertumbuhan Wirausaha	Renstra 2022	3			
		PK 2022	3 %	3,04 %	101,3 %	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2021	2,5 %	1,8%	72 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
IKU.3		Renstra 2022	63 %			

	Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap PDB	PK 2022	63 %	62,36 %*	98,41 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
		PK 2021	62 %	62,36 % *	100 %	Memenuhi Ekspektasi
IKU.4	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	Renstra 2022	2,4			
		PK 2022	2,4 juta	4,98 juta	120%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2021	2,2 juta	2,64 juta	120 %	Memenuhi Ekspektasi
IKU.5	Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	Renstra 2022	2,7-3			
		PK 2022	2,7 juta	4,25 juta	120 %	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2021	2,7 juta	2,5 juta	94,14 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
SS.2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat						
IKU.6	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat	Renstra 2022	3 dari 4			

	terhadap Program Kartu Prakerja	PK 2022	3 dari 4	3	100 %	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2021	3 dari 4	3	100 %	Memenuhi Ekspektasi

SS.3 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif

IKU.7	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Renstra 2022	3 dari 4			
		PK 2022	3 dari 4	3	100 %	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2021	-	-	-	-
IKU.8	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Renstra 2022	75%			
		PK 2022	75%	100%	120%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2021	-	-	-	-

SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

IKU.9	Indeks Tata Kelola Kedeputan	Renstra 2022	3 dari 4			
		PK 2022	3 dari 4	3	100%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2021	-	-	-	-

*) Keterangan: Data kontribusi UMKM terhadap PDB bersifat sementara, menunggu hasil perhitungan Kementerian Koperasi UKM dan BPS.

Berdasarkan data perbandingan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target-target yang telah ditetapkan pada perencanaan tahun 2022 dapat terealisasi dengan catatan memenuhi ekspektasi bahkan terdapat realisasi yang melebihi ekspektasi. Adapun perencanaan yang tidak memenuhi ekspektasi hanya pada IKU Kontribusi UMKM terhadap PDB.

Indikator Kontribusi UMKM terhadap PDB belum dapat memenuhi target karena angka capaian kontribusi UMKM terhadap PDB masih dalam perhitungan. Proses pendataan lengkap UMKM masih berlangsung hingga saat ini. Data setiap tahunnya bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, namun capaian Tahun 2021 dan 2022 sampai saat ini belum dipublikasikan. Pada tahun 2023, indikator kinerja tersebut rencananya akan diperbarui karena mulai dari Tahun 2021 indikator “Kontribusi UMKM terhadap PDB” dan targetnya tidak tercantum dalam RKP Tahun 2021, 2022, dan 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2022 dan memperhatikan perkembangan kebijakan terkait ekonomi digital, ketenagakerjaan dan UMKM, maka dilakukan rekomendasi perbaikan atas perencanaan kinerja

untuk tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta rekomendasi perbaikan atas Rencana Strategis sampai dengan tahun 2024 yang terangkum sebagai berikut:

1. Perspektif Stakeholder: "Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas" digantikan oleh "Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM yang berkualitas sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional"

Hal ini untuk mempertajam sasaran program perspektif *stakeholder* dan mendukung sasaran program dari Menko Perekonomian.

2. Perspektif Stakeholder: Target Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan wirausaha tahun 2023 dan 2024 mengalami penyesuaian semula sebesar 3,50% pada tahun 2023 dan sebesar 4,00% pada tahun 2024, menjadi sebesar 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024. Hal ini berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dimana terdapat penyesuaian target pertumbuhan wirausaha. Penyesuaian tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian tahun 2020 - 2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19.
3. Perspektif Stakeholder: Target Indikator Kinerja Utama Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun mengalami penyesuaian semula sebesar 2,6 juta pada tahun 2023 dan sebesar 2,8 juta pada tahun 2024, menjadi sebesar 595 ribu pada tahun 2023 dan 595 ribu pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan target berdasarkan RPJMN untuk tahun 2023 sebesar 2,6 juta orang tidak lagi menjadi acuan lagi karena kebijakan jumlah penerima di tahun 2023 (Skema Normal) jauh berbeda dengan target penerima Skema Semi Bansos. Selain itu target RPJMN hingga tahun 2024 secara kumulatif telah tercapai.
4. Perspektif Stakeholder: Indikator Kinerja Utama "Kontribusi UMKM terhadap PDB" mengalami perubahan menjadi "Persentase

Penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM" dengan target sebesar 80 % pada tahun 2023 dan 85 % pada tahun 2024. Beberapa pertimbangan perubahan IKU adalah sebagai berikut :

- a. Angka capaian kontribusi UMKM terhadap PDB tiap tahunnya bersumber dari Kemenko UKM, namun capaian tahun 2021 dan tahun 2022 sampai saat ini belum dipublikasikan
- b. Pada mulanya, indikator kinerja tersebut diambil dari target RPJMN 2022-2024, namun dari tahun 2021 indikator "Kontribusi UMKM terhadap PDB" dan targetnya tidak tercantum dalam RKP Tahun 2021, 2022, dan 2023.

Alasan pemilihan *Major Project* Pengelolaan terpadu UMKM dijadikan indikator dikarenakan termasuk dalam proyek prioritas yang dituangkan dalam RKP Tahun 2022 dan Tahun 2023. Selain itu, hal ini merupakan amanat dari PP 7/2021.

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, berikut arah kebijakan Perjanjian Kinerja Kedeputian IV (sasaran, indikator, target dan rencana aksi) pada tahun 2023 beserta alokasi anggaran tahun 2023 :



Tabel 4.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Perspective: Stakeholder			
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM yang berkualitas sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1. Nilai Transaksi e-Commerce	515 T
		1.2. Pertumbuhan Wirausaha	2,74 %
		1.3. Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM	80 %
		1.4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	595 ribu (orang)
		1.5. Penyediaan Lapangan Kerja Per tahun	2,7-3 Juta (orang)
Perspective: Customer			
2.	Terwujudnya Program Kartu Pra kerja yang Berkualitas	2.1. Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4
Perspective: Internal Business Process			
3.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang Efektif	3.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Baik (3 dari 4)
		3.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	75 %
Perspective: Learning and Growth			
4.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang Baik	4.1. Indeks Tata Kelola Kedeputian	3 dari 4

Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

	Kegiatan		Anggaran
1	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	Rp	27.000.000.000
2	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	Rp	2.000.000.000
3	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM	Rp	1.500.000.000
4	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	2.500.000.000
5	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	Rp	2.000.000.000
	Tiga puluh lima miliar rupiah	Rp	35.000.000.000

Tabel 4.3 Rencana Aksi Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif : Stakeholder								
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMK/IKM yang berkualitas sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1. Nilai Transaksi e-Commerce	515 T	Koordinasi Kebijakan atau Regulasi di bidang e-commerce	- FGD, rapat koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang e-commerce; - Identifikasi isu/permasalahan digitalisasi serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi serta UMK/IKM guna meningkatkan nilai transaksi e-commerce; - FGD, rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), serta kebijakan e-commerce di tingkat internasional lainnya.	- FGD, rapat koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang e-commerce; -Identifikasi isu/permasalahan serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi serta UMK/IKM guna meningkatkan nilai transaksi e-commerce; - FGD, rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), serta kebijakan e-commerce di tingkat internasional lainnya.	- FGD, rapat koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang e-commerce; - Identifikasi isu/permasalahan serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi serta UMK/IKM guna meningkatkan nilai transaksi e-commerce; - FGD, rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), serta kebijakan e-commerce di tingkat internasional lainnya.	- FGD, rapat koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang e-commerce; - Identifikasi isu/permasalahan serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi serta UMK/IKM guna meningkatkan nilai transaksi e-commerce; - FGD, rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), serta kebijakan e-commerce di tingkat internasional lainnya.
		1.2. Pertumbuhan Wirausaha	2,74 %	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha	- FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi - Identifikasi isu/permasalahan kebijakan - Pengumpulan data	- FGD, rapat koordinasi dan monitoring evaluasi - Analisis kebijakan terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha	- FGD, rapat koordinasi dan monitoring evaluasi - Analisis kebijakan terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha	- FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi - Penyusunan rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
		1.3. Persentase Penyelesaian	80%	Koordinasi dan Sinergi Program	Rapat Koordinasi Sinergi	Implementasi program pembinaan dari K/L dan	Implementasi program pembinaan dari K/L dan	Evaluasi program dan tindak lanjut
	1.4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Program Kartu Pra-Kerja) per tahun	595 ribu (orang)	Pelaksanaan Program Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna (Skema Normal)	- Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal pada Triwulan I Tahun 2023 - Monitoring Pelaksanaan Skema Normal Program Kartu Prakerja Triwulan I Tahun 2023	- Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal pada Triwulan II Tahun 2023 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Skema Normal Program Kartu Prakerja Semester 1 Tahun 2023	- Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal pada Triwulan III Tahun 2023 - Monitoring Pelaksanaan Skema Normal Program Kartu Prakerja Triwulan III Tahun 2023	- Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal pada Triwulan IV Tahun 2023 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Skema Normal Program Kartu Prakerja Semester 2 Tahun 2023 - Koordinasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2024 (kebijakan dan target penerima)	
		1.5. Jumlah Penyediaan Lapangan Kerja Pertama	2,7 - 3 Juta (orang)	- Percepatan pembukaan kesempatan penempatan Pekerja Migran Indonesia - Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta aturan turunannya - Percepatan penyelesaian perbaikan UU Cipta Kerja	- Pelaksanaan koordinasi kebijakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara penempatan - Monitoring dan evaluasi data penempatan PMI - Monitoring dan evaluasi jumlah penyediaan lapangan kerja berdasarkan Sakernas periode Februari 2023 - Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta aturan turunannya - Koordinasi dan Monitoring perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK	- Pelaksanaan koordinasi kebijakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara penempatan - Monitoring dan evaluasi data penempatan PMI - Monitoring dan evaluasi jumlah penyediaan lapangan kerja berdasarkan Sakernas periode Februari 2023 - Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta aturan turunannya - Koordinasi dan Monitoring perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK	- Pelaksanaan koordinasi kebijakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara penempatan - Monitoring dan evaluasi data penempatan PMI - Monitoring jumlah penyediaan lapangan kerja berdasarkan Sakernas periode Agustus 2023 - Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta aturan turunannya - Koordinasi dan Monitoring perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK	
Perspektif : Customer								
2	Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas	2.1. Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	Pelaksanaan Survei Evaluasi dan tindak lanjut hasil Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja	Pelaksanaan koordinasi Survei Evaluasi kepada Penerima Kartu Prakerja Tahun 2023	- Pelaksanaan Survei Evaluasi Tahap I - Pelaporan hasil Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja Tahap I	- Pelaksanaan Survei Evaluasi Tahap II - Pelaporan hasil Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja Tahap II	- Pelaksanaan Evaluasi hasil Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja - Pelaporan hasil Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja Tahun 2023
Perspektif : Internal Business Process								
3	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif	3.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Baik (3 dari 4)	- Koordinasi penyusunan kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMK/IKM - Monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMK/IKM - Pelaksanaan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan	- Koordinasi penyusunan kebijakan - Monitoring dan evaluasi kebijakan	- Koordinasi penyusunan kebijakan - Monitoring dan evaluasi kebijakan	- Koordinasi penyusunan kebijakan - Monitoring dan evaluasi kebijakan	- Koordinasi penyusunan kebijakan - Monitoring dan evaluasi kebijakan - Pelaksanaan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan
		3.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	75 %	Penyusunan Policy Brief dan/atau Policy Paper, dan dokumen analisis kebijakan lainnya tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMK/IKM	Pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Policy Brief dan/atau Policy Paper, dan dokumen analisis kebijakan lainnya tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMK/IKM	Pengolahan data untuk bahan penyusunan Policy Brief dan/atau Policy Paper, dan dokumen analisis kebijakan lainnya	Penyusunan analisis Policy Brief dan/atau Policy Paper, dan dokumen analisis kebijakan lainnya tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMK/IKM	Finalisasi dan Publikasi dan/atau Policy Paper, dan dokumen analisis kebijakan lainnya tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMK/IKM
Perspektif : Learning and Growth								
4	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang baik	4.1. Indeks Tata Kelola Kedeputian	3 dari 4	Pelaksanaan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Rapat terkait Monitoring dan Evaluasi Jam Pelatihan ASN, SAKIP, PMPRB, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV	Rapat terkait Monitoring dan Evaluasi Jam Pelatihan ASN, SAKIP, PMPRB, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV	Rapat terkait Monitoring dan Evaluasi Jam Pelatihan ASN, SAKIP, PMPRB, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV	Rapat terkait Monitoring dan Evaluasi Jam Pelatihan ASN, SAKIP, PMPRB, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV

**Tabel 4.4 Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output /Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2023 (Rp Ribu)
SK 1 : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas		
KRO : Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 rekomendasi kebijakan	21.678.580
RO : Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di bidang Ekonomi Digital	1 rekomendasi kebijakan	21.678.580
SK 2 : Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputi Serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal		
KRO: Layanan Umum	2 Layanan	5.321.420
RO : Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	1 Layanan	2.500.000
RO : Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	1 Layanan	2.821.420
SK 3 : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang Berkualitas		
KRO : Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
RO : Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
RO : Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
SK 4 : Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas		
KRO : Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
RO : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
RO : Rekomendasi Kebijakan dalam Peningkatan Kontribusi UMKM terhadap PDB	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
SK 5: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas		
KRO : Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	2.500.000

RO : Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.250.000
RO : Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	1 Rekomendasi Kebijakan	1.250.000
SK6 : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan		
KRO: Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 rekomendasi kebijakan	500.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	1 rekomendasi kebijakan	500.000
KRO: Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 rekomendasi kebijakan	1.500.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1 rekomendasi kebijakan	1.500.000

Pemutakhiran Rencana Strategis Kedeputan IV sesuai rekomendasi perbaikan atas Renstra di atas adalah sebagai berikut:

Penyesuaian Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis / IndikatorKinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SS.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM yang berkualitas sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional							
IKU.1	Nilai Transaksi e-Commerce	260	345	430	515	600	Triliun
IKU.2	Pertumbuhan Wirausaha	2	2,5	3	2,74	2,90	Persentase
IKU.3	Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap PDB	61	62	63	-	-	Persentase

IKU.3	Persentase Penyelesaian <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM	-	-	-	80	85	Persentase
IKU.4	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2 juta	2,2 juta	2,4 juta	595 ribu	595 ribu	Orang
IKU.5	Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	2,7	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	Juta Orang

SS.2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat

IKU.6	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
-------	--	----------	----------	----------	----------	----------	--------

SS.3 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif

IKU.7	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
IKU.8	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	75%	75%	75%	75%	80%	Persentase

SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik

IKU.9	Indeks Tata Kelola Kedeputan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
-------	------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

B. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB / Inspektorat

Tindak Lanjut atas Rencana Aksi Peningkatan Kinerja tahun sebelumnya

Sebagai tindak lanjut rencana aksi peningkatan kinerja tahun sebelumnya, beberapa hal yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:



1. Rapat evaluasi kinerja tahunan kedeputian untuk memastikan Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian Kinerja selaras dengan perkembangan lingkungan organisasi sekaligus memastikan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja akan selalu selaras dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam Rencana Strategis 2020-2024
2. Penyelenggaraan diklat/workshop/fgd oleh beberapa unit di Kedeputian IV salah satunya FGD Transformasi gerakan koperasi sebagai tindak lanjut peningkatan kapasitas SDM melalui talent centre
3. Penyusunan pelaporan kinerja secara berkala kepada pimpinan sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
4. Pelaksanaan dialog kinerja pada tingkat unit organisasi secara rutin dan fokus kepada realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

5. Rapat koordinasi terkait sasaran kinerja bersama perwakilan Pemprov Jawa Barat sebagai tindak lanjut Benchmarking kepada unit eselon I atau instansi pemerintah lainnya yang memperoleh skor SAKIP tertinggi.
6. Keikutsertaan anggota tim RB dan Agen perubahan dalam pembahasan inovasi kerja sebagai tindak lanjut peningkatan peran Anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan dalam peningkatan kinerja Unit Organisasi.
7. Penyusunan dokumen Manajemen Risiko sampai dengan level Unit Eselon II untuk memitigasi risiko dalam pencapaian target kinerja

Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Kemenko Perekonomian Nomor: PW.04.01/15/INS.M.EKON/01/2023 tentang Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 pada tanggal 11 Januari 2023, Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 dengan tujuan antara lain: a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; d) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi SAKIP ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh unit kerja (Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014).

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Dalam hal ini, pencapaian kinerja evaluasi atas hal-hal tersebut dilakukan terhadap implementasi SAKIP yang dilaksanakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Adapun hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2021 maka diperoleh nilai total sebesar 85,32 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	40%	36.48
2	Pengukuran Kinerja	40%	32.49
3	Pelaporan Kinerja	20%	16.36
Total Nilai			85.32

Hasil Evaluasi SAKIP Deputi IV 2021

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2021 menunjukkan kategori A (Memuaskan) dengan nilai sebesar 85,32. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,35 dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai sebesar 82,97. Lebih detail, di bawah ini adalah tabel perbandingan antara nilai dan

sub nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2021 dengan SAKIP tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai berikut:

Tabel 4.5 Perbandingan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

NO	2020		2021		STATUS
	KOMPONEN	Nilai	Komponen	Nilai	
1	PERENCANAAN KINERJA (30%)	26,30	PERENCANAAN KINERJA (40%)	36,38	Naik
	i.Perencanaan Strategis (10%)	9	a. Keberadaan (8%)	8	
	ii.Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	17,30	b. Kualitas (12%)	11,81	
			c. Pemanfaatan (20%)	16,67	
2	PENGUKURAN KINERJA (25%)	21,69	PENGUKURAN KINERJA (40%)	32,49	Naik
	i.Pemenuhan Pengukuran (5%)	4,69	a. Keberadaan (8%)	7,67	
	ii.Kualitas Pengukuran (12,5%)	12,50	b. Kualitas (12%)	12	
	iii.Implementasi Pengukuran (7,5%)	4,50	c. Pemanfaatan (20%)	12,81	
3	PELAPORAN KINERJA (15%)	13,98	PELAPORAN KINERJA (20%)	16,36	Naik
	i.Pemenuhan Pelaporan (3%)	2,25	a. Keberadaan (4%)	4	
	ii.Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7,23	b. Kualitas (6%)	5,27	
	iii.Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4,50	c. Pemanfaatan (10%)	7,08	

4	EVALUASI INTERNAL (10%)	7,67	-		
	i.Pemenuhan Evaluasi (2%)	2			
	ii.Kualitas Evaluasi (5%)	4,17			
	iii.Pemanfaatan Evaluasi (3%)	1,50			
5	CAPAIAN KINERJA (20%)	13,33	-		
	i.Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (5%)	3,33			
	ii.Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (15%)	10			
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		82,97		85,32	Naik

Dengan demikian melalui tabel perbandingan hasil evaluasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM di atas dapat diketahui semua poin mengalami peningkatan penilaian. Sehingga berdasarkan hasil perbandingan tersebut, terdapat beberapa hal yang masih harus ditingkatkan dan di tindaklanjuti untuk semakin meningkatkan performa implementasi SAKIP di Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun berikutnya antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut pada Perencanaan Kinerja

Berdasarkan penilaian pada Komponen Perencanaan Kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mengalami kenaikan dengan nilai 36,38 dimana Sub Komponen Keberadaan (8%) mendapat nilai 8, Sub Komponen Kualitas (12%)

mendapat nilai 11,81, dan Sub Komponen Pemanfaatan (20%) mendapat nilai 16,67

Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berkomitmen untuk terus mempertahankan performa dalam hal penyusunan Perencanaan Kinerja baik dan berkesinambungan antara perencanaan strategis dengan Perencanaan Kinerja Tahunan. Dengan demikian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berjanji untuk terus menindaklanjuti dan mengikuti setiap arahan maupun petunjuk yang diberikan oleh Kemenpan RB maupun Biro Perencanaan Kemenko Perekonomian tentang bagaimana menyusun perencanaan kinerja yang baik sesuai harapan bersama.

Beberapa hal sebagai tindak lanjut dalam perencanaan kinerja antara lain:

- a. Evaluasi dokumen perencanaan kinerja sehingga dapat memenuhi standar yang baik yaitu indikator kinerja memenuhi kriteria SMART
- b. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara tepat waktu di awal tahun sehingga setiap pegawai memiliki komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- c. Penyelarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi melalui penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan level pelaksana.

Selain itu, Target Kinerja yang diperjanjikan juga menjadi dasar dari adanya program Employee of the Month (EOM) yang diadakan setiap bulan oleh Kedeputian IV sebagai reward bagi pegawai yang berkontribusi dengan baik dalam mendukung pencapaian target kinerja. Selain itu, Dokumen Rencana Strategis maupun Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi IV telah dipublikasikan dalam media/portal

resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui website 2021.kinerja.ekon.go.id.

Mekanisme monitoring Renstra secara periodik diwujudkan melalui Rapat Evaluasi Kinerja Kedeputian yang diselenggarakan setiap akhir tahun. Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi secara triwulan telah dilaporkan pada Laporan Kinerja Triwulanan yang mencakup tentang analisis keberhasilan dan status pelaksanaan Rencana Aksi dan solusi alternatif atas Rencana Aksi yang tidak dilakukan.

2. Tindak Lanjut Pengukuran Kinerja

Berdasarkan penilaian pada Komponen Pengukuran Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mengalami kenaikan nilai dengan nilai 32,49 dimana Sub Komponen Keberadaan (8%) mendapat nilai 7,67, Sub Komponen Kualitas (12%) mendapat nilai 12, dan Sub Komponen Pemanfaatan (20%) mendapat nilai 12,81.

Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berkomitmen untuk dapat meningkatkan performa dalam hal pengukuran kinerja yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan nilai SAKIP, tetapi juga untuk meningkatkan pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja internal Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Dengan demikian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berjanji untuk terus berkoordinasi dengan baik kepada stakeholder terkait pengukuran kinerja baik di kalangan internal maupun eksternal kantor Kemenko Perekonomian.

Beberapa hal sebagai tindak lanjut dalam pengukuran kinerja antara lain:

- a. Evaluasi dokumen Manual IKU sehingga dapat disusun dengan tepat.
- b. Penyusunan aturan tentang punishment pada Kedeputian IV dengan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian disinsentif
- c. Pemberian pemahaman pada pegawai dalam unit kerja atas hasil pengukuran kinerja
- d. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, ditunjukkan pada narasi Nota Dinas saat dilakukan penyesuaian anggaran
- e. Penyusunan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) melalui website kinerja 2021.kinerja.ekon.go.id. Selain itu, hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan untuk menyesuaikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran.

3. Tindak Lanjut Pelaporan Kinerja

Berdasarkan penilaian pada Komponen Pelaporan Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mengalami peningkatan nilai sebesar 16,36 dimana Sub Komponen Keberadaan (4%) mendapat nilai 4, Sub Komponen Kualitas (6%) mendapat nilai 5,27, dan Sub Komponen Pemanfaatan (10%) mendapat nilai 7,08

Dalam hal pelaporan kinerja, beberapa hal sebagai tindak lanjut antara lain:

- a. Penyusunan informasi mengenai analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional pada dokumen laporan kinerja
- b. Penyusunan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada dokumen laporan kinerja
- c. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka optimalisasi capaian kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, akan dilaksanakan rencana aksi peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dengan para pemangku kepentingan maupun mitra kerja pusat dan daerah dengan memperluas aksesibilitas koordinasi;
2. Memastikan Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian Kinerja selaras dengan perkembangan lingkungan organisasi.
3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui talent centre berupa penyelenggaraan diklat/workshop/FGD
4. Memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja akan selalu selaras dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam Rencana Strategis 2020-2024
5. Mengefektifkan penyampaian hasil monitoring implementasi kinerja bulanan dan triwulanan untuk dilaporkan secara berkala kepada

pimpinan sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

6. Mengoptimalkan pelaksanaan dialog kinerja pada tingkat unit organisasi untuk dapat dilaksanakan secara rutin dan fokus kepada realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.
7. Benchmarking kepada unit eselon I atau instansi pemerintah lainnya yang memperoleh skor SAKIP tertinggi.
8. Bersama-sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai level yang sama dan pola pikir yang sejalan dalam merumuskan kebijakan.
9. Meningkatkan peran Anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan dalam peningkatan kinerja Unit Organisasi.
10. Mengevaluasi dokumen Manajemen Risiko sampai dengan level Unit Eselon II untuk memitigasi risiko dalam pencapaian target kinerja

Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya sekaligus sebagai saran evaluasi akuntabilitas kinerja.



BAB

05

PENUTUP



A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan misi dan pencapaian visi Kementerian. Laporan kinerja ini juga adalah laporan periode terakhir pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran program organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di tahun 2022, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Kinerja tersebut didukung dengan capaian realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan

UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2022 sebesar 99,93% dari total pagu anggaran.

B. Harapan dan Tindak Lanjut

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi yang akan berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja sebaiknya terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas. Untuk itu, beberapa rencana aksi tindak lanjut perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja kedepannya, antara lain:

1. Meningkatkan peran dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan terkait ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan dalam diklat-diklat terkait tugas dan fungsi Deputy IV, guna mendukung efektifitas kinerja pegawai;
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan hingga Pelaporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM.





**LAM
PIRAN**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL,
KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Rudy Salahuddin

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Mohammad Rudy Salahuddin

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL,
KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Perspective: Stakeholder			
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas	1.1. Nilai Transaksi <i>e-Commerce</i>	430 T
		1.2. Pertumbuhan Wirausaha	3 %
		1.3. Kontribusi UMKM Terhadap PDB	63 %
		1.4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2,4 Juta (orang)
		1.5. Penyediaan Lapangan Kerja Per tahun	2,7-3 Juta (orang)
Perspective: Customer			
2.	Terwujudnya Program Kartu Pra kerja yang Berkualitas	2.1. Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4
Perspective: Internal Business Process			
3.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengendalian yang Efektif	3.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Baik (3 dari 4)
		3.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	75 %
Perspective: Learning and Growth			
4.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang Baik	4.1. Indeks Tata Kelola Kedeputian	3 dari 4

Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

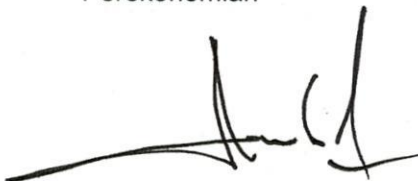
Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	Rp	7.000.000.000
2. Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	Rp	2.000.000.000
3. Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM	Rp	1.500.000.000
4. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	2.500.000.000
5. Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	Rp	1.500.000.000
	Rp	14.500.000.000

Empat belas miliar lima ratus juta rupiah

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

Jakarta, Januari 2022
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah



Mohammad Rudy Salahuddin

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL,
KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif : Stakeholder								
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.	Nilai Transaksi e-Commerce	430 T	Koordinasi Kebijakan atau Regulasi di bidang <i>e-commerce</i>	-FGD, rapat koordinasi,terkait pengumpulan data ecommerce; -Identifikasi isu/permasalahan kebijakan terkait e-commerce dan digitalisasi sentra UMK/IKM (ekosistem digital dan transformasi digital); -FGD, rapat koordinasi, kebijakan ekosistem ekonomi digital (literasi dan inovasi) dan transformasi digital (sektor private), termasuk e-commerce di tingkat internasional.	-FGD, rapat koordinasi,dan monitoring pengumpulan data ecommerce; -Rapat koordinasi perkembangan kebijakan ekosistem ekonomi digital (literasi dan inovasi) dan transformasi digital (sektor private) di tingkat regional dan internasional	-FGD, rapat koordinasi,dan monitoring pengumpulan data ecommerce; -Rapat koordinasi dan monitoring perkembangan kebijakan ekosistem ekonomi digital (literasi dan inovasi) dan transformasi digital (sektor private) di tingkat regional dan internasional	-Rapat koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pengumpulan data ecommerce; -Penyusunan rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan terkait ekosistem digital (literasi dan inovasi) dan transformasi digital (sektor private).
		Pertumbuhan Wirausaha	3 %	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha	•FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi •Identifikasi isu/permasalahan kebijakan •Pengumpulan data	•FGD, rapat koordinasi dan monitoring evaluasi •Analisis kebijakan terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha	•FGD, rapat koordinasi dan monitoring evaluasi •Analisis kebijakan terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha	•FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi •Penyusunan rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
		Kontribusi UMKM Terhadap PDB	63%	Koordinasi dan Sinergi Program Pengembangan UMKM melalui Pendekatan Klaster	•Rapat Koordinasi Sinergi Pengembangan Program Klaster UMKM	•Implementasi program pembinaan dari K/L dan Pemda ke Klaster UMKM •Rapat Monitoring perkembangan dan Perbaikan/ Penyempurnaan Program	•Implementasi program pembinaan dari K/L dan Pemda ke Klaster UMKM •Rapat Monitoring perkembangan dan Perbaikan/ Penyempurnaan Program	Evaluasi program dan tindaklanjut

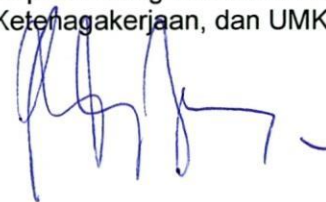
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022	• Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022	•Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022	•Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022	Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022
		Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2,4 Juta (orang)	Pelaksanaan program kartu prakerja skema semi bansos dan transisi program dari skema semi bansos ke skema normal	Pelaksanaan program kartu prakerja skema semi bansos Penyiapan revisi regulasi berupa Perpres dan Permenko terkait persiapan pelaksanaan skema normal dan sesuai rekomendasi masukan BPK	Pelaksanaan program kartu prakerja skema semi bansos Persiapan pelaksanaan program kartu prakerja skema normal Pematangan proses kemitraan dengan lembaga pelatihan dan stakeholder terkait (tambahin ekosistem prakerja) fokus program prakerja dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi (skema normal) Pemantapan (dicek) kesiapan Lembaga Pelatihan, Platform Digital, (ekosistem)	•Pelaksanaan program kartu prakerja skema normal	•Evaluasi efektivitas proses pelaksanaan program kartu prakerja skema normal
		Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	2,7 - 3 Juta (orang)	•Percepatan pembukaan penempatan Pekerja Migran Indonesia •Perluasan kesempatan kerja •Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan	•Pelaksanaan koordinasi kebijakan pembukaan kembali Penempatan Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara penempatan •Monitoring percepatan penyelesaian Kerjasama penempatan Pekerja Migran Indonesia	•Pelaksanaan koordinasi kebijakan pembukaan kembali Penempatan Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara penempatan •Monitoring percepatan penyelesaian Kerjasama penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan beberapa negara penempatan	•Pelaksanaan koordinasi kebijakan pembukaan kembali Penempatan Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara penempatan •Monitoring percepatan penyelesaian Kerjasama penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan beberapa negara penempatan	•Pelaksanaan koordinasi kebijakan pembukaan kembali Penempatan Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara penempatan •Monitoring percepatan penyelesaian Kerjasama penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan beberapa negara penempatan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				beserta aturan turunannya •Percepatan penyelesaian perbaikan UU Cipta Kerja	dengan beberapa negara penempatan •Monitoring dan evaluasi jumlah penempatan PMI berdasarkan data SISMONEV periode TW I dan data dari stakeholder terkait •Melakukan pengolahan data terkait jumlah penempatan PMI, remitansi, permintaan negara tujuan, dan data lainnya •Evaluasi jumlah penyediaan lapangan kerja berdasarkan Sakernas periode Agustus 2021 •Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta aturan turunannya •Koordinasi dan Monitoring perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK	•Monitoring dan evaluasi jumlah penempatan PMI berdasarkan data SISMONEV periode TW II dan data dari stakeholder terkait •Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait update rencana perluasan penempatan PMI. •Monitoring dan evaluasi jumlah penyediaan lapangan kerja berdasarkan Sakernas periode Februari 2022 •Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta aturan turunannya •Koordinasi dan Monitoring perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK	•Monitoring dan evaluasi jumlah penempatan PMI berdasarkan data SISMONEV periode TW III dan data dari stakeholder terkait •Pelaksanaan koordinasi kebijakan perluasan kesempatan kerja •Monitoring dan evaluasi jumlah penyediaan lapangan kerja berdasarkan Sakernas periode Februari 2022 •Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta aturan turunannya •Koordinasi dan Monitoring perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK	•Monitoring dan evaluasi jumlah penempatan PMI berdasarkan data SISMONEV periode TW IV dan data dari stakeholder terkait •Monitoring jumlah penyediaan lapangan kerja berdasarkan Sakernas periode Agustus 2022 •Pelaksanaan koordinasi kebijakan perluasan kesempatan kerja •Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan beserta aturan turunannya •Koordinasi dan Monitoring perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK
Perspektif : Customer								
2	Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	Evaluasi dan tindak lanjut hasil survey program kartu prakerja	Evaluasi dengan Manajemen Pelaksana terkait hasil survey Penerima Kartu Prakerja Tahun 2021 Penyusunan Daftar Pertanyaan Survey yang akan diberikan kepada Penerima Kartu Prakerja tahun 2022	Pelaksanaan Survey Evaluasi oleh Manajemen Pelaksana Evaluasi dampak program kartu prakerja berdasarkan hasil survey	Pelaksanaan Survey Evaluasi oleh Manajemen Pelaksana Evaluasi dampak program kartu prakerja berdasarkan hasil survey	Pelaksanaan Survey Evaluasi oleh Manajemen Pelaksana Evaluasi dampak program kartu prakerja berdasarkan hasil survey Tindak lanjut hasil survey evaluasi yang

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
					Finalisasi Penyusunan Daftar Pertanyaan Survey Pelaksanaan Survey Evaluasi oleh Manajemen Pelaksana			telah dilaksanakan di tahun 2022
Perspektif : Internal Business Process								
3	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang Efektif	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Baik (3 dari 4)	•Koordinasi penyusunan kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM •Monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	•Koordinasi penyusunan kebijakan •Monitoring dan evaluasi kebijakan •Melakukan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan	Koordinasi penyusunan kebijakan Monitoring dan evaluasi kebijakan Melakukan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan	Koordinasi penyusunan kebijakan Monitoring dan evaluasi kebijakan Melakukan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan	Koordinasi penyusunan kebijakan Monitoring dan evaluasi kebijakan Melakukan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan
		Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	75 %	Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper/Monograf Kebijakan tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	•Pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Policy Brief tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM •Pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Policy Paper tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM •Pencarian informasi sebagai bahan penyusunan makalah tentang Ekonomi Digital,	•Pengolahan data bahan penyusunan Policy Brief •Pengolahan data bahan penyusunan Policy Paper •Penyusunan analisis Policy Paper tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM •Penyusunan Draft Policy Brief tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	-Penyusunan analisis Policy Paper tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM -Penyusunan analisis Policy Brief tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM -Publikasi Policy Brief tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	-Publikasi Policy Brief tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM -Publikasi Policy Brief tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM -Publikasi Policy Paper/Monograf tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM -Publikasi Policy Paper/Monograf tentang Ekonomi Digital,

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
					Ketenagakerjaan, dan UMKM			Ketenagakerjaan, dan UMKM
Perspektif : Learning and Growth								
4	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang baik	4.1 Indeks Tata Kelola Kedeputian	3 dari 4	-Monitoring Indeks Profesionalitas ASN Deputy IV -Penyusunan Perjanjian Kinerja dan IKU Tahun 2022 -Capacity Building Deputy IV -Dialog Kinerja Deputy IV -Penyusunan Rencana Aksi RB Deputy IV Tahun 2022 -Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Deputy VI Tahun 2022	-Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Deputy IV Tahun 2022 -Diskusi kebutuhan Pelatihan Deputy IV Tahun 2022 -Dialog Kinerja Deputy IV -Rapat Penyusunan LAKIP 2021 -Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB Deputy IV Tahun 2022 -Rapat Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Deputy IV Tahun 2022	-Capacity Building Deputy IV -Rapat Evaluasi Renstra Deputy Tahun 2020-2024 -Rapat Internal Tim RB dan Agen Perubahan Deputy IV -Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Deputy IV	-Rapat Evaluasi Indeks Kualitas Profesionalitas ASN Deputy IV -Rapat Evaluasi Pelaksanaan RB Deputy IV Tahun 2022 -Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Deputy IV Tahun 2022	-Rapat Kerja Tahunan Deputy IV -Rapat Evaluasi pelaksanaan Pelatihan Tahun 2022 -Rapat Internal Tim RB dan Agen Perubahan -Rapat Penyusunan Narasi Capaian Tahun 2022 -Rapat Penyusunan Renja Deputy IV Tahun 2023 -Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Deputy IV Tahun 2022

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM



Mohammad Rudy Salahuddin

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: 1

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perspektif

(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis

SS.1. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Kebijakan bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas adalah kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang dihasilkan dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan disertai dengan pengendalian kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1. Nilai Transaksi e-Commerce

Deskripsi IKU

Definisi
Nilai Transaksi e-Commerce adalah nilai dari transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan internet atau platform e-commerce dan target tiap tahunnya berdasarkan dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan meningkatnya Nilai Transaksi e Commerce dapat diketahui bahwa berhasilnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan penguatan ekonomi digital. Hal ini meliputi adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa, baik antara bisnis, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik atau swasta lainnya, yang dilakukan melalui jaringan internet. Pengukuran IKU ini dilakukan terhadap program atau kegiatan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyusunan strategi ekonomi digital yang mendorong peningkatan nilai transaksi e-commerce
Formula
Jumlah nilai transaksi e-commerce diambil dari data Bank Indonesia yang diperbaharui setiap 3 bulan (triwulan)
Tujuan
Mendorong penyusunan strategi ekonomi digital untuk peningkatan nilai transaksi e-commerce dalam rangka terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Satuan Pengukuran

Rupiah

Unit/Pihak Penyedia Data

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Direktur Neraca Pengeluaran BPS, Direktur Bidang Statistik BI

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM

Sumber Data

Laporan Transaksi Nilai Transaksi e-Commerce Tahunan dari Bank Indonesia

Tingkat Kendali IKU

(....) High (....) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct (....) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	260 T	232,6 T	345 T	401 T	430 T

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perspektif

(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis

SS.1. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Kebijakan bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas adalah kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang dihasilkan dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan disertai dengan pengendalian kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.2. Pertumbuhan wirausaha

Deskripsi IKU

Definisi

Pertumbuhan Wirausaha merupakan tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha diharapkan dapat mendorong kuantitas dan kualitas UMKM sehingga berdampak pada kontribusi UMKM terhadap Product Domestic Bruto (PDB). Kewirausahaan dan UMKM adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. UMKM merupakan suatu kegiatan usaha bisnis dari perwujudan kewirausahaan.

Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi salah satu aspek pertumbuhan ekonomi. Wirausaha baru merupakan wirausaha yang memiliki rencana usaha dan sudah memulai kegiatan berwirausaha dalam jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak pendirian usaha, yang telah dicatatkan (terregistrasi) pada lembaga perizinan yang ditetapkan atau dalam sistem informasi kewirausahaan. Prosedur penciptaan wirausaha baru bertujuan untuk meningkatkan warausaha baru yang bertahan dengan memanfaatkan peran dari inkubasi bisnis, pendampingan usaha, dan pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Mitra, Penyedia Layanan Teknis Pendampingan Usaha, dan Inkubator Bisnis.

Formula

Capaian kinerja Realisasi pertumbuhan wirausaha diperoleh dari formula capaian pertumbuhan wirausaha yaitu:=

$$\frac{\text{Jumlah wirausaha tahun (n)} - \text{jumlah wirausaha tahun (n-1)}}{\text{jumlah wirausaha tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Jumlah wirausaha diambil dari data Jumlah Berusaha dibantu Buruh Tetap yang terdapat dalam Sakernas BPS/Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia.

Tujuan

Mengukur capaian kinerja terwujudnya kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Persentase (%)

Unit/Pihak Penyedia Data

BPS, Kemenkop UKM

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM

Sumber Data

Data Sakernas BPS, Sistem Informasi Kewirausahaan Kemenkop UKM

Tingkat Kendali IKU

(...) High (...) Moderate (x) Low

Tingkat Validitas IKU

(....) Exact (X) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (.....) Average (x) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(x) Direct (...) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	2%	N/A	2,5%	1,8%	3%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN UMKM

Perspektif	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	SS.1. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Kebijakan bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas adalah kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang dihasilkan dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan disertai dengan pengendalian kebijakan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.3. Kontribusi UMKM Terhadap PDB
Deskripsi IKU	Definisi Kontribusi UMKM Terhadap PDB merupakan kontribusi nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Nasional sesuai dengan indikator atas sasaran penguatan kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi dalam RPJMN 2020-2024. Dukungan tercapainya kontribusi UMKM terhadap PDB melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan UMKM diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengingat bahwa sebagian besar usaha di Indonesia berskala UMKM. Formula Data didapat dari Kementerian Koperasi dan UKM, BPS, dan Kemenkeu. Adapun persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB dapat diestimasi melalui perhitungan total nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi berskala UMKM dibanding terhadap total nilai Produk Domestik Bruto Nasional lalu dikalikan 100%. Namun dalam hal data tersebut belum dipublikasikan maka akan dilakukan perhitungan mandiri (data estimasi). Tujuan Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penambahan nilai ekonomi UMKM
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Kemenkop UKM, BPS, Kemenkeu. Namun dalam hal data tersebut belum dipublikasikan maka akan dilakukan perhitungan mandiri (data estimasi).
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM
Sumber Data	Laporan dan/atau data Kemenkop UKM Data BPS Data Kemenkeu
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (....) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(.....) Exact (X) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (....) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	61%	60,51%	62%	62,36 %	63%

KODE IKU: S.1

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN UMKM

Perspektif	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	SS.1. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Kebijakan bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas adalah kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang dihasilkan dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan disertai dengan pengendalian kebijakan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (pelaksanaan kartu pra kerja) per tahun
Deskripsi IKU	Definisi
	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) merupakan jumlah peserta penerima Kartu Prakerja yang telah mengikuti pelatihan. Dengan meningkatnya jumlah lulusan Pelatihan Vokasi melalui Program Kartu Prakerja, akan ada peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja / kewirausahaan bagi masyarakat penerima manfaat Program Kartu Prakerja sehingga memperluas kesempatan terserap di pasar kerja, dan pengembangan kewirausahaan.
	Formula
	Pengukuran ketercapaian target dari sasaran Indikator Kinerja Program tersebut dapat dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi melalui pelaksanaan Program Kartu Prakerja setiap tahun
	Tujuan
	Program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dan mengembangkan kewirausahaan.
Satuan Pengukuran	Orang
Unit/Pihak Penyedia Data	Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM
Sumber Data	Database Sistem Informasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
Tingkat Kendali IKU	(X) High (....) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(X) Sum (....) Average (....) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (....) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Target	Realsiasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	2 juta orang	5,5 juta orang	2,2 juta orang	2,64 juta orang	2,4 juta orang
s.d. Triwulan I					
s.d. Triwulan II					
s.d. Triwulan III					
s.d. Triwulan IV					

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Perspektif	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	SS.1. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Kebijakan bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas adalah kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yang dihasilkan dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan disertai dengan pengendalian kebijakan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.5. Jumlah Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun
Deskripsi IKU	Definisi Penyediaan lapangan kerja merupakan penambahan bidang kegiatan dari suatu usaha/perusahaan/instansi yang membutuhkan tenaga kerja dalam kompetensi dan jumlah tertentu. Penyediaan lapangan kerja dapat dicapai salah satunya melalui perbaikan regulasi/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan. Penyediaan Lapangan Kerja per tahun merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk pencari kerja. Dengan meningkatnya Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada PDB Nasional melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Formula Penambahan Jumlah Tenaga Kerja Selama Setahun = Jumlah Tenaga Kerja Tahun n – Jumlah Tenaga Kerja Tahun n-1 Tujuan Meningkatnya Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat
Satuan Pengukuran	Orang
Unit/Pihak Penyedia Data	1. Badan Pusat Statistik 2. Kementerian Ketenagakerjaan
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
Sumber Data	1. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Periode Agustus 2. Sistem Informasi Ketenagakerjaan milik Kemenaker
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (.....) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (.....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (.....) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Target	Target	Target	Realisasi	Target
Tahunan	2,7 Juta Orang	2,7 Juta Orang	2,7 Juta Orang	2,59 juta orang	2,7 - 3 Juta Orang

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM
Kemenko Perekonomian

KODE IKU: C1

Perspektif

(...) Stakeholder (x) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis

SS.2. Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat

Deskripsi Sasaran Strategis

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah (termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil).

Melalui pelatihan yang berkualitas dan tepat sasaran, diharapkan program ini bermanfaat bagi peserta penerima program dengan adanya peningkatan keterampilan, kompetensi, produktivitas, dan daya saing bagi penerima manfaat.

Selain mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dan keterampilan, penerima manfaat juga mendapatkan insentif pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli penerima manfaat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.2.1. Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja

Deskripsi IKU

Definisi

Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Kartu Prakerja terhadap Program Kartu Prakerja merupakan tingkat kepuasan penerima Kartu Prakerja terhadap pelaksanaan keseluruhan Program Kartu Prakerja mulai dari proses awal (pendaftaran) sampai dengan proses akhir (insentif survey),

Survey ini dilakukan kepada seluruh penerima Kartu Prakerja secara bertahap.

Survey ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan dalam mendaftar, ketepatan sasaran program, ketepatan substansi pelatihan (skilling, reskilling, upskilling), dan pemanfaatan insentif survey yang diukur melalui beberapa pertanyaan pada saat survey dilakukan (persentase).

Terkait ketepatan sasaran program, diajukan beberapa pertanyaan seperti peserta menganggur apa tidak, umur, pekerja terdampak COVID apa tidak, pendidikan, jenis kelamin, pendapatan per bulan.

Terkait tepat substansi (skilling, reskilling, upskilling) di ajukan beberapa pertanyaan terkait apakah pelatihan yang diambil mengajarkan skill baru atau tidak (upskilling), apakah pelatihan yang diikuti sudah diperoleh sebelumnya (skilling), apakah pelatihan mengajarkan cara/strategi baru untuk bekerja/berwirausaha (upskilling), apakah pelatihan yg diikuti memberikan kepercayaan diri untuk melamar pekerjaan lebih banyak (reskilling)

Terkait pelatihan, apakah pelatihan yang ditawarkan di dalam Program Kartu Prakerja, berkualitas, beragam, relevan dan harga bersaing atau tidak.

Terkait insentif, diajukan beberapa pertanyaan terkait jumlah insentif dan ketepatan waktu, terus manfaat dari insentif tersebut.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuisioner yang telah diisi oleh koresponden dengan 4 kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak puas, (2) Tidak puas, (3) Puas, (4) Sangat Puas

Formula

Mengukur indikator tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap Program Kartu Prakerja dengan melakukan survey kepada seluruh penerima Program Kartu Prakerja.

	Tujuan
	Mengukur tingkat kepuasan penerima manfaat Program Kartu Prakerja
Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
Pejabat Penanggung Jawab Data	Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
Sumber Data	Database sistem informasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
Tingkat Kendali IKU	(...) High (x) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(x) Exact (.....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(x) Sum (.....) Average (.....) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(x) Direct (.....) Indirect
Polarisasi IKU	(x) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(..) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan I					
s.d. Triwulan II					
s.d. Triwulan III					
s.d. Triwulan IV					

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: IB.3.2

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN UMKM, KETENAGAKERJAAN, DAN UMKM

Perspektif : (...) Stakeholder (...) Customer (X) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : SS.3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif merupakan sasaran strategis prespektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis prespektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup (a)koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b)pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian; (d) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet; (e) penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm yang berkualitas". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.3.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Deskripsi IKU

Definisi

Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang fasikal diperlukan analisa kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) dan karya tulis ilmiah (*policy brief*, *policy paper*, artikel kebijakan dan makalah). IKU Persentase Penyelesaian Analisa Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm merupakan indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian atas analisa kebijakan yang ditargetkan. Pada tahun 2022, Kedeputian Bidang koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm menargetkan menyusun 5 analisa kebijakan.

Dengan terpenuhinya Indikator kinerja ini, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di lingkungan Deputi Bidang koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm namun juga diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan Kompetensi ASN yang merupakan "*ultimate indicator*" pada sasaran strategis di level Kementerian.

Formula

$$\text{Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan} = \frac{\sum \text{Dokumen Analisis Kebijakan yg dihasilkan}}{\sum \text{Dokumen Analisis Kebijakan yg ditargetkan}} \times 100\%$$

Tujuan

Mengukur tingkat capaian penyusunan kajian dan analisa kebijakan dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Deputi bidang koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi bidang koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm

Sumber Data

:

Laporan Daftar Hasil Analisis Kebijakan di Deputi bidang koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm beserta Lampirannya

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(..) Exact (X) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	75
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: IB.3.1

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN UMKM, KETENAGAKERJAAN, DAN UMKM

Perspektif : (...) Stakeholder (...) Customer (X) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : SS.3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif merupakan sasaran strategis prespektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis prespektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup (a)koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b)pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian; (d) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet; (e) penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm yang berkualitas". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.3.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Ditindaklanjuti

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait puas dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan.

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan di bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

- Sangat Baik, rentang nilai 85 – 100 (4)
- Baik, rentang nilai 75 – 84 (3)
- Cukup, rentang nilai 65 – 74 (2)
- Kurang, rentang nilai <65 (1)

Adapun nilai dari indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm diperoleh melalui penilaian dari 2 (dua) sub indikator :

Sub indikator pertama, merupakan Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm yang ditindaklanjuti. Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh unit kerja sebagai hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, dan penyelesaian permasalahan antar Kementerian, pelaksanaan pengendalian kebijakan, pengawalan program prioritas, dan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L terkait kebijakan tersebut.

Adapun Instrumen kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L antara lain :

- Peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kantor Kemenko Perekonomian (PP, Perpres, Permenko, dll)
- Regulasi yang dihasilkan oleh Presiden dan K/L lain sebagai dampak/tindakanlanjutan dari hasil proses dan koordinasi yang dikeluarkan kantor Kemenko Ekon

3. Surat dari K/L terkait
4. Kesepakatan kerjasama ekonomi internasional
5. Notula Rapat yang diselenggarakan oleh Presiden melalui Ratas atau K/L terkait sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian

Adapun Instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh menko perekonomian antara lain :

1. Rumusan kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas/Surat Keluar);
2. Siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor Kemenko Perekonomian; dan/atau
3. Draft Kesepakatan kerja sama ekonomi hasil pertemuan internasional yang dipimpin/inisiasi oleh Kemenko Perekonomian
4. Risalah/notulensi/Berita Acara Kegiatan rapat koordinasi level Menteri/Deputi/Asisten Deputi

Sub indikator pertama memiliki nilai maksimal 80 dengan perhitungan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang dihasilkan dikali dengan 80.

Sub indikator kedua, merupakan indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Pada sub indikator ketiga ini, variabel indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi bidang koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Untuk sub indikator kedua. Indeks kepuasan layanan koordinasi dapat di buktikan dengan penghargaan atau apresiasi dari pihak luar yang kredibel. Apabila unit kerja telah mendapatkan penghargaan atau apresiasi tersebut, maka unit kerja tidak perlu melakukan survey kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian; dan langsung memperoleh nilai bobot pengukuran secara penuh yaitu 20 point.

Formula

Sub indikator pertama, yaitu Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm yang ditindaklanjuti. Sub indikator pertama memiliki nilai maksimal 80 dengan perhitungan jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kebijakan yang dihasilkan dikali dengan 80. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

Langkah Pertama:

- 1) Mencari Persentase

$$\text{Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti} = \left(\frac{\sum \text{Kebijakan yg ditindaklanjuti}}{\sum \text{Kebijakan yg dihasilkan}} \right) \times 100\%$$

- 2) Konversi dari persentase ke bobot 80

$$\text{Konversi} = \left(\frac{\text{Angka Bilangan asli pada \% Kebijakan yg ditindaklanjuti}}{100} \right) \times 80$$

Selanjutnya akan didapatkan angka final dari Bobot Maksimal 80

Sub indikator kedua, yaitu indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Sub indikator ketiga memiliki nilai maksimal 20 dengan perhitungan realisasi dikali dengan 20. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sebagai berikut:

- 1) Mencari angka indeks

$$\begin{aligned} &\text{Indeks Kepuasan Layanan} \\ &\text{Koordinasi, Sinkronisasi dan} \\ &\text{Pengendalian untuk satu kali} \\ &\text{penyebaran survei} \end{aligned} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right)$$

- 2) Mencari rerata angka indeks

$$\text{Rerata nilai indeks kepuasan} = \frac{\sum \text{Indeks Kepuasan dari seluruh survei yang dilakukan}}{\sum \text{Jumlah Frekuensi Survei dilakukan}}$$

- 3) Konversi angka indeks ke bobot 20

$$\text{Bobot indeks kepuasan layanan} = \left(\frac{\text{Rerata Nilai Indeks Kepuasan}}{4} \right) \times 20$$

Nilai akhir untuk menentukan posisi indeks adalah akumulasi nilai sub indikator ke 1 (satu) ditambah dengan nilai sub indikator ke 2 (dua) dengan bobot maksimal 100, kemudian dicocokkan dengan tabel skala untuk mengetahui skala dan kategori indeks yang didapatkan.

Tujuan

	Mengukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm menodorong terciptanya kebijakan yang berkualitas
Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	Deputi bidang koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi bidang koordinasi Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm
Sumber Data	: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	: (X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	Baik
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN UMKM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: LG1

Perspektif

(...) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (X) Learning & Growth

Sasaran Strategis

SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Deskripsi Sasaran Strategis

Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memerlukan pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga merupakan hubungan antara para pemangku kepentingan (Stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan organisasi, termasuk pelaksanaan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.4.1. Indeks Tata Kelola Kedeputian

Deskripsi IKU

Definisi

Indeks tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM merupakan turunan dari indikator tata kelola kementerian yakni indeks tata kelola kementerian yang menggambarkan

Indeks tata kelo Deputy dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

- a. Sangat Baik, rentang nilai 85 – 100 (Indeks 4 dari 4)
- b. Baik, rentang nilai 75 – 84 (Indeks 3 dari 4)
- c. Buruk, rentang nilai 65 – 74 (Indeks 2 dari 4)
- d. Sangat Buruk, rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)

Adapun indeks tata kola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) sub indikator :

Sub indikator pertama, merupakan Persentase ASN Deputy Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM I yang memenuhi jam pelajaran ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran. Adapun pemenuhan 20 Jam pelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya, dan benchmarking. Persentase ASN Asisten Deputy Ekonomi Digital yang memenuhi jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya, dan benchmarking merupakan alat untuk mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dalam memenuhi jam pelajaran sebanyak 20 jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam FGD/seminar/workshop mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sub indikator kedua, merupakan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Nilai evaluasi SAKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%.

Sub indikator ketiga, merupakan persentasi pemenuhan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Nilai PMPRB adalah nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB pada komponen Pengungkit baik Pemenuhan maupun Reform berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sub indikator keempat, merupakan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional.

Formula

Sub indikator pertama, Persentase ASN yang memenuhi jam pelajaran yaitu jumlah pegawai yang memenuhi 20 jam pelajaran. Rumus Pengukuran Persentase ASN yang memenuhi jam pelajaran yaitu jumlah pegawai yang memenuhi 20 jam pelajaran dibagi dengan jumlah pegawai di Deputy Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dengan formula:

% ASN yang memenuhi JP =
(Jumlah ASN yg memenuhi jam pelajaran dibagi Jumlah ASN yang dinilai x 100%) x 25

Sub indikator kedua, yaitu Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. . Sub indikator kedua memiliki nilai maksimal 25.

$$\text{Nilai SAKIP Deputy} = (\text{Nilai SAKIP Deputy 1}) \times 25$$

Sub indikator ketiga, yaitu persentasi pemenuhan PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. . Sub indikator ketiga memiliki nilai maksimal 25 dengan perhitungan realisasi PMPRB sebagai berikut:

$$\text{Persentasi Pemenuhan PMPRB} = (\% \text{ Pemenuhan PMPRB}) \times 25$$

Sub indikator keempat, yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. . Sub indikator keempat memiliki nilai maksimal 25 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Kualitas Pelaksanaan Anggaran} = ((\% \text{ penyerapan anggaran} \times 50\%) + (\% \text{ pencapaian keluaran} \times 50\%)) \times 25$$

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas kegiatan Tata Kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.

Satuan Pengukuran

Indeks Tata Kelola Deputy

Unit/Pihak Penyedia Data

Sekretariat Kemenko Perekonomian, Inspektorat

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM,, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Inspektur

Sumber Data

- 1.Data yang bersumber dari JP ASN yang berada pada ASN yang di kompilasi pada Bagian Protakel
- 2.Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3.Keluaran aplikasi pmprb.menpan.go.id dan Laporan PMPRB Inspektorat
- 4.Data penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA, yang didasarkan pada hasil realisasi SP2D dalam aplikasi OM SPAN

Tingkat Kendali IKU

(X) High (...) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(..) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	-



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI**

**Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Gd. Pos Ibukota, Blok A, 6th fl. Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710